



Katalog: 2302004
ISSN 2088-5679



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA

Agustus

2025

Volume 16, Nomor 2, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 2302004
ISSN 2088-5679

<https://www.bps.go.id>

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS 2025

Volume 16, Nomor 2, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2025

Volume 16, Nomor 2, 2025

Katalog: 2302004

ISSN: 2088-5679

Nomor Publikasi: 04100.25019

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xlv+157 halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penyunting:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pembuat Kover:

Direktorat Diseminasi Statistik

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

freepikc.om

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun
Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia
Agustus 2025
Volume 16, Nomor 2, 2025

Pengarah

Ateng Hartono

Penanggung Jawab

Ali Said

Penyunting

Kurniati Bachrun • Rachmi Agustiyani • Neny Aditina • Elfrida Zoraya
Fatreyna Muharamy Putri • Weni Lidya Sukma • Suryo Adi Rakhmawan • Putri Sakinah
Wida Siddhikara Perwitasari • Desta Febriana Indriyantika • Failasofa Amalia

Penulis Naskah

Kurniati Bachrun • Neny Aditina • Elfrida Zoraya • Fatreyna Muharamy Putri
Weni Lidya Sukma • Suryo Adi Rakhmawan • Putri Sakinah
Wida Siddhikara Perwitasari • Desta Febriana Indriyantika • Failasofa Amalia

Pengolah Data

Daniel Bastian Lubis

Penata Letak

Desta Febriana Indriyantika

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilaksanakan oleh BPS secara semesteran (Februari dan Agustus) sejak tahun 2015 di seluruh wilayah Indonesia sehingga hasilnya menggambarkan dinamika ketenagakerjaan secara berkesinambungan. Sakernas yang dilaksanakan pada bulan Februari menghasilkan estimasi indikator ketenagakerjaan pada tingkat provinsi. Sedangkan Sakernas Agustus menyajikan estimasi indikator hingga tingkat kabupaten/kota. Sejak terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua di akhir tahun 2022 maka publikasi ini memuat indikator ketenagakerjaan untuk 38 provinsi.

Publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2025 menyajikan perkembangan indikator pasar tenaga kerja yang mengacu pada *Key Indicators of the Labour Market-KILM* edisi 9 tahun 2015 yang direkomendasikan oleh ILO (*International Labour Organization*). Periode Sakernas yang disajikan dalam publikasi ini adalah Agustus 2024, Februari 2025, dan Agustus 2025.

Publikasi ini disusun dengan tujuan untuk menjadi rujukan dalam memahami kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan publikasi edisi berikutnya.



Jakarta, Desember 2025
Kepala Badan Pusat Statistik

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Amalia Adininggar Widyasanti. The signature is stylized and includes the date '16/12' written below it.

Amalia Adininggar Widyasanti

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah angkatan kerja di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hasil Sakernas Agustus 2025 mencatat jumlah angkatan kerja mencapai 154,00 juta orang, naik 1,90 juta orang dibandingkan Agustus 2024, dan bertambah 0,95 juta orang dibandingkan Februari 2025. Sebaliknya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan pola yang sedikit menurun. Pada Agustus 2025, TPAK tercatat sebesar 70,59 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 70 hingga 71 orang yang termasuk angkatan kerja. TPAK Agustus 2025 sedikit menurun dibandingkan Februari 2025 (70,60 persen), begitu pula jika dibandingkan Agustus 2024 (70,63 persen).

Pada Agustus 2025, rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja atau *Employment to Population Ratio* (EPR) tercatat sebesar 67,17 persen. Artinya, dari setiap 100 orang penduduk usia kerja, terdapat sekitar 67 orang yang bekerja. Angka ini naik tipis 0,01 persen poin dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 67,16 persen, namun mengalami penurunan 0,07 persen poin dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 67,24 persen.

Distribusi penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama pada Agustus 2025 sedikit berbeda dibandingkan dengan periode Agustus 2024 maupun Februari 2025. Pada Agustus 2025, persentase tertinggi tercatat pada penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai (38,74 persen), diikuti oleh status berusaha (38,72 persen), pekerja keluarga (12,96 persen), dan pekerja bebas (9,58 persen). Pada Agustus 2024 dan Februari 2025 persentase terbesar adalah penduduk bekerja dengan status berusaha.

Struktur lapangan pekerjaan utama di Indonesia menunjukkan pola yang kurang lebih sama pada Agustus 2024, Februari 2025, dan Agustus 2025, yakni masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan

Mobil dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan. Pada Agustus 2025, persentase penduduk bekerja pada ketiga kategori lapangan usaha tersebut, masing-masing sebesar 28,15 persen, 18,73 persen, dan 13,86 persen.

Penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan utama di Indonesia pada Agustus 2025 juga menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2025 dan Agustus 2024. Pada Agustus 2025, penduduk bekerja paling banyak sebagai Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar yang mencapai 30,05 persen, diikuti oleh jenis pekerjaan Tenaga Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan (27,19 persen), dan Tenaga Usaha Penjualan (20,63 persen).

Hasil Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja, yaitu sebesar 65,90 persen memiliki jam kerja 35 jam atau lebih per minggu. Angka ini menunjukkan pola yang konsisten pada dua periode sebelumnya, yaitu Februari 2025 dan Agustus 2024. Jika dibandingkan dengan Agustus 2024. Jika dibandingkan Agustus 2024, terjadi penurunan sebesar 0,37 persen poin, namun mengalami peningkatan 1,11 persen poin dibanding Februari 2025. Proporsi pekerja dengan jam kerja berlebih (*excessive hours of work*), yakni 49 jam atau lebih per minggu, masih cukup besar yaitu 25,47 persen.

Indikator tingkat pekerja paruh waktu tercatat sebesar 24,77 persen pada Agustus 2025. Artinya, dari setiap 100 orang penduduk bekerja, terdapat sekitar 25 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha serta tidak bersedia menerima tawaran pekerjaan. Pada Agustus 2025, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan sebesar 0,83 persen poin dibanding Agustus 2024, namun mengalami penurunan sebesar 1,04 persen poin dibandingkan dengan Februari 2025. .

Data Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa dari total 146,54 juta penduduk bekerja, 84,70 juta orang (57,80 persen) di antaranya bekerja pada kegiatan informal. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dua periode sebelumnya, yaitu Februari 2025 (59,40 persen)

dan Agustus 2024 (57,95 persen). Dengan kata lain, penduduk bekerja di Indonesia yang masih bergantung pada pekerjaan yang tidak berada dalam cakupan sistem perlindungan ketenagakerjaan nasional perlahan-lahan mulai berkurang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 mencapai 4,85 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sekitar 5 orang penganggur. TPT Agustus 2025 mengalami peningkatan 0,09 persen poin dibandingkan Februari 2025, namun mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

Berdasarkan tingkat pendidikan, TPT tertinggi pada Agustus 2025 terdapat pada pendidikan tingkat menengah (Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan) yaitu sebesar 7,58 persen. Dibandingkan dengan kondisi Februari 2025, TPT menurut jenjang pendidikan pada Agustus 2025 menunjukkan pola perubahan yang bervariasi. Pada tingkat pendidikan tidak pernah sekolah, TPT mengalami kenaikan 0,96 persen poin dari 2,08 persen menjadi 3,04 persen. Kenaikan juga terjadi pada pendidikan menengah, dari 6,99 persen menjadi 7,58 persen (naik 0,59 persen poin). Sebaliknya, TPT menurun pada pendidikan dasar (SD dan SMP), dari 3,03 persen menjadi 2,80 persen (turun 0,23 persen poin), serta pada pendidikan tinggi (Diploma ke atas) yang turun dari 5,97 persen menjadi 5,21 persen (turun 0,76 persen poin).

Data Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa TPT penduduk kelompok umur muda mencapai 16,89 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 17 orang penganggur. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2025 yaitu sebesar 0,73 persen poin dan menurun 0,43 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

Jumlah setengah pengangguran di Indonesia berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025 sebanyak 11,60 juta orang, Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 0,04 juta orang dibanding Agustus 2024, dan menurun 0,07 juta orang dibandingkan Februari 2025.

Penduduk bekerja yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah yang jam kerjanya di bawah 35 jam dalam seminggu, dan masih mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha atau bersedia menerima pekerjaan tambahan/lain.

Tingkat ketidakaktifan merupakan persentase penduduk yang termasuk kategori bukan angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 29,41 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja di Indonesia, terdapat sekitar 29 orang yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja).

Indikator KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf) berdasarkan variabel yang tersedia dalam Sakernas diproksikan menggunakan tingkat pendidikan formal, karena Sakernas tidak mengumpulkan data kemampuan baca tulis/tingkat literasi. Pada Agustus 2025, mayoritas angkatan kerja di Indonesia berpendidikan tingkat dasar sebesar 49,89 persen. Namun demikian, masih terdapat kurang dari satu persen angkatan kerja kelompok umur muda (15–24 tahun) dan pemuda (16–30 tahun) yang tidak pernah sekolah.

Indikator KILM 15 (Upah dan Biaya Kompensasi) berdasarkan hasil Sakernas terbatas pada indikator rata-rata upah atau gaji bersih sebulan dari penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai karena Sakernas tidak menyediakan data mengenai biaya kompensasi. Pada Agustus 2025, rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai mencapai 3,33 juta rupiah. Angka ini menunjukkan tren meningkat jika dibandingkan Februari 2025 (3,09 juta rupiah) dan Agustus 2024 (3,27 juta rupiah).

DAFTAR ISI

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA

Agustus 2025

Volume 16, Nomor 2, 2025

KATA PENGANTAR.....	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	VII
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVIII
PENJELASAN TEKNIS	XXIV
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM).....	XLIII
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	1
1.2 Sakernas dan KILM	4
1.3 Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	7
1.4 Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM.....	10
BAB 2 PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA	13
2.1 KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	13
2.2 KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (<i>Employment to Population Ratio</i> -EPR)	18
2.3 KILM 3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama...	24
2.4 KILM 4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama.....	26
2.5 KILM 5. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama.....	30

2.6 KILM 6. Pekerja Paruh Waktu.....	34
2.7 KILM 7. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja	43
2.8 KILM 8. Penduduk Bekerja di Kegiatan Informal	51
BAB 3 INDIKATOR PENGANGGURAN	58
3.1 KILM 9. Pengangguran	59
3.2 KILM 10. Pengangguran Pada Kelompok Umur Muda	69
3.3 KILM 12. Setengah Pengangguran (<i>Underemployment</i>)	75
BAB 4 INDIKATOR BUKAN ANGKATAN KERJA	83
4.1 KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan	83
BAB 5 INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF	87
5.1 KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf	87
BAB 6 INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA	95
6.1 KILM 15. Upah dan Biaya Kompensasi	95
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2024 dan 2025	24
Tabel 2	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (17 Kategori), 2024 dan 2025	26
Tabel 3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama, 2024 dan 2025	31
Tabel 4	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2024 dan 2025	59
Tabel 5	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2024 dan 2025	64
Tabel 6	Distribusi Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2024 dan 2025	67
Tabel 7	Rasio TPT Umur Muda Terhadap TPT Umur Dewasa di Indonesia, 2024 dan 2025	74
Tabel 8	Penduduk Bekerja yang Termasuk Setengah Penganggur Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (juta), 2024 dan 2025	76
Tabel 9	Indikator Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025	78
Tabel 10	Distribusi Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025	81
Tabel 11	Indikator Ketidakaktifan Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025	83
Tabel 12	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, 2024 dan 2025	89

Tabel 13	Rata-Rata Upah/Gaji Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (juta rupiah), 2024 dan 2025	96
----------	--	----

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Konsep Dasar Angkatan Kerja	xxv
Gambar 2	Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2024 dan 2025	13
Gambar 3	TPAK Menurut Jenis Kelamin (persen), 2024 dan 2025	14
Gambar 4	TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Februari 2025 dan Agustus 2025	15
Gambar 5	TPAK Menurut Provinsi (persen), Februari 2025 dan Agustus 2025	17
Gambar 6	<i>Employment to Population Ratio</i> (persen), 2024 dan 2025	18
Gambar 7	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025	19
Gambar 8	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kelompok Umur Muda dan Dewasa (persen), 2024 dan 2025	20
Gambar 9	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kelompok Umur (persen), Februari 2025 dan Agustus 2025	21
Gambar 10	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Provinsi (persen), Februari 2025 dan Agustus 2025	23
Gambar 11	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2025	29
Gambar 12	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Agustus 2025	32
Gambar 13	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2025	33
Gambar 14	Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), 2024 dan 2025	35
Gambar 15	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), 2024 dan 2025	36
Gambar 16	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025	37

Gambar 17	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari 2025 dan Agustus 2025	39
Gambar 18	Kontribusi Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), 2024 dan 2025	40
Gambar 19	Kontribusi Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), Februari 2025 dan Agustus 2025	42
Gambar 20	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2024 dan 2025	43
Gambar 21	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2025	45
Gambar 22	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2025	47
Gambar 23	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2025	50
Gambar 24	Persentase Penduduk Bekerja pada Kegiatan Formal/Informal, 2024 dan 2025	52
Gambar 25	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2024 dan 2025	53
Gambar 26	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Daerah Tempat Tinggal, 2024 dan 2025	55
Gambar 27	TPT Menurut Provinsi (persen), Februari 2025 dan Agustus 2025	61
Gambar 28	TPT Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2024 dan 2025	62
Gambar 29	Distribusi Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi (persen), Agustus 2025	68
Gambar 30	TPT Penduduk Umur Muda (persen), 2024 dan 2025	70
Gambar 31	TPT Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin (persen), 2024 dan 2025	71
Gambar 32	TPT Penduduk Umur Muda Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025	72

Gambar 33	<i>Share</i> Penganggur Umur Muda (persen), 2024 dan 2025	75
Gambar 34	Distribusi Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2024 dan 2025	79
Gambar 35	Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (persen), Agustus 2025	85
Gambar 36	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari 2025 dan Agustus 2025	90
Gambar 37	Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Agustus 2025	93
Gambar 38	Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi (juta rupiah), Februari dan Agustus 2025	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (orang), 2024 dan 2025	105
Lampiran 2	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (orang), 2024 dan 2025	107
Lampiran 3	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (orang), 2024 dan 2025	108
Lampiran 4	Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (orang), 2024 dan 2025	110
Lampiran 5	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (orang), 2024 dan 2025	111
Lampiran 6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025	112
Lampiran 7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2024 dan 2025	113
Lampiran 8	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (orang), 2024 dan 2025	114
Lampiran 9	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2024 dan 2025	116
Lampiran 10	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2024 dan 2025	117

Lampiran 11	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (orang), 2024 dan 2025	119
Lampiran 12	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin/Daerah Tempat Tinggal (orang), 2024 dan 2025	121
Lampiran 13	Indikator Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2024 dan 2025	122
Lampiran 14	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Jumlah Jam Kerja, 2024 dan 2025	123
Lampiran 15	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2024 dan 2025	124
Lampiran 16	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Kegiatan Formal/Informal, 2024 dan 2025	126
Lampiran 17	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2024 dan 2025	127
Lampiran 18	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen), 2024 dan 2025	128
Lampiran 19	Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2024 dan 2025	129
Lampiran 20	Persentase Setengah Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2024 dan 2025	130
Lampiran 21	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (orang), 2024 dan 2025	131
Lampiran 22	Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2024 dan 2025	132
Lampiran 23	Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2024 dan 2025	133

Lampiran 24	Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah), 2024 dan 2025	134
Lampiran 25	Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal (rupiah), 2024 dan 2025	135
Lampiran 26	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Agustus 2025	136
Lampiran 27	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, Agustus 2025	137
Lampiran 28	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi, Agustus 2025	138
Lampiran 29	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Agustus 2025	139
Lampiran 30	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, Agustus 2025	139
Lampiran 31	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen), Agustus 2025	140
Lampiran 32	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025	141
Lampiran 33	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi, Agustus 2025	142
Lampiran 34	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi, Agustus 2025	143

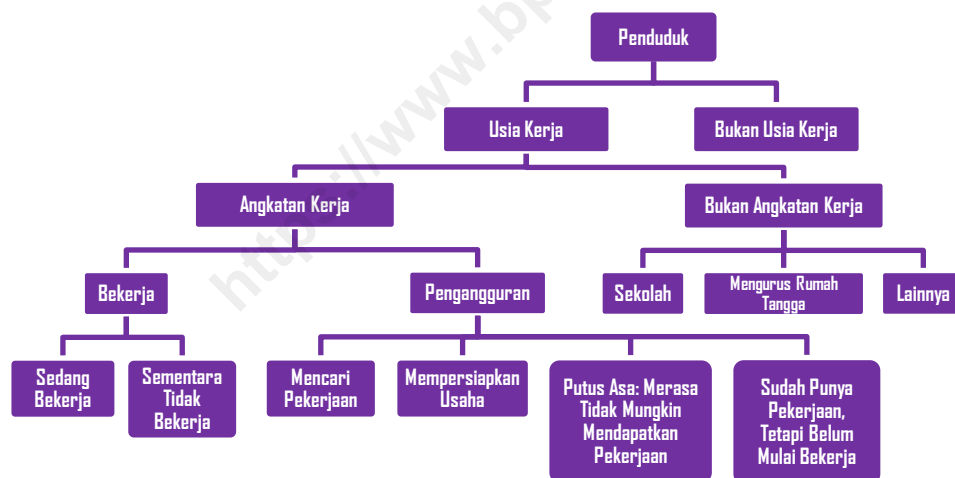
Lampiran 35	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2025	144
Lampiran 36	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Agustus 2025	144
Lampiran 37	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Agustus 2025	145
Lampiran 38	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Indikator Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Agustus 2025	146
Lampiran 39	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Indikator Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025	147
Lampiran 40	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Indikator Kontribusi (Share) Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025 ...	148
Lampiran 41	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Agustus 2025	149
Lampiran 42	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Kegiatan Formal, Agustus 2025	150
Lampiran 43	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Kegiatan Informal, Agustus 2025	151
Lampiran 44	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025	152

Lampiran 45	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), Agustus 2025	153
Lampiran 46	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2025	153
Lampiran 47	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2025	153
Lampiran 48	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi, Agustus 2025	154
Lampiran 49	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025	155
Lampiran 50	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2025	156
Lampiran 51	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha (rupiah), Agustus 2025	156
Lampiran 52	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi (rupiah), Agustus 2025	157

PENJELASAN TEKNIS

Konsep dan definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*–ILO), sebagaimana tercantum dalam buku “*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods*”, ILO 1992. Penggunaan definisi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan karakteristik ketenagakerjaan yang khas di Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas didasarkan pada Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labour Force Concept*), sebagaimana ditunjukkan pada diagram dibawah ini:



Gambar 1 Konsep Dasar Angkatan Kerja

Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam dalam konsep bekerja.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama satu tahun dan atau mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukuran angkatan kerja dan bukan angkatan kerja tersebut didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu terakhir, yaitu tujuh hari sampai sehari sebelum pendataan.

Umur atau usia kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja 15 tahun (meskipun dalam Sakernas dikumpulkan informasi mulai dari umur 5 tahun) dan tidak menetapkan batas atas usia kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasi masing-masing negara. Beberapa negara yang menggunakan batas atas usia kerja, seperti Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Sementara itu, banyak negara seperti Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja, seperti Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun).

Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja (termasuk yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai pekerjaan/melakukan aktivitas ekonomi atau tidak termasuk angkatan kerja karena sekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, serta kegiatan sosial seperti berorganisasi, dan kerja bakti).

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu terakhir sementara tidak aktif bekerja,

misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya. Konsep bekerja paling sedikit satu jam selama seminggu terakhir juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan tetap dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan bagi pengusaha. Penghasilan atau keuntungan tersebut dapat berupa uang dan atau barang.

Pengangguran meliputi penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja, atau sudah mempunyai usaha tetapi belum mulai berusaha. Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru' (bukan merupakan perluasan atau pengembangan dari usaha yang sudah ada), yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud berupa 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang telah berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan, atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja atau sudah mempunyai usaha tetapi belum mulai berusaha adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja/mempunyai usaha, tapi pada saat pendataan belum mulai bekerja/berusaha.

Periode referensi atau rujukan merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu terakhir paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu terakhir, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam (bekerja paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir). Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu. Kriteria satu jam digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tidak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan. Definisi penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), jika batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi "bekerja paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir" untuk mengkategorikan seseorang sebagai

bekerja, tanpa melihat lapangan pekerjaan, jabatan, maupun status pekerjaannya.

Indikator Pasar Tenaga Kerja

ILO meluncurkan *Key Indicator of Labour Market* (KILM) edisi ke-9 pada tahun 2015 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin serta meningkatkan penyebaran data mengenai elemen-elemen kunci pasar tenaga kerja dunia. Dalam edisi ini, ILO menyusun 17 (tujuh belas) indikator yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok. Adapun pengelompokan indikator KILM adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi di dunia kerja
 - KILM 1: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2. Indikator penduduk yang bekerja
 - KILM 2: Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population Ratio-EPR*)
 - KILM 3: Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan
 - KILM 4: Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
 - KILM 5: Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan
 - KILM 6: Pekerja Paruh Waktu
 - KILM 7: Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja
 - KILM 8: Penduduk Bekerja pada Kegiatan Informal
3. Indikator pengangguran dan setengah pengangguran
 - KILM 9: Pengangguran
 - KILM 10: Pengangguran pada Kelompok Umur Muda
 - KILM 11: Pengangguran Jangka Panjang
 - KILM 12: Setengah Pengangguran (*Underemployment*)
4. Indikator bukan angkatan kerja (ketidakaktifan)
 - KILM 13: Tingkat Ketidakaktifan
5. Indikator pendidikan dan melek huruf
 - KILM 14: Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf
6. Indikator upah dan biaya tenaga kerja
 - KILM 15: Upah dan Biaya Kompensasi
7. Produktivitas tenaga kerja
 - KILM 16: Produktivitas Tenaga Kerja

8. Indikator kemiskinan

- KILM 17: Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Dari keseluruhan indikator tersebut, sebanyak 14 (empat belas) indikator KILM dapat diukur dan ditampilkan melalui data Sakernas.

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara/wilayah. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, indikator ini digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, serta menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO menyajikan estimasi TPAK menurut jenis kelamin dan kelompok umur dengan standar berikut: 15–24, 15–64, 25–34, 25–54, 35–54, 55–64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini telah digunakan secara konsisten di lebih dari 190 negara sejak tahun 1980.

KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population Ratio – EPR*)

Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (*Employment to Population Ratio – EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja yang bekerja terhadap total penduduk usia kerja di suatu negara. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di suatu negara memiliki pekerjaan. Sebaliknya, rasio

yang rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja, baik karena sedang menganggur maupun (lebih sering) karena tidak termasuk dalam angkatan kerja atau yang dikenal sebagai bukan angkatan kerja (BAK).

Indikator ini memberikan informasi penting mengenai kemampuan suatu perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja. Di banyak negara, indikator ini sering memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan dengan tingkat pengangguran, karena dapat mencerminkan sejauh mana penduduk usia kerja terserap dalam kegiatan ekonomi. Meskipun secara umum nilai EPR yang tinggi dianggap sinyal positif, indikator ini tidak cukup untuk menilai ketersediaan atau kualitas pekerjaan yang layak maupun untuk mengidentifikasi defisit pekerjaan yang layak. Diperlukan indikator tambahan untuk menilai berbagai aspek lain, seperti tingkat upah/gaji, jumlah jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja secara keseluruhan. Selain itu, nilai EPR yang tinggi tidak selalu mencerminkan kondisi yang positif. Sebagai contoh, keterbatasan akses pendidikan dapat mendorong kaum muda untuk segera bekerja demi membiayai pendidikan atau kebutuhan hidup dibandingkan langsung melanjutkan sekolah untuk mengembangkan kapasitas sumber daya mereka. Oleh karena itu, sangat disarankan agar indikator ini dianalisis secara terpadu bersama indikator ketenagakerjaan lainnya dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara atau wilayah.

KILM 3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Klasifikasi penduduk bekerja menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Seiring dengan perkembangan ekonomi, negara umumnya mengalami pergeseran struktur ketenagakerjaan, dari dominasi sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa. Pergeseran ini biasanya ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, serta menurunnya proporsi

pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar yang umumnya berada di sektor pertanian.

Status pekerjaan merujuk pada kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan ekonomi. Kategorisasi status pekerjaan utama dalam Sakernas adalah sebagai berikut:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian; dan
7. Pekerja keluarga/tidak dibayar.

Dalam publikasi ini, status pekerjaan utama dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1. Buruh/karyawan/pegawai;
2. Berusaha, yang mencakup:
 - a. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar;
 - b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar;
 - c. Berusaha sendiri;
3. Pekerja bebas, terdiri dari:
 - a. Pekerja bebas di pertanian
 - b. Pekerja bebas di nonpertanian;
4. Pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

KILM 4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Informasi ketenagakerjaan sektoral berguna untuk mengidentifikasi pergeseran dalam struktur ketenagakerjaan serta tingkat pembangunan ekonomi. Dalam literatur pembangunan ekonomi, proses pembangunan umumnya ditandai dengan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian dan aktivitas padat karya lainnya menuju sektor industri, dan akhirnya menuju ke sektor jasa. Selama proses ini, mobilitas tenaga kerja dari wilayah perdesaan ke perkotaan juga menjadi ciri yang

menonjol. Selain itu, indikator ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi motor pertumbuhan lapangan kerja. Dengan memantau perubahan komposisi ketenagakerjaan menurut lapangan usaha, indikator ini dapat memberikan informasi penting mengenai transformasi struktural dalam perekonomian, potensi peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan identifikasi sektor prioritas untuk intervensi kebijakan ketenagakerjaan.

Klasifikasi lapangan usaha dalam publikasi ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, yang membagi sektor ekonomi ke dalam 17 kategori, yaitu:

- A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- B. Pertambangan dan Penggalian;
- C. Industri Pengolahan;
- D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
- E. *Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi;
- F. Konstruksi;
- G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- H. Pengangkutan dan Pergudangan;
- I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;
- J. Informasi dan Komunikasi;
- K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
- L. Real Estat;
- M,N. Aktivitas Profesional dan Perusahaan;
- O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;
- P. Pendidikan;
- Q. Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
- R,S,T,U. Aktivitas Jasa Lainnya

KILM 5. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Klasifikasi penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik pekerjaan utama yang dilakukan oleh

individu berdasarkan keterampilan dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan tersebut. Indikator ini penting untuk memahami struktur pasar kerja dan dinamika permintaan tenaga kerja pada berbagai kelompok jabatan.

Sejak Sakernas tahun 2016, klasifikasi jenis pekerjaan mengacu pada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014, yang disusun berdasarkan *International Standard Classification of Occupations* (ISCO) 2008. KBJI 2014 menyajikan uraian jenis pekerjaan yang lebih rinci dan komprehensif sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Namun, dalam penyajian pada publikasi ini, klasifikasi jenis pekerjaan disesuaikan dan dikonversikan ke dalam format Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI) 1982, agar tetap sejalan dengan tren data historis. Kategori jenis pekerjaan yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

- 0/1. Tenaga Profesional, Teknisi, dan yang Sejenis;
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan;
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis;
4. Tenaga Usaha Penjualan;
5. Tenaga Usaha Jasa;
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan;
- 7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat–Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar;
- X/00. Lainnya

KILM 6. Pekerja Paruh Waktu

Indikator pekerja paruh waktu bermanfaat untuk mengidentifikasi fleksibilitas dan keterbatasan dalam pasar tenaga kerja, serta mengukur sejauh mana penduduk bekerja memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak di suatu negara. Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk bekerja yang memiliki jam kerja kurang dari standar pekerjaan penuh–waktu (*full–time employment*) yang diproporsikan terhadap total penduduk bekerja. Dalam konteks ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jumlah jam kerja penuh–waktu atau

jam kerja normal, dan tidak sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha atau tidak bersedia menerima pekerjaan tambahan.

Secara internasional, belum terdapat definisi baku mengenai jumlah minimum jam kerja per minggu yang dianggap sebagai pekerjaan penuh-waktu. Untuk keperluan statistik, ILO merekomendasikan agar setiap negara menggunakan definisi nasional yang konsisten dalam menentukan batas jam kerja penuh-waktu. Beberapa negara menetapkan batas 35 jam per minggu sebagai acuan pekerjaan penuh waktu, seperti Republik Korea, Amerika Serikat, dan El Salvador¹⁾. Untuk kasus Indonesia, definisi pekerja paruh waktu yang digunakan adalah penduduk bekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha atau tidak bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 7. Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

Jumlah jam kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan keseimbangan kehidupan kerja pada penduduk bekerja, serta terhadap tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, pengukuran tingkat dan tren jumlah jam kerja pada berbagai kelompok penduduk bekerja maupun secara individu, menjadi penting dalam pemantauan kondisi kerja, evaluasi kualitas pekerjaan, serta dalam analisis perkembangan ekonomi suatu negara.

Indikator ini bertujuan untuk menyajikan distribusi penduduk bekerja menurut jumlah jam kerja per minggu, baik berdasarkan jam kerja biasanya maupun jam kerja aktual. Kategori pengelompokan jam kerja yang digunakan meliputi: 0 jam (sementara tidak bekerja), 1–34 jam (pekerja paruh waktu), 35–48 jam (pekerja penuh waktu/jam kerja normal), dan 49 jam ke atas (pekerja dengan jam kerja panjang/berlebih). Informasi ini juga berperan dalam mengidentifikasi potensi kelebihan beban kerja,

¹⁾ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

kekurangan kesempatan kerja, serta efektivitas pemanfaatan tenaga kerja dalam sistem ekonomi.

KILM 8. Penduduk Bekerja pada Kegiatan Informal

Indikator penduduk bekerja pada kegiatan informal menunjukkan proporsi orang yang bekerja pada kegiatan informal dibandingkan dengan total penduduk bekerja. Kegiatan informal merupakan bagian penting dari perekonomian, terutama di negara berkembang dan negara dengan pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Indikator ini penting untuk menilai kualitas pekerjaan, cakupan perlindungan sosial, dan sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi pasar kerja.

Konferensi Perburuhan Internasional (*International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-17 mendefinisikan pekerja kegiatan informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau tidak diberikan izin sakit, dan sebagainya)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk berbagai tingkat pekerjaan dan bukan pada individu, karena seseorang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua, yaitu usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal. Usaha sendiri informal mencakup pemilik usaha sektor informal, pekerja yang berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar, dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Sedangkan yang termasuk pekerjaan upahan informal yaitu karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pekerjaan informal dapat ditemukan di seluruh kategori status pekerjaan, termasuk pengusaha, buruh/karyawan, pekerja mandiri, dan pekerja keluarga.

Saat ini, BPS belum dapat menyajikan data pekerja informal berdasarkan ICLS ke-17 secara resmi, karena masih dalam proses kajian. Untuk penyajian pada publikasi ini, BPS menentukan penduduk bekerja pada kegiatan formal dan informal berdasarkan status dalam pekerjaan utama. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai, sementara kelompok status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai penduduk bekerja pada kegiatan informal.

KILM 9. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering disebut sebagai tingkat pengangguran, menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, namun secara aktif mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, serta bersedia untuk bekerja. Perlu dicatat bahwa konsep pengangguran tidak selalu dapat dimaknai sebagai indikator langsung dari kesulitan ekonomi, meskipun sering dikaitkan dengan tingkat kemiskinan. Korelasi antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu positif, dalam beberapa kasus tingkat pengangguran justru relatif rendah di kalangan penduduk miskin. Hal ini dapat terjadi karena kelompok miskin sering kali tidak memungkinkan untuk tetap menganggur dan cenderung bekerja dalam pekerjaan informal, bergaji rendah, atau pekerjaan yang tidak layak demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha baru dan bersedia untuk bekerja. Dalam konteks Sakernas, penganggur terbuka terdiri dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang:

1. Tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
2. Tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha baru;
3. Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa); atau

4. Sudah punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai usaha, tetapi belum mulai bekerja/berusaha.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang belum dimanfaatkan. Jika bekerja sering diartikan sebagai kondisi yang diinginkan bagi penduduk aktif secara ekonomi (angkatan kerja), maka pengangguran merupakan kondisi yang tidak diinginkan. Namun, ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Misalnya, saat terjadi perubahan struktural perekonomian (pergeseran dari sektor manufaktur ke jasa, atau adopsi teknologi baru) sebagian tenaga kerja mungkin kehilangan pekerjaan sementara waktu. Dalam masa transisi tersebut, pengangguran jangka pendek memungkinkan individu untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan keterampilan baru yang dibutuhkan pasar. Dalam konteks ini, pengangguran berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian alami, agar keseimbangan baru antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dapat tercapai secara lebih efisien. Tanpa adanya periode pengangguran sementara ini, mobilitas tenaga kerja dan efisiensi pasar kerja justru bisa terganggu.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator paling informatif yang mencerminkan kondisi umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Namun, indikator ini tidak selalu mencerminkan tingkat kesulitan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru. Oleh karena itu, penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan dalam memperoleh pekerjaan. Untuk mengevaluasi tingkat kesulitan ekonomi secara menyeluruh, diperlukan indikator tambahan, termasuk yang berkaitan dengan pendapatan.

Secara matematis, tingkat pengangguran didefinisikan sebagai rasio antara jumlah penganggur (pada tingkat nasional atau kelompok penduduk tertentu) terhadap jumlah angkatan kerja. Perlu ditekankan bahwa penyebut (denominator) dalam perhitungan tingkat pengangguran adalah jumlah angkatan kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah total penduduk. Perbedaan ini sering kali kurang dipahami oleh publik. Bahkan, istilah "angkatan kerja" dan "penduduk bekerja" kadang-kadang digunakan secara keliru dan saling dipertukarkan. Sebagai contoh, jika tingkat pengangguran sebesar 6 persen, maka artinya 6 persen dari angkatan kerja sedang tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan atau bersedia untuk bekerja.

KILM 10. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran pada penduduk umur muda memberikan gambaran mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru, dan (c) bersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 11. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Informasi ini dikumpulkan hanya untuk tipe pengangguran yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha sehingga tidak lengkap untuk seluruh kategori pengangguran. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 12. Setengah Pengangguran (*Underemployment*)

Penduduk yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dengan kondisi:

1. Secara sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Penduduk yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerja dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Penduduk yang menginginkan untuk dapat mengganti pekerjaan yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
2. Bersedia menerima pekerjaan tambahan/lain.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (kelompok ini umumnya disebut sebagai bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK—lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen. Dengan kata lain, tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurangi dengan TPAK ($1 - \text{TPAK}$).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna data dapat melihat sejauh mana peran ibu yang bekerja dikaitkan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa struktur rumah tangga memengaruhi aktivitas pasar tenaga kerja, sebagai contoh kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan rendah, begitu juga dengan suami yang memiliki anak. Di sisi lain, ketidakaktifan yang tinggi pada pria, misalnya karena sedang menempuh pendidikan atau tidak mampu bekerja, dapat menyebabkan istri menjadi pencari nafkah utama.

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi.

Kategori pendidikan yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education–ISCED–97*). Pada Sakernas pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED–97 yang telah disesuaikan yaitu sebagai berikut:

1. Tidak pernah bersekolah adalah penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
2. Pendidikan tingkat dasar, yaitu penduduk yang tidak/belum tamat SD dan mereka yang berpendidikan tamat SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
3. Pendidikan tingkat menengah, yaitu penduduk dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;
4. Pendidikan tingkat tinggi, yaitu penduduk yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/S1, dan S2/S3.

Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15–24 tahun), pemuda (16–30 tahun²⁾), dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

²⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

KILM 15. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja

Indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah. Indikator yang disajikan hasil Sakernas pada publikasi ini adalah rata-rata upah/pendapatan sebulan terakhir bagi buruh/karyawan/pegawai. Data terkait biaya kompensasi tidak dapat disajikan pada publikasi ini karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas.

KILM 16. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi tenaga kerja berperan dalam proses produksi. Indikator ini memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian pula sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang kurang produktif. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intensive*) dan sektor padat modal (*capital intensive*). Namun, karena keterbatasan data yang dikumpulkan dalam Sakernas, indikator ini tidak dapat disajikan.

KILM 17. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator produktivitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KBJI	Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

BAB 1 PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuan utama dari Sakernas adalah untuk memonitor dinamika ketenagakerjaan, sehingga para pengambil kebijakan dapat dengan cepat merespons dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Sejak Triwulan I 2011, BPS menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*-ILO), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market*-KILM). KILM pertama kali diluncurkan oleh ILO pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data rutin, serta untuk memperluas penyebaran data terkait indikator utama pasar tenaga kerja global. Mulai tahun 2011, KILM Indonesia mengacu pada publikasi ILO edisi ke-6. Sejak tahun 2017, publikasi KILM Indonesia merujuk pada publikasi ILO edisi ke-9 yang dirilis oleh ILO pada tahun 2015.

1.1 Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan dikumpulkan oleh BPS melalui berbagai kegiatan sensus dan survei, antara lain Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Di antara berbagai survei tersebut, Sakernas dirancang khusus untuk menyediakan data yang menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pendataan. Hasil Sakernas digunakan untuk menghitung indikator ketenagakerjaan yang secara resmi (*official*) dipublikasikan oleh BPS.

Secara umum, Sakernas bertujuan menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, Sakernas menghasilkan estimasi jumlah penduduk bekerja, pengangguran, dan berbagai indikator lain yang menggambarkan dinamika ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Pengumpulan data ketenagakerjaan melalui Sakernas pertama kali dilaksanakan pada tahun 1976. Seiring perkembangannya, Sakernas mengalami berbagai perubahan dalam periode pendataan, cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Pada tahun 1986 hingga 1993, Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 hingga 2001 dilakukan secara tahunan setiap bulan Agustus, dan tahun 2002 hingga 2004 dilakukan secara tahunan dan triwulanan. Adapun tahun 2005 hingga tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya kebutuhan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, pengumpulan data Sakernas pada 2011-2014 kembali dilakukan secara triwulanan yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), dengan penyajian data hingga tingkat provinsi. Pada Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan untuk menghasilkan estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Pada November 2014, Sakernas tidak dilaksanakan karena berbagai pertimbangan, dan mulai tahun 2015 Sakernas kembali dilaksanakan secara semesteran (dua kali setahun) di seluruh wilayah Indonesia.

Dari sisi jumlah sampel, Sakernas pada Agustus 2015 mencakup sekitar 200.000 rumah tangga, lalu berkurang menjadi sekitar 50.000 rumah tangga pada Agustus 2016. Pada Sakernas Agustus 2018, jumlah sampel kembali menjadi sekitar 200.000 rumah tangga. Mulai tahun 2019, jumlah sampel ditingkatkan menjadi sekitar 75.000 rumah tangga untuk Sakernas Februari dan sekitar 300.000 rumah tangga untuk Sakernas Agustus.

Perubahan juga terjadi dari sisi cakupan wilayah administrasi pada tahun 2022. Level estimasi provinsi yang sebelumnya mencakup 34 provinsi bertambah menjadi 38 provinsi akibat terjadinya pemekaran Provinsi Papua yang membentuk tiga provinsi baru (Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan) serta pemekaran di Provinsi Papua Barat yang membentuk satu provinsi baru (Papua Barat Daya).

Sejak Sakernas Februari 2024, pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan moda *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu dengan aplikasi *Flexible Authentically Survey in Harmony* (FASIH), kecuali sebagian wilayah di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang masih menggunakan moda *Paper and Pencils Interviewing* (PAPI). Namun, sejak pendataan Sakernas Agustus 2024 hingga saat ini, semua wilayah telah melakukan pengumpulan data dengan moda CAPI.

Pada pelaksanaan Sakernas Agustus 2025 dilakukan perubahan metodologi karena adanya penyesuaian terhadap kegiatan SUPAS 2025. Perubahan utama dilakukan melalui penetapan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebagai wilayah pendataan (*enumeration area*), menggantikan Blok Sensus (BS) yang digunakan pada periode sebelumnya. Penyesuaian ini berdampak pada jumlah sampel, yang semula sebesar 307.200 rumah tangga pada 30.720 BS menjadi 302.260 rumah tangga pada 30.226 SLS, dengan alokasi 10 rumah tangga sampel per SLS. Selain itu, terdapat tambahan 60 SLS (600 rumah tangga) untuk memenuhi kebutuhan estimasi wilayah Ibu Kota Nusantara, sehingga total sampel Sakernas Agustus 2025 menjadi 30.286 SLS atau sekitar 302.860 rumah tangga.

Data yang dikumpulkan pada Sakernas Agustus 2025 untuk setiap rumah tangga terpilih meliputi keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga (nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, NIK, bulan dan tahun lahir, serta umur). Pada anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas, dikumpulkan informasi status perkawinan, pendidikan dan pelatihan, informasi

mengenai migrasi, disabilitas, teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), kegiatan bekerja seminggu terakhir, sementara tidak bekerja, pekerjaan pertanian, pekerjaan utama, pekerjaan tambahan utama, jam kerja seluruh pekerjaan dan situasi pekerjaan, dan kegiatan lain. Sedangkan untuk anggota rumah tangga yang berumur 15 tahun ke atas, juga dikumpulkan informasi terkait kegiatan mencari pekerjaan, kesiapan bekerja, dan pengalaman kerja di dalam maupun luar negeri. Selain itu, juga dikumpulkan informasi rumah tangga yakni mengenai sumber pendapatan rumah tangga.

1.2 Sakernas dan KILM

Sakernas mengumpulkan berbagai macam variabel yang memungkinkan penyusunan indikator inti pasar tenaga kerja, seperti KILM yang diterbitkan oleh ILO. Pengguna data harus berhati-hati saat membandingkan hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain seperti SP, SUPAS, dan Susenas. Hal ini karena perbedaan karakteristik dan metodologi survei yang membuat data tersebut tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh pengguna data dalam menginterpretasikan dan menganalisis data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1. Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan, sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk menghasilkan indikator demografi. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, meliputi data pendidikan, migrasi, keluarga berencana, dan ketenagakerjaan. Demikian pula, informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam, mencakup data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Perbedaan

tujuan antar-survei tersebut berdampak pada variasi cakupan dan kualitas data ketenagakerjaan yang dihasilkan.

2. Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ukuran sampel memengaruhi besarnya *sampling error* pada setiap sumber data. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error* yang dihasilkan.

3. Petugas Lapangan

Petugas lapangan Sakernas Agustus 2025 terdiri atas Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) dan Petugas Pendataan Lapangan (PPL). PML diutamakan berasal dari pegawai organik BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota (diutamakan lulusan minimal Diploma III dan berpengalaman dalam pengumpulan data Sakernas). PPL dapat berasal dari pegawai organik BPS Kabupaten/Kota maupun non-organik (mitra statistik) BPS yang ditugaskan dan diutamakan berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat (SMA/sederajat) serta berpengalaman dalam pengumpulan data Sakernas.

Secara umum, seorang PPL bertugas melakukan pendataan pada dua sampai tiga SLS (sebagian besar PPL akan bertugas pada tiga SLS). Seorang PML bertugas mengawasi dua sampai tiga PPL (sebagian besar PML akan mengawasi dua PPL).

4. Perencanaan Kuesioner

Proses penyusunan pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat memengaruhi hasil survei maupun sensus. Faktor-faktor seperti bentuk kalimat/pertanyaan, urutan pertanyaan, pemilihan kata yang tepat, jumlah pertanyaan, serta jenis informasi yang digali akan menentukan kualitas data yang dihasilkan. Kuesioner Sakernas dirancang secara komprehensif, mudah dipahami, dan

menjaga konsistensi pertanyaan antar periode agar data ketenagakerjaan tetap dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.

Sejak Agustus 2020, kuesioner disesuaikan dengan kondisi "new normal" pada masa pandemi COVID-19. Perubahan utama kuesioner tersebut antara lain adalah penggunaan konsep ketenagakerjaan menurut konsep ICLS-13, penambahan pertanyaan terkait dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan berdasarkan rekomendasi ILO, penyederhanaan kuesioner, serta pengelompokan pertanyaan menurut masing-masing topik.

Pada Sakernas Agustus 2023, terjadi beberapa perubahan dalam kuesioner. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah dihapusnya pertanyaan mengenai dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan keputusan World Health Organization (WHO) yang telah mencabut status darurat COVID-19 pada 5 Mei 2023.

Semenjak pelaksanaan Sakernas tahun 2025, rancangan kuesioner Sakernas disusun dengan mengimplementasikan konsep ketenagakerjaan berdasarkan ICLS ke-19, ke-20, dan ke-21 yang merupakan rujukan terbaru dari ILO. Meskipun demikian, kuesioner Sakernas Agustus 2025 tetap mempertahankan penerapan ICLS-13 untuk menjaga *series* data dan memenuhi kebutuhan rilis data ketenagakerjaan yang masih menggunakan konsep ketenagakerjaan berdasarkan ICLS-13.

5. Waktu Pelaksanaan/Pendataan

Waktu pelaksanaan lapangan Sakernas, Susenas, SP, dan SUPAS berbeda. Perbedaan waktu pelaksanaan tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musiman.

Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

1. Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja; dan

2. Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini.

Indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3 Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan

Identifikasi dan kuantifikasi inefisiensi dalam pasar tenaga kerja, seperti kurangnya pemanfaatan tenaga kerja (*underutilization*) dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*), merupakan langkah awal dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan. Tujuan kebijakan ini tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kompleksitas isu ketenagakerjaan menuntut pengumpulan data yang menyeluruh dan terorganisasi serta informasi pasar tenaga kerja dapat dianalisis secara komprehensif. Dalam konteks ini, KILM dapat berperan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi pasar tenaga kerja. Beberapa contoh berikut menggambarkan bagaimana KILM dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1. Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*)

Salah satu tujuan agenda ILO dalam mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Penerapan konsep "layak" dalam berbagai kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara

signifikan antar individu. Hal serupa juga berlaku bagi penilaian atas jam kerja yang berlebih.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 9, 10, dan 12), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan dari indikator bukan angkatan kerja (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas pekerjaan sehingga disebut "layak" dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama, lapangan pekerjaan utama, dan jenis pekerjaan utama (KILM 3, KILM 4, dan KILM 5), jam kerja yang berlebih (*excessive working hours*) pada indikator penduduk yang bekerja menurut jumlah jam kerja (KILM 7), penduduk yang bekerja di kegiatan informal (KILM 8), dan setengah pengangguran (KILM 12).

2. Pemantauan Pencapaian Tujuan Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah tujuan yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan secara global, tujuan ini merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015. Sakernas sebagai salah satu sumber data penyusun indikator SDGs diharapkan dapat memenuhi informasi yang diperlukan.

Indikator SDGs yang dapat dihasilkan dari Sakernas antara lain:

- Proporsi perempuan yang memegang jabatan manajerial,
- Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin,
- Pendapatan rata-rata per jam dari pekerja perempuan dan laki-laki, menurut pekerjaan, kelompok usia, dan penyandang disabilitas,

- Tingkat pengangguran terbuka, berdasarkan jenis kelamin, dan kelompok umur,
- Tingkat setengah pengangguran,
- Persentase penduduk usia muda (15–24 tahun) yang tidak sedang mengikuti pendidikan, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET),
- Persentase dan jumlah anak usia 5–17 tahun yang terlibat dalam pekerja anak, menurut kelompok jenis kelamin dan umur, dan
- Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

3. Memantau Kesenjangan Gender di Pasar Tenaga Kerja

Perempuan menghadapi tantangan khusus dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM disajikan dengan disagregasi berdasarkan jenis kelamin, sehingga memungkinkan analisis kesetaraan gender dalam indikator ketenagakerjaan. Data ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

4. Mengkaji Tenaga Kerja di Era Globalisasi

Globalisasi berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak; namun kenyataannya, manfaat tersebut sering kali tidak terdistribusi secara merata. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk menghadapi era globalisasi sambil tetap mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak bagi semua orang. Salah satu cara menghadapinya adalah menjadikan tenaga kerja sebagai tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial.

Indikator KILM dapat digunakan untuk memantau dinamika pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh globalisasi. Sebagai contoh, beberapa penelitian menunjukkan bahwa globalisasi dapat berdampak pada hilangnya atau terciptanya lapangan kerja, serta pada perubahan upah dan produktivitas. Jika indikator menunjukkan adanya dampak negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan penyesuaian kebijakan ekonomi makro untuk

meminimalkan biaya penyesuaian dan mendistribusikan manfaat globalisasi secara lebih adil.

1.4 Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM

Jumlah negara yang mengumpulkan statistik ketenagakerjaan, khususnya tingkat pengangguran, terus meningkat. Meskipun angka pengangguran relatif mudah dikumpulkan dan dibandingkan antarwilayah, pengguna data perlu berhati-hati dalam menggunakan angka pengangguran dalam menganalisis kondisi pasar tenaga kerja. Angka pengangguran hanyalah salah satu aspek dari pasar tenaga kerja, sehingga analisis harus memperhatikan elemen-elemen lain untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh.

Langkah awal analisis pasar tenaga kerja adalah mengklasifikasikan penduduk ke dalam penduduk usia kerja dan bukan usia kerja, sesuai standar ILO dan praktik Sakernas. Batas penduduk usia kerja di Indonesia adalah 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terbagi menjadi dua kategori yaitu yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja-KILM 1) dan yang tidak aktif dalam perekonomian (bukan angkatan kerja-KILM 13). Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja (KILM 2) dan menganggur (KILM 9). Kualitas angkatan kerja bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang dicapai, semakin tinggi tingkat pendidikan maka kualitas relatif semakin baik (KILM 14).

Tingginya proporsi penduduk yang tergolong pengangguran atau bukan angkatan kerja di suatu negara mencerminkan potensi permasalahan tenaga kerja yang kurang termanfaatkan (*underutilization*). Dalam menghadapi situasi tersebut pemerintah seharusnya berusaha untuk menganalisis apa alasan penduduk tidak aktif di pasar kerja, sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat.

Adapun jika mayoritas bukan angkatan kerja adalah perempuan, dan alasannya karena perempuan memiliki tanggung jawab mengurus

rumah tangga, pemerintah mungkin dapat membuat kebijakan yang dapat mendorong perempuan masuk ke pasar kerja. Misalnya dengan membangun pusat-pusat penitipan anak, memberikan jam kerja yang lebih fleksibel terhadap perempuan, dan lain-lain.

Bagi individu yang tidak aktif di pasar kerja karena memiliki keterbatasan fungsional (disabilitas), pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, atau setidaknya menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai di lingkungan kerja, guna mendukung partisipasi mereka dalam dunia kerja.

Tantangan yang lebih kompleks bagi pemerintah adalah mengembalikan orang yang “putus asa” (*discouraged worker*) masuk kembali ke pasar kerja. Hal tersebut disebabkan karena orang yang “putus asa” merasa tidak ada pekerjaan yang sesuai, atau kualifikasi mereka kurang, atau bahkan mereka tidak tahu ke mana harus mencari kerja. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah bisa membuat pelatihan-pelatihan kerja sesuai minat dan kemampuan mereka, atau membuat lembaga yang dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi mereka.

Analisis pengangguran perlu dilakukan dengan mempertimbangkan variabel seperti jenis kelamin, wilayah tempat tinggal (perkotaan/perdesaan), dan tingkat pendidikan (KILM 9), serta kelompok usia muda (KILM 10). Pendekatan ini penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai komposisi pengangguran, sehingga kebijakan yang disusun dapat lebih tepat sasaran.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi dan pengalaman kerja. Karakteristik tersebut juga penting untuk dianalisis, sehingga dapat dicari akar masalahnya dan bisa diberikan solusi kebijakan yang tepat. Secara paradoks, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan kemiskinan yang substansial di suatu negara, sementara tingkat

pengangguran yang tinggi bisa terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan tingkat kemiskinan yang rendah.

Di banyak negara berkembang, perlindungan sosial seperti asuransi pengangguran dan tunjangan kesejahteraan umumnya belum tersedia. Akibatnya, hanya kelompok masyarakat yang relatif "kaya", yaitu mereka yang memiliki tabungan atau pendapatan di luar pekerjaan (non-labour income), yang dapat memilih untuk menganggur. Dalam konteks ini, pengangguran menjadi semacam "barang mewah", karena mereka yang miskin tidak memiliki pilihan selain bekerja apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup. Fenomena ini sering disebut dengan istilah *too poor to be unemployed*. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam, dari seluruh penduduk yang bekerja di Indonesia, berapa banyak yang sebenarnya memiliki pekerjaan yang layak.

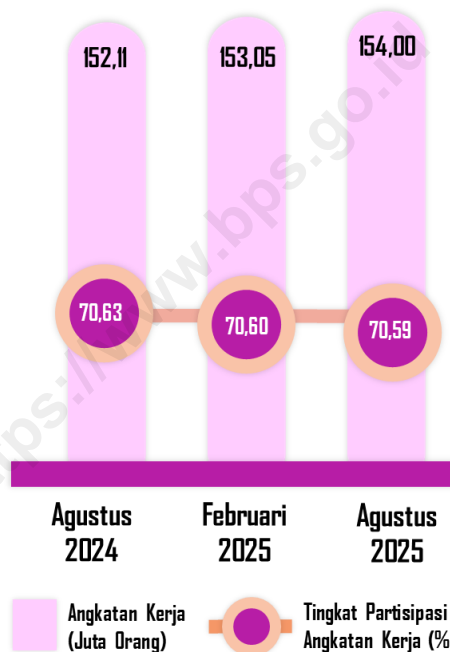
Pekerjaan layak adalah pekerjaan yang dilakukan atas kemauan atau pilihan sendiri memberikan penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup secara layak dan berharkat, serta menjamin keselamatan fisik maupun psikologis. Kelayakan pekerjaan dapat dianalisis melalui berbagai indikator, seperti status pekerjaan (KILM 3), apakah seseorang bekerja sebagai buruh atau karyawan yang cenderung berpenghasilan tetap, atau sebagai pekerja bebas pertanian yang penghasilannya tidak menentu. Selain itu, indikator lain seperti lapangan pekerjaan (KILM 4), jenis pekerjaan (KILM 5), pekerja paruh waktu (KILM 6), jumlah jam kerja (KILM 7), kegiatan informal (KILM 8), dan setengah penganggur (KILM 12) juga penting untuk mengukur kelayakan pekerjaan. Untuk mengetahui apakah pekerja tersebut tergolong sejahtera atau tidak, perlu dianalisis dari sisi upah atau pendapatannya (KILM 15).

BAB 2 PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA

2.1 KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



"Jumlah angkatan kerja terus menunjukkan tren peningkatan, meskipun TPAK Agustus 2025 sedikit menurun dibandingkan Februari 2025."



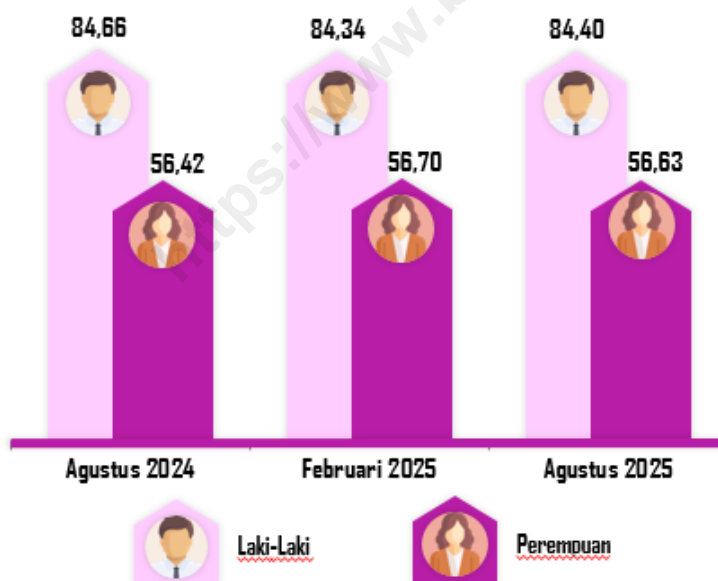
Gambar 2 Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2024 dan 2025

Jumlah angkatan kerja di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hasil Sakernas Agustus 2025 mencatat jumlah angkatan kerja mencapai 154,00 juta orang, naik 1,89 juta orang dibandingkan Agustus 2024, dan bertambah 0,95 juta orang dibandingkan pada Februari 2025. Sebaliknya, TPAK menunjukkan pola yang sedikit menurun. Pada Agustus 2025, TPAK

tercatat sebesar 70,59 persen artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja terdapat 71 orang yang termasuk angkatan kerja. TPAK Agustus 2025 sedikit menurun dibandingkan Februari 2025 (70,60 persen), begitu pula jika dibandingkan Agustus 2024 (70,63 persen) (Gambar 2). Peningkatan TPAK secara semesteran dapat mencerminkan membaiknya partisipasi masyarakat terhadap pasar kerja, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, bertambahnya kesempatan kerja, atau peningkatan kesadaran akan pentingnya bekerja (ILO, 2013). Sebaliknya, penurunan TPAK secara semesteran meskipun kecil tetap perlu dicermati, karena hal tersebut bisa disebabkan oleh faktor musiman, struktural, atau pilihan individu untuk tidak bekerja sementara waktu (ILOSTAT, n.d.-e).

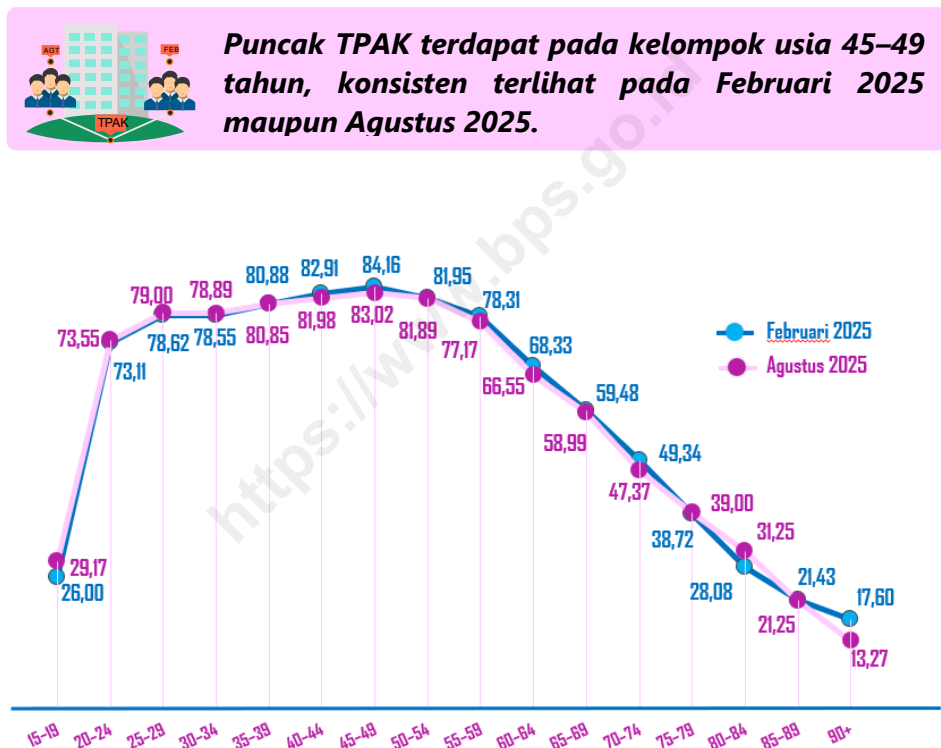


Kesenjangan masih tinggi, partisipasi perempuan di pasar kerja sedikit berfluktuasi.



**Gambar 3 TPAK Menurut Jenis Kelamin (persen),
2024 dan 2025**

Secara umum, TPAK laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam tiga periode terakhir, yaitu Agustus 2024, Februari 2025, dan Agustus 2025. Pada Agustus 2025, TPAK laki-laki tercatat sebesar 84,40 persen, sementara TPAK perempuan sebesar 56,63 persen. Artinya, dari setiap 100 penduduk usia kerja laki-laki, sekitar 84 orang tergolong angkatan kerja. Sementara itu, dari 100 perempuan usia kerja, sekitar 57 orang yang tergolong angkatan kerja. Kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan masih cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan nilai TPAK laki-laki yang berkisar 1,5 kali lipat dari nilai TPAK perempuan.



**Gambar 4 TPAK Menurut Kelompok Umur (persen),
Februari 2025 dan Agustus 2025**

TPAK menurut kelompok umur menunjukkan pola menyerupai huruf “U” terbalik, seperti terlihat pada Gambar 4. Pada Agustus 2025, kelompok usia 15–19 tahun mencatat TPAK sebesar 29,17 persen, meningkat dari Februari 2025 yang sebesar 26,00 persen. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk pada kelompok usia tersebut masih bersekolah dan belum memasuki pasar kerja. Seiring bertambahnya usia, TPAK meningkat hingga mencapai puncaknya pada kelompok usia 45–49 tahun, yaitu sebesar 83,02 persen. Setelah itu, tingkat partisipasi mulai menurun pada kelompok usia berikutnya hingga usia lanjut. Pola penurunan ini menggambarkan bahwa setelah melewati usia 49 tahun, partisipasi angkatan kerja cenderung menurun seiring bertambahnya usia.

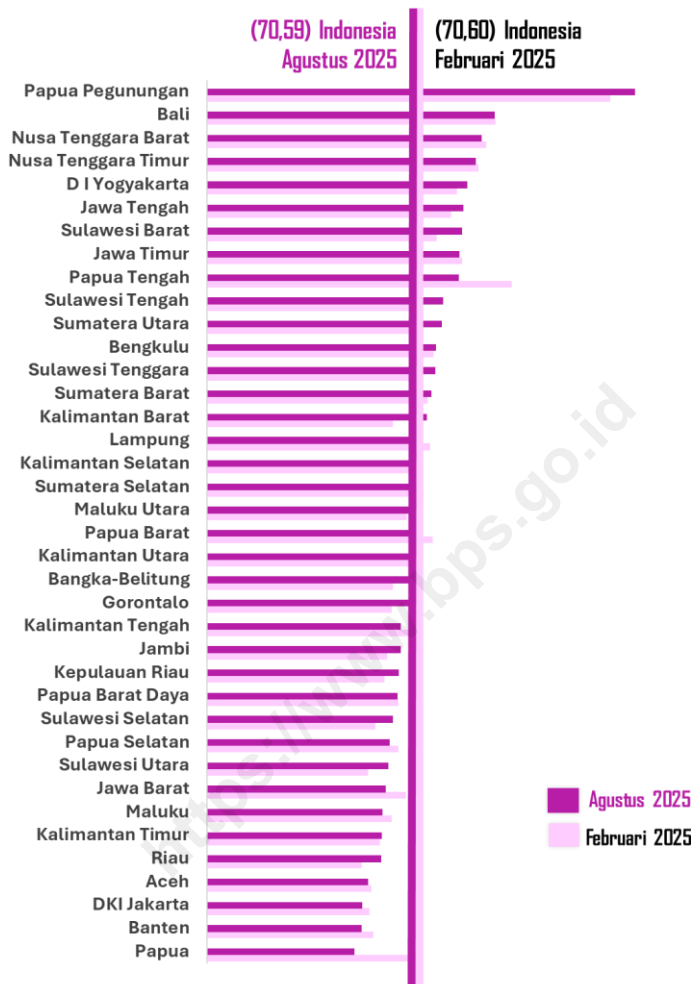


Papua Pegunungan konsisten menjadi provinsi dengan TPAK tertinggi pada Agustus 2025, diikuti oleh Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Pada Agustus 2025, TPAK nasional tercatat sebesar 70,59 persen. Dari 38 provinsi, terdapat 15 provinsi yang memiliki TPAK lebih tinggi dibandingkan angka nasional tersebut. Tiga provinsi dengan TPAK tertinggi pada periode ini adalah Papua Pegunungan (90,66 persen), Bali (77,31 persen), dan Nusa Tenggara Barat (76,11 persen). Sebagai perbandingan, pada Februari 2025, TPAK nasional sedikit lebih tinggi, yaitu 70,60 persen, dengan 13 provinsi yang memiliki TPAK di atas angka nasional. Tiga provinsi dengan TPAK tertinggi pada Februari 2025 adalah Papua Pegunungan (88,27 persen), Papua Tengah (78,97 persen), dan Bali (77,40 persen). Data ini menunjukkan bahwa Papua Pegunungan konsisten menjadi provinsi dengan TPAK tertinggi di Indonesia sejak Februari 2025.

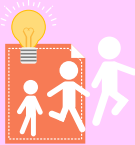
Sementara itu, provinsi dengan TPAK terendah pada Agustus 2025 adalah Papua (63,98 persen), Banten (64,66 persen), dan DKI Jakarta (64,75 persen). Adapun pada Februari 2025, provinsi dengan TPAK terendah

adalah Riau (64,68 persen), Sulawesi Utara (65,30 persen), dan DKI Jakarta (65,40 persen). Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 5 dan Lampiran 7.

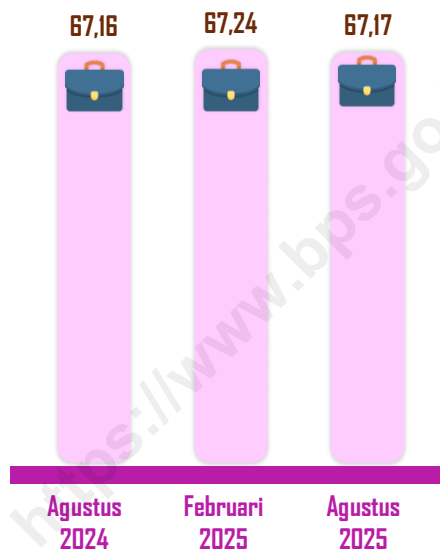


**Gambar 5 TPAK Menurut Provinsi (persen),
Februari 2025 dan Agustus 2025**

2.2 KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population Rasio-EPR*)



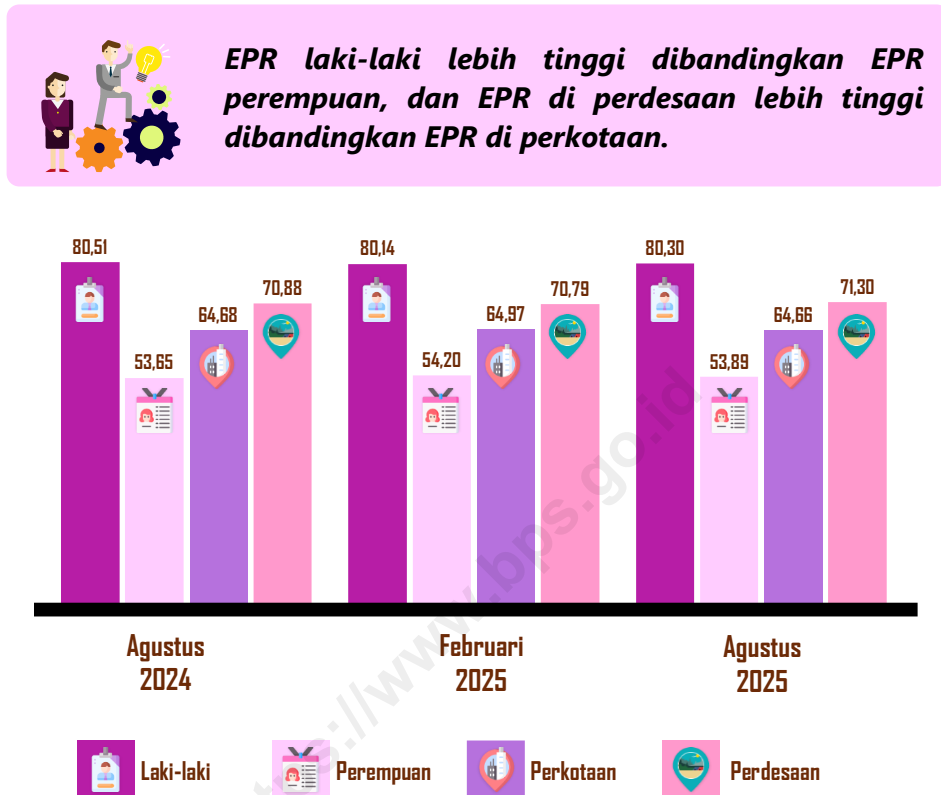
Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (EPR) meningkat tipis 0,01 persen poin dalam satu tahun terakhir, dari 67,16 persen pada Agustus 2024 menjadi 67,17 persen pada Agustus 2025.



Gambar 6 *Employment to Population Ratio* (persen), 2024 dan 2025

Pada Agustus 2025, rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (EPR) tercatat sebesar 67,17 persen. Artinya, dari setiap 100 orang penduduk usia kerja, terdapat sekitar 67 orang yang bekerja. Angka ini menunjukkan penurunan penyerapan tenaga kerja dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 67,24 persen, serta peningkatan tipis dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 67,16 persen. Menurut ILO (2013), EPR merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana pasar tenaga kerja dapat menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja, serta mencerminkan dinamika antara permintaan dan

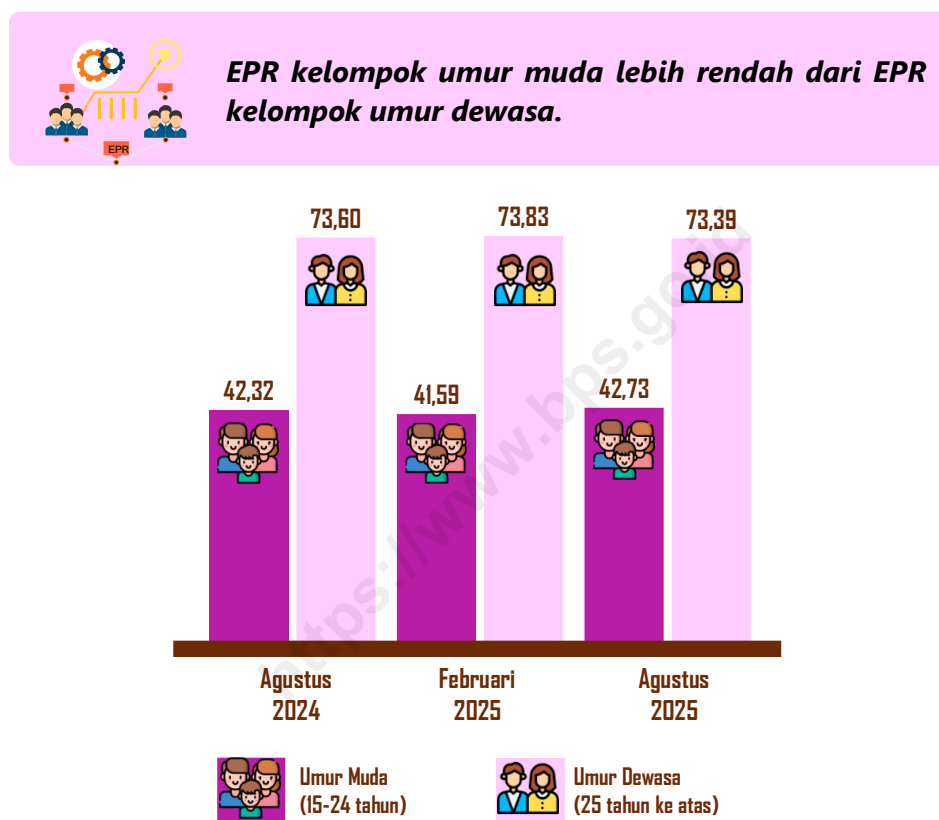
penawaran tenaga kerja dalam perekonomian. Peningkatan EPR biasanya mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja yang inklusif (ILOSTAT, n.d.-d).



Gambar 7 Employment to Population Ratio Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025

Gambar 7 menyajikan EPR menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal dari Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Jika dilihat menurut jenis kelamin, EPR laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada Agustus 2025, EPR laki-laki tercatat sebesar 80,30 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan yang hanya 53,89 persen. Artinya, dari setiap 100 laki-laki usia kerja, terdapat sekitar 80 orang yang bekerja, sedangkan dari setiap 100 perempuan, hanya sekitar 54 orang yang bekerja. Selisih antara keduanya mencapai 26,41 persen poin, sedikit lebih rendah dibandingkan selisih pada Agustus 2024 yang sebesar 26,86 persen poin.

Sementara itu, berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk perdesaan cenderung lebih banyak yang bekerja dibandingkan penduduk perkotaan. Pada Agustus 2025, EPR di perdesaan tercatat sebesar 71,30 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 64,66 persen. Selisih antara perdesaan dan perkotaan tercatat sebesar 6,64 persen poin, meningkat dibandingkan selisih pada Agustus 2024 yang sebesar 6,20 persen poin.

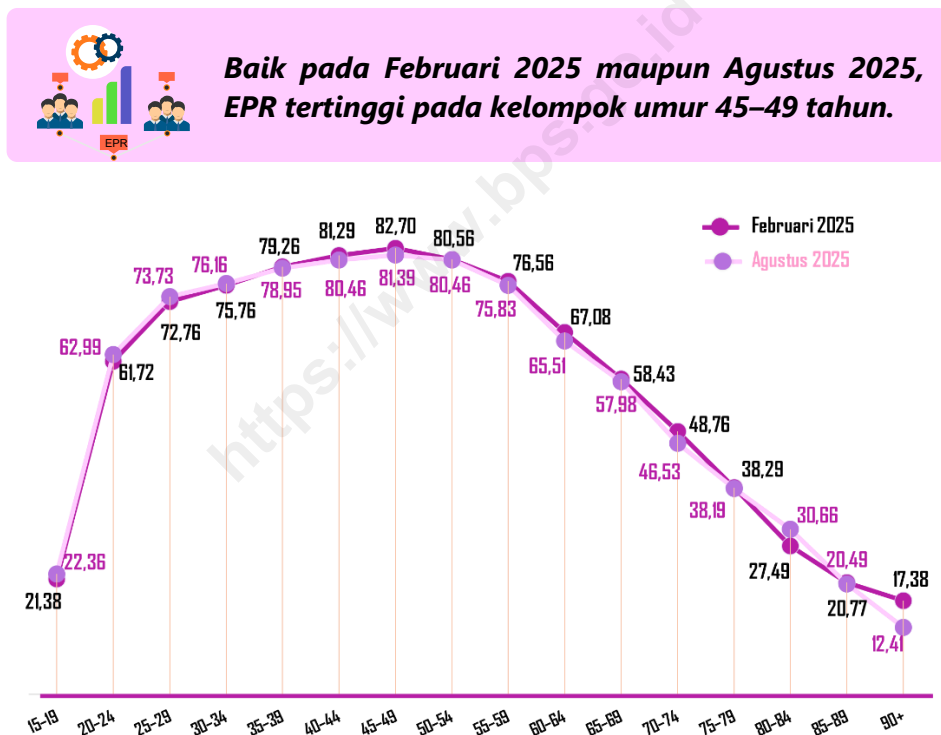


Gambar 8 *Employment to Population Ratio* Menurut Kelompok Umur Muda dan Dewasa (persen), 2024 dan 2025

EPR kelompok umur muda (15–24 tahun) lebih rendah dibandingkan kelompok umur dewasa (25 tahun ke atas). Pada Agustus 2025, EPR kelompok umur dewasa tercatat sebesar 73,39 persen, jauh lebih tinggi dibanding kelompok umur muda yang hanya mencapai 42,73 persen. Artinya, dari setiap 100 penduduk dewasa, sekitar 73 orang yang

bekerja, sedangkan dari setiap 100 penduduk muda, baru sekitar 43 orang yang bekerja. Selisih EPR antara kedua kelompok ini mencapai 30,66 persen poin.

Secara tren, EPR kelompok umur muda cenderung fluktuatif selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Angka EPR kelompok muda mengalami penurunan pada Februari 2025, menjadi 41,59 persen, namun kembali meningkat pada Agustus 2025 menjadi 42,73 persen. Pola sebaliknya terjadi pada EPR kelompok dewasa yang menunjukkan peningkatan dari 73,60 persen di Agustus 2024 menjadi 73,83 persen pada Februari 2025, dan menurun hingga 73,39 persen pada Agustus 2025.



Gambar 9 Employment to Population Ratio Menurut Kelompok Umur (persen), Februari 2025 dan Agustus 2025

Pola EPR menurut kelompok umur pada Agustus 2025 dan Februari 2025 menunjukkan kurva berbentuk huruf "U" terbalik, serupa

dengan pola TPAK pada Gambar 4. Pada Agustus 2025, EPR kelompok umur 15–19 tahun cenderung rendah, yaitu sebesar 22,36 persen. EPR kemudian meningkat tajam pada kelompok umur 20–24 tahun dan mencapai puncaknya pada kelompok umur 45–49 tahun, yaitu sebesar 81,39 persen. Setelah itu, EPR menurun secara bertahap seiring bertambahnya usia, dengan EPR terendah tercatat pada kelompok umur 90 tahun ke atas, yaitu sebesar 12,41 persen.

Dibandingkan Februari 2025, sebagian besar kelompok umur mengalami penurunan EPR pada Agustus 2025. Kelompok umur yang mengalami penurunan EPR terbesar adalah 90 tahun ke atas (turun 4,97 persen poin), diikuti oleh 70–74 tahun (turun 2,23 persen poin), dan 60–64 tahun (turun 1,57 persen poin). Sementara itu, kelompok umur yang mengalami kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok umur 80–84 tahun, yaitu naik 3,17 persen poin, diikuti oleh kelompok umur 20–24 tahun (naik 1,27 persen poin), dan 15–19 tahun (naik 0,98 persen poin).

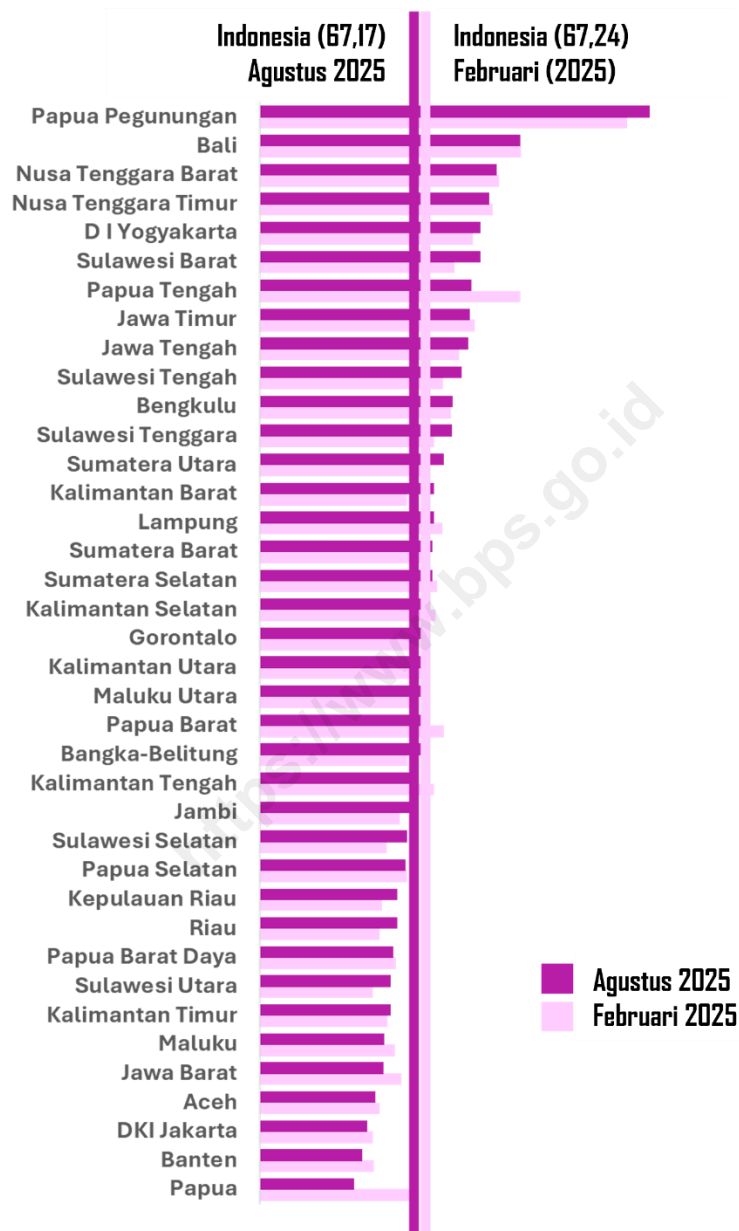


Agustus 2025: EPR tertinggi berada di Provinsi Papua Pegunungan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Hasil Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan EPR tertinggi adalah Papua Pegunungan (89,14 persen), Bali (76,16 persen), dan Nusa Tenggara Barat (73,78 persen). Sebanyak 17 provinsi mencatatkan EPR di atas rata-rata nasional yang sebesar 67,17 persen. Sebaliknya, provinsi dengan EPR terendah tercatat di Papua (59,53 persen), Banten (60,34 persen), dan DKI Jakarta (60,83 persen).

Papua Pegunungan konsisten menempati posisi sebagai provinsi dengan EPR tertinggi sejak Februari 2025. Pada periode tersebut, Papua Pegunungan mencatat EPR tertinggi sebesar 86,79 persen, diikuti oleh Bali (76,18 persen) dan Papua Tengah (76,16 persen). Sebanyak 17 provinsi mencatatkan EPR di atas rata-rata nasional yang saat itu sebesar 67,24 persen. Sementara itu, tiga provinsi dengan EPR terendah adalah DKI Jakarta (61,36 persen), Sulawesi Utara (61,36 persen), dan Banten (61,45

persen). Perbandingan ini menunjukkan adanya dinamika EPR di tingkat provinsi dari waktu ke waktu. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 10 dan Lampiran 9.



Gambar 10 *Employment to Population Ratio* Menurut Provinsi (persen), Februari 2025 dan Agustus 2025

2.3 KILM 3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama



Pada Agustus 2025, penduduk bekerja di Indonesia dengan status buruh/karyawan/pegawai merupakan kategori terbesar

Distribusi penduduk bekerja jika dirinci berdasarkan status pekerjaan utama, pada Agustus 2025 sedikit berbeda jika dibandingkan dengan periode Agustus 2024 maupun Februari 2025. Pada Agustus 2025, penduduk bekerja didominasi oleh mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai (38,74 persen). Persentase terbesar berikutnya yaitu status berusaha (38,72 persen), pekerja keluarga (12,96 persen) dan pada urutan terakhir yaitu pekerja bebas (9,58 persen). Pada Agustus 2024 dan Februari 2025 persentase terbesar adalah penduduk bekerja dengan status berusaha.

Tabel 1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2024 dan 2025

Status Pekerjaan Utama	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Buruh/Karyawan/Pegawai	38,80	37,08	38,74
Berusaha	38,85	40,14	38,72
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	3,24	3,52	3,46
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	13,83	16,04	13,86
Berusaha Sendiri	21,78	20,58	21,40
Pekerja Bebas	9,01	8,95	9,58
Pekerja Keluarga	13,34	13,83	12,96
Total	100,00	100,00	100,00

Selama setahun terakhir (Agustus 2024–Agustus 2025), terjadi peningkatan persentase pada status pekerja bebas sebesar 0,57 persen poin. Sedangkan status lainnya mengalami penurunan persentase berturut-turut 0,38 persen poin pada pekerja keluarga, 0,13 persen poin pada status berusaha, dan 0,06 persen poin pada buruh/karyawan/pegawai (Tabel 1). Perubahan komposisi ini menggambarkan adanya pergeseran struktur pekerjaan di Indonesia, yang berpotensi dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro, peningkatan fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta preferensi individu terhadap bentuk pekerjaan yang lebih mandiri atau berbasis usaha kecil (ILO, 2018; ILOSTAT, n.d.-b).

Pada periode Februari 2025–Agustus 2025, peningkatan persentase terjadi pada status buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas berturut-turut sebesar 1,66 persen poin dan 0,63 persen poin. Sedangkan status berusaha dan pekerja keluarga mengalami penurunan sebesar 1,42 persen poin dan 0,87 persen poin.

Pembahasan mengenai penduduk yang bekerja dengan status berusaha dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu berusaha dibantu buruh tetap, berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha sendiri. Pada Agustus 2025, persentase penduduk bekerja yang berusaha dibantu buruh tetap mencapai 3,46 persen, sedangkan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 13,86 persen, dan berusaha sendiri sebesar 21,40 persen.

Secara umum, jumlah penduduk yang bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2024 maupun Februari 2025. Namun, dibandingkan Agustus 2024, pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan berusaha dibantu buruh tidak tetap mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen poin dan 0,03 persen poin. Sementara itu, status berusaha sendiri menunjukkan pemulihan dibandingkan Februari 2025, dengan peningkatan sebesar 0,82 persen poin.

2.4 KILM 4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama



Persentase terbesar penduduk bekerja di kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Struktur lapangan pekerjaan utama di Indonesia menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda baik pada Agustus 2024, Februari 2025, maupun Agustus 2025 yang masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada Agustus 2025, penduduk bekerja pada kategori Pertanian, Kehutanan, Perikanan mencapai 28,15 persen. Persentase terbesar berikutnya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Perawatan Sepeda Motor yaitu sebesar 18,73 persen dan kategori Industri Pengolahan sebesar 13,86 persen (Tabel 2).

Tabel 2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (17 Kategori), 2024 dan 2025

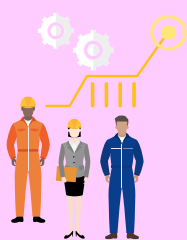
Lapangan Pekerjaan Utama	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	28,18	28,54	28,15
B. Pertambangan dan Penggalan	1,20	1,13	1,18
C. Industri Pengolahan	13,83	13,45	13,86
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	0,25	0,25	0,25
E. <i>Treatment</i> Air, <i>Treatment</i> Air Limbah, <i>Treatment</i> dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0,38	0,43	0,41
F. Konstruksi	6,55	5,97	6,51

Lanjutan Tabel 2

Lapangan Pekerjaan Utama	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	18,89	19,26	18,73
H. Pengangkutan dan Pergudangan	4,29	4,23	4,28
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7,79	7,87	7,98
J. Informasi dan Komunikasi	0,71	0,86	0,73
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1,18	1,14	1,12
L. Real Estat	0,39	0,34	0,35
M, N. Aktivitas Profesional dan Perusahaan	1,69	1,74	1,76
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,52	3,65	3,50
P. Pendidikan	4,95	5,04	5,06
Q. Aktivitas Kesehatan dan Aktivitas Sosial	1,64	1,72	1,68
R,S,T,U. Aktivitas Jasa Lainnya	4,56	4,38	4,45
Total	100,00	100,00	100,00

Pada kategori lapangan pekerjaan, persentase penduduk bekerja dapat mengalami fluktuasi, baik peningkatan maupun penurunan. Sebanyak 7 dari 17 kategori mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja selama setahun terakhir (Agustus 2024–Agustus 2025). Tiga kategori dengan kenaikan terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (0,19 persen poin), Pendidikan (0,11 persen poin), serta Aktivitas Profesional dan Perusahaan (0,07 persen poin).

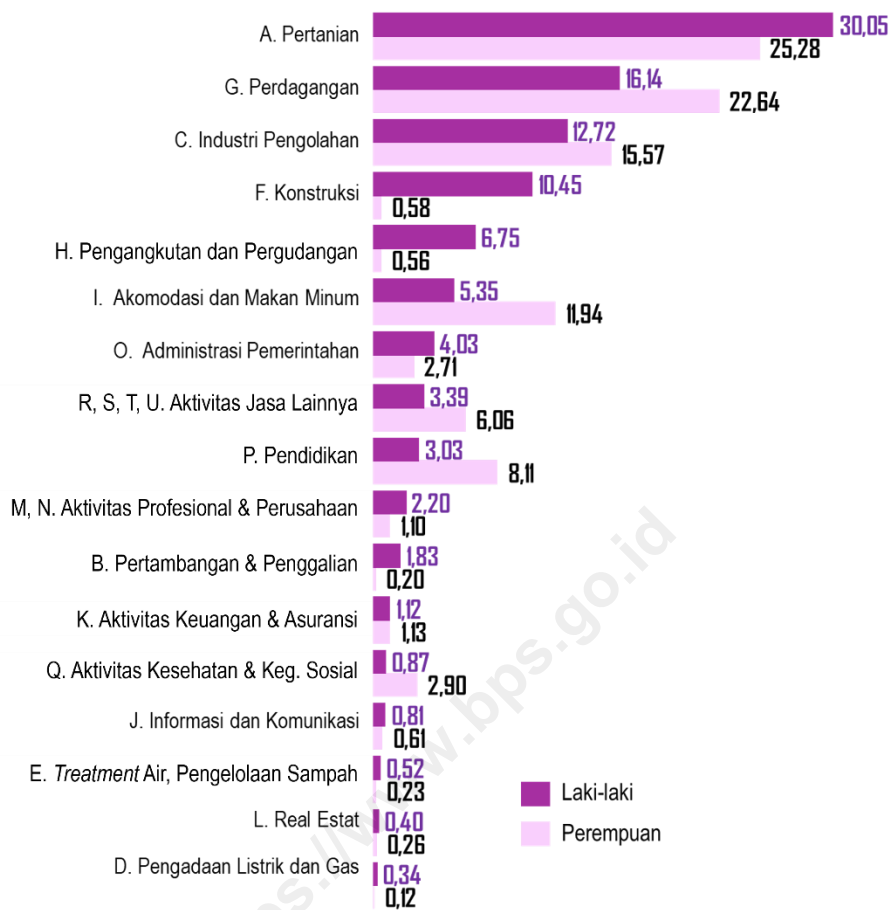
Dibanding keadaan satu semester yang lalu (Februari 2025–Agustus 2025), sebanyak 9 dari 17 kategori lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja. Tiga kategori dengan peningkatan paling besar adalah kategori Konstruksi (0,54 persen poin), Industri Pengolahan (0,41 persen poin), dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (0,11 persen poin).



Pada Agustus 2025, gap terbesar pada proporsi penduduk bekerja laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan terdapat pada kategori Konstruksi, sedangkan gap terbesar pada proporsi penduduk bekerja perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki berada di kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum.

Pada Agustus 2025, terlihat adanya segregasi lapangan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin dalam komposisi penduduk yang bekerja. Terdapat 10 dari 17 kategori lapangan pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki. Tiga lapangan pekerjaan dengan gap terbesar, yang menunjukkan proporsi pekerja laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, berada pada kategori Konstruksi (9,87 persen poin), Pengangkutan dan Pergudangan (6,19 persen poin), serta Pertanian, Kehutanan, Perikanan (4,77 persen poin).

Sementara itu, pada tujuh kategori lapangan pekerjaan lainnya proporsi pekerja perempuan tercatat lebih tinggi daripada laki-laki. Tiga lapangan pekerjaan dengan *gap* terbesar yang menunjukkan dominasi pekerja perempuan terdapat pada Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (6,59 persen poin), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (6,50 persen poin), dan Pendidikan (5,08 persen poin).



Gambar 11 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2025

2.5 KILM 5. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Indikator jenis pekerjaan (*occupation*) memegang peranan penting dalam memahami struktur dan dinamika pasar tenaga kerja. Klasifikasi pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan memberikan gambaran tentang persebaran tenaga kerja menurut tugas dan fungsi pekerjaan yang dilakukan, seperti profesional, teknisi, operator mesin, hingga pekerja kasar. Informasi ini tidak hanya mencerminkan perkembangan sektor ekonomi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan kebutuhan keterampilan di pasar kerja.

Menurut International Labour Organization (ILO), "*Occupational classification provides a framework for collecting and presenting data about the jobs people do, to support planning, employment policy, and vocational training*" (ILO, 2012). Dengan kata lain, indikator ini sangat krusial dalam merancang kebijakan pendidikan, pelatihan keterampilan (*upskilling/reskilling*), dan strategi ketenagakerjaan nasional.

Selain itu, analisis jenis pekerjaan juga memungkinkan identifikasi kesenjangan kerja berdasarkan gender, wilayah, dan tingkat pendidikan. Misalnya, sebagian besar pekerjaan di bidang teknis atau sains masih didominasi laki-laki, sementara pekerjaan pelayanan cenderung ditempati perempuan. Data semacam ini penting untuk mendorong kesetaraan dan inklusi di dunia kerja.



"Paling banyak penduduk bekerja sebagai tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar."

Jenis pekerjaan utama penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2025 masih menunjukkan pola yang sama antara Februari 2025 dengan Agustus 2024. Sebagai gambaran, pada Agustus 2025 penduduk bekerja paling banyak sebagai Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar yang mencapai 30,05 persen dari total penduduk bekerja. Persentase terbanyak selanjutnya adalah penduduk

bekerja dengan jenis pekerjaan Tenaga Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan (27,19 persen), dan Tenaga Usaha Penjualan (20,63 persen), seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3. Komposisi ini mencerminkan struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang masih didominasi oleh sektor industri dan pertanian, dengan kontribusi signifikan dari sektor perdagangan, sesuai dengan karakteristik negara berkembang (ILO, 2018; ILOSTAT, n.d.-a).

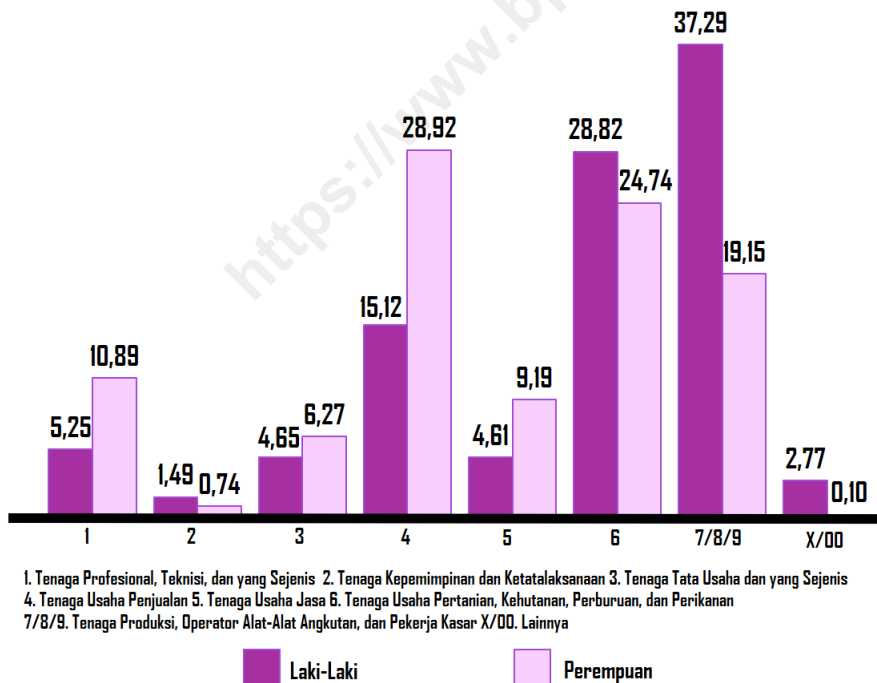
Tabel 3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama, 2024 dan 2025

Jenis Pekerjaan Utama	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis	7,35	7,35	7,50
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	1,26	1,17	1,19
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	5,47	5,65	5,30
4. Tenaga Usaha Penjualan	20,61	21,13	20,63
5. Tenaga Usaha Jasa	6,55	5,64	6,44
6. Tenaga Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan	27,39	27,86	27,19
7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan dan Pekerja Kasar	29,80	29,53	30,05
X/00. Lainnya	1,58	1,67	1,70
Total	100,00	100,00	100,00

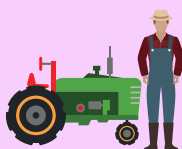


Pada Agustus 2025, laki-laki paling banyak bekerja sebagai Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar; sedangkan perempuan paling banyak bekerja sebagai Tenaga Usaha Penjualan.

Ditinjau menurut jenis kelamin, pada Sakernas Agustus 2025, persentase tertinggi penduduk laki-laki bekerja adalah pada jenis pekerjaan Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar sebesar 37,29 persen. Sementara itu, persentase tertinggi perempuan bekerja pada jenis pekerjaan Tenaga Usaha Penjualan sebesar 28,92 persen (Gambar 12). Perbedaan ini mencerminkan pola pembagian kerja yang masih dipengaruhi oleh faktor gender di pasar tenaga kerja Indonesia, laki-laki lebih banyak bekerja di sektor-sektor yang bersifat fisik dan teknis sedangkan perempuan lebih dominan di sektor jasa dan perdagangan (ILO, 2018; ILOSTAT, n.d.-b).

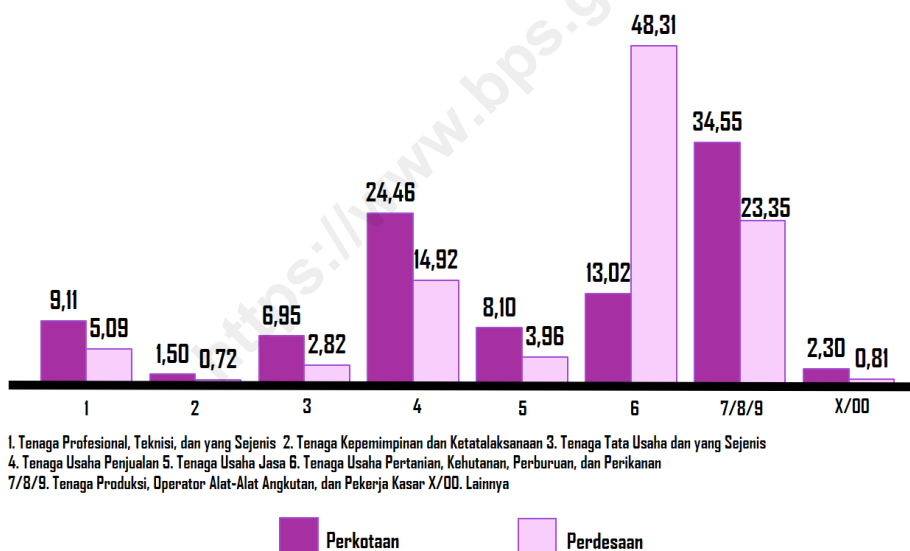


Gambar 12 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Agustus 2025



Pada Agustus 2025, mayoritas penduduk perdesaan bekerja sebagai Tenaga Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan; sedangkan penduduk perkotaan paling banyak bekerja sebagai Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase jenis pekerjaan terbesar pada Agustus 2025 di daerah perdesaan adalah Tenaga Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan yaitu sebesar 48,31 persen. Sementara penduduk di daerah perkotaan paling banyak bekerja sebagai Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar sebesar 34,55 persen (Gambar 13).



Gambar 13 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2025

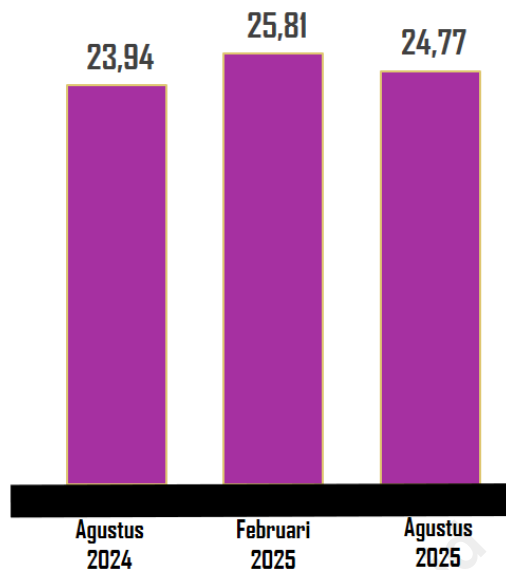
2.6 KILM 6. Pekerja Paruh Waktu

Salah satu indikator yang digunakan dalam ukuran ini adalah pekerja paruh waktu, indikator ini berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Dalam pengukurannya, indikator ini merupakan proporsi dari total penduduk bekerja. Walaupun jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu, namun mereka tidak sedang mencari dan mempersiapkan usaha. Selain itu, pekerja paruh waktu juga tidak bersedia jika ada yang menawarkan pekerjaan lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja paruh waktu belum tentu termasuk golongan dari pekerja yang tidak layak.

Indikator ini penting dalam memahami kondisi kerja yang mungkin mencerminkan ketidakseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan preferensi atau keterbatasan pekerja, termasuk isu-isu seperti pekerjaan tidak sukarela, perlindungan sosial, serta kualitas dan stabilitas pekerjaan. Selain itu, informasi ini mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan dalam pola kerja modern, seperti gig economy (sistem kerja berbasis proyek jangka pendek atau lepas, seringkali melalui platform digital) dan kerja fleksibel (ILO, 2018; OECD, 2020).



Agustus 2025: Tingkat pekerja paruh waktu sebesar 24,77 persen.

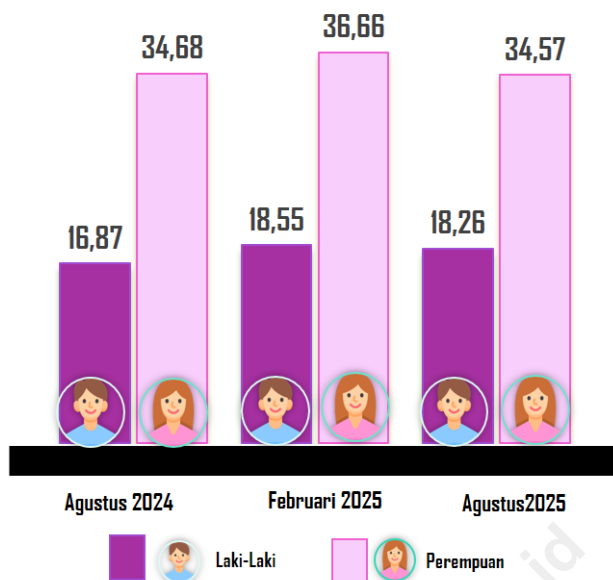


Gambar 14 Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), 2024 dan 2025

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, tingkat pekerja paruh waktu tercatat sebesar 24,77 persen. Artinya, dari setiap 100 orang yang bekerja, sekitar 25 di antaranya bekerja kurang dari 35 jam per minggu tanpa keinginan untuk menambah jam kerja. Dibandingkan dengan Agustus 2024, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan sebesar 0,83 persen poin. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan Februari 2025 tingkat pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 1,04 persen poin. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh faktor musiman, kondisi ekonomi, dan preferensi pekerja terhadap jam kerja (ILO, 2018; ILOSTAT, n.d.-f).



Tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki.

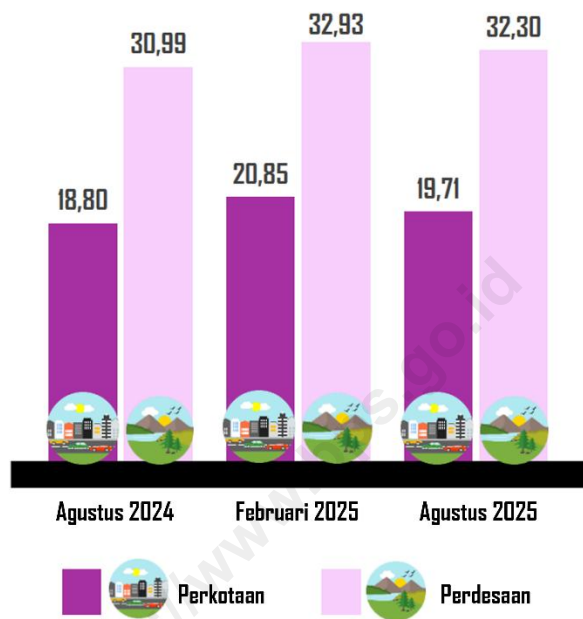


Gambar 15 Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), 2024 dan 2025

Hasil Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, masing-masing sebesar 34,57 persen dan 18,26 persen. Informasi ini mengindikasikan bahwa lebih banyak perempuan yang bekerja dengan jam kerja di bawah normal tanpa keinginan untuk menambah jam kerja. Jika dibandingkan dengan Agustus 2024, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,39 persen poin. Sebaliknya, pada periode yang sama, tingkat pekerja paruh waktu perempuan justru mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin. Namun, jika dibandingkan dengan Februari 2025, terjadi penurunan tingkat pekerja paruh waktu pada kedua jenis kelamin. Pada laki-laki, penurunan tercatat sebesar 0,29 persen poin, sementara pada perempuan mencapai 2,09 persen poin.



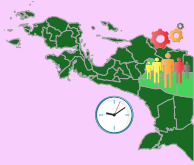
Tingkat pekerja paruh waktu di perdesaan lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu di perkotaan.



Gambar 16 Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025

Berdasarkan Gambar 16, tingkat pekerja paruh waktu menurut daerah tempat tinggal menunjukkan pola yang konsisten, di mana tingkat pekerja paruh waktu di perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan di perkotaan selama periode 2024 dan 2025. Sebagai ilustrasi, pada Agustus 2025, tingkat pekerja paruh waktu di perdesaan mencapai 32,30 persen, sementara di perkotaan hanya sebesar 19,71 persen. Jika dibandingkan dengan Agustus 2024, tingkat pekerja paruh waktu baik di wilayah perkotaan dan perdesaan mengalami kenaikan yaitu berturut-turut sebesar 0,91 persen poin dan 1,31 persen poin. Namun, bila dibandingkan dengan Februari 2025, tingkat pekerja paruh waktu mengalami penurunan

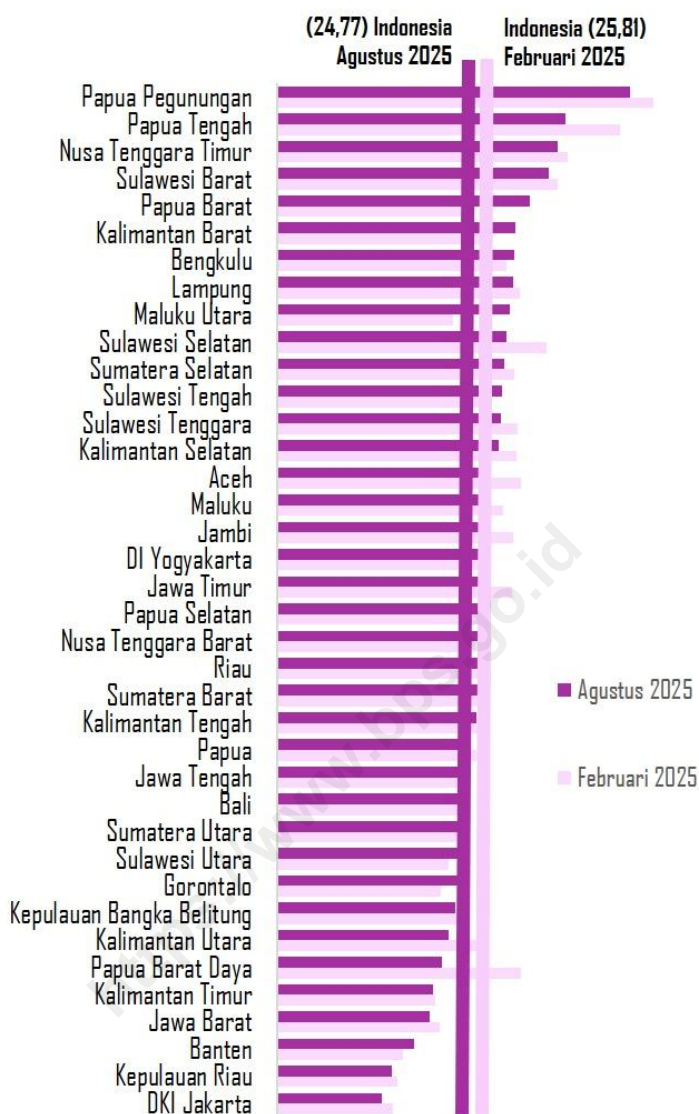
di kedua wilayah. Di perkotaan tercatat menurun sebesar 1,14 persen poin dan di perdesaan turun sebesar 0,63 persen poin.



Agustus 2025: Provinsi Papua Pegunungan merupakan provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu tertinggi.

Berdasarkan Gambar 17 dan Lampiran 13, tiga provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu tertinggi pada Agustus 2025 adalah Papua Pegunungan (45,22 persen), Papua Tengah (36,96 persen), dan Nusa Tenggara Timur (35,96 persen). Ketiga provinsi ini mencatat persentase pekerja paruh waktu yang jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional, yaitu sebesar 24,77 persen. Hal yang sama juga terlihat jika dibandingkan dengan Februari 2025, di mana tiga provinsi dengan jumlah pekerja paruh waktu terbanyak adalah Papua Pegunungan (48,33 persen), Papua Tengah (43,95 persen), dan Nusa Tenggara Timur (37,26 persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu di provinsi-provinsi tersebut secara konsisten tetap berada di atas rata-rata nasional.

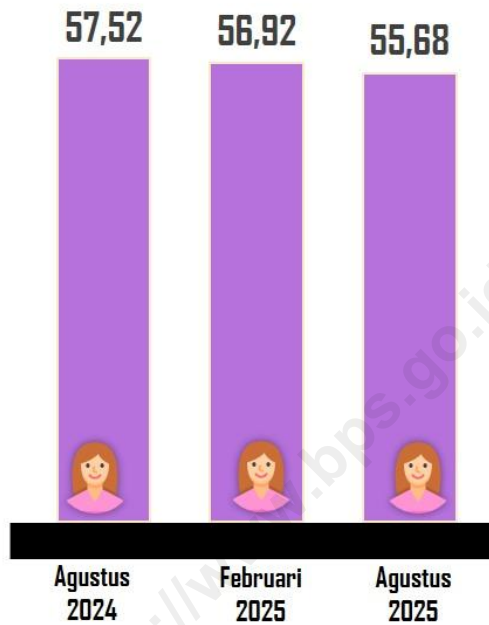
Pada Agustus 2025, tiga provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah adalah DKI Jakarta (13,34 persen), Kepulauan Riau (14,70 persen), dan Banten (17,59 persen). Sementara itu, pada Februari 2025, ketiga provinsi ini memiliki urutan provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah yang sama, yaitu DKI Jakarta (14,80 persen), Kepulauan Riau (15,37 persen), dan Banten (16,13 persen).



Gambar 17 Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari 2025 dan Agustus 2025

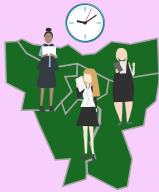


Terjadi penurunan kontribusi perempuan pada total pekerja paruh waktu selama setahun terakhir (Agustus 2024–Agustus 2025).



Gambar 18 Kontribusi Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), 2024 dan 2025

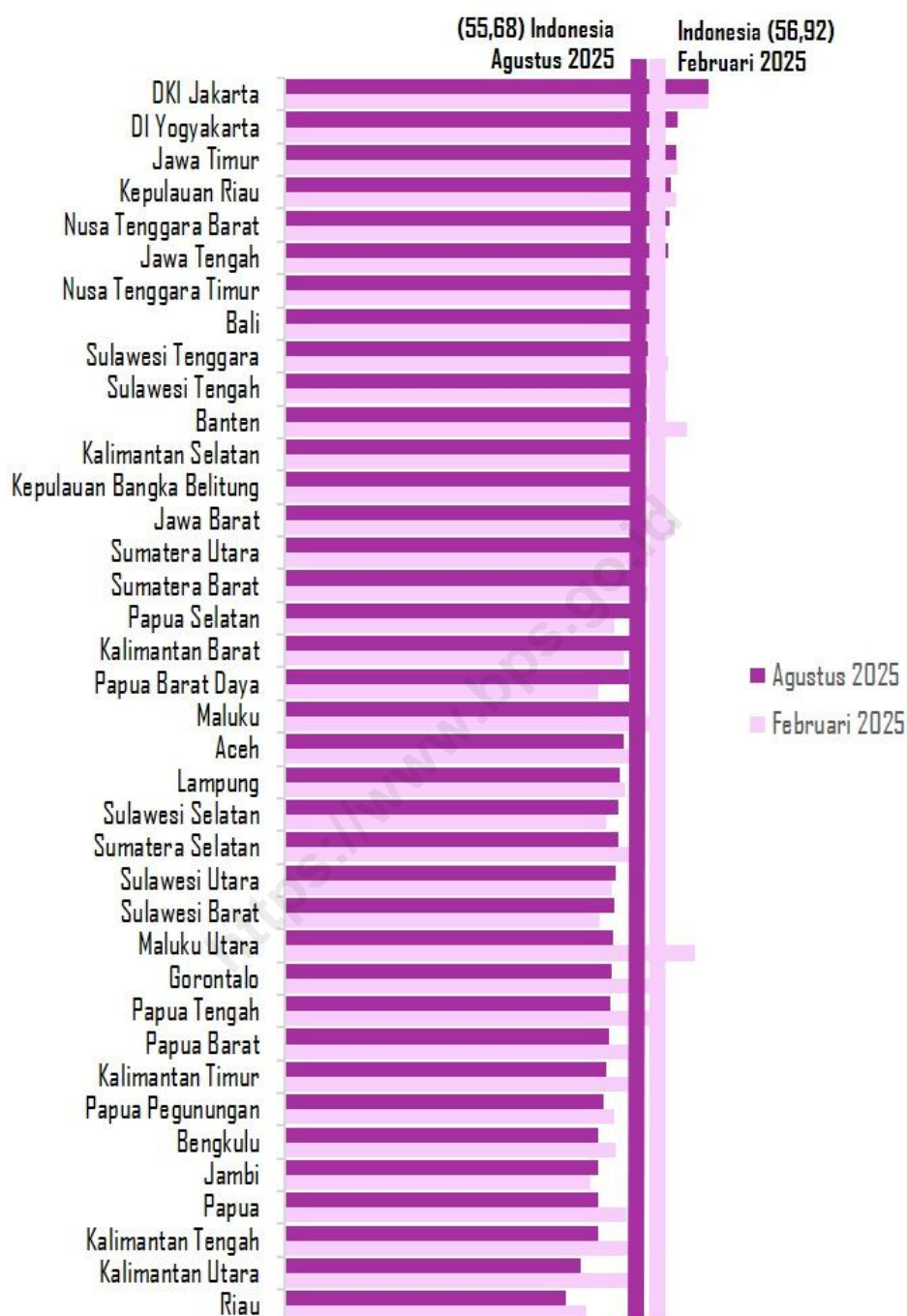
Kontribusi perempuan terhadap total pekerja paruh waktu diukur melalui proporsi perempuan yang termasuk dalam kategori pekerja paruh waktu dibandingkan dengan keseluruhan pekerja paruh waktu. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, kontribusi perempuan tercatat sebesar 55,68 persen. Artinya, dari setiap 100 pekerja paruh waktu, sekitar 56 di antaranya adalah perempuan. Kontribusi perempuan ini menunjukkan tren yang menurun, yaitu sebesar 57,52 persen pada Agustus 2024, kemudian turun menjadi 56,92 persen pada Februari 2025, lalu turun kembali menjadi 55,68 persen pada Agustus 2025.



Agustus 2025, provinsi dengan kontribusi perempuan terhadap pekerja paruh waktu tertinggi adalah DKI Jakarta.

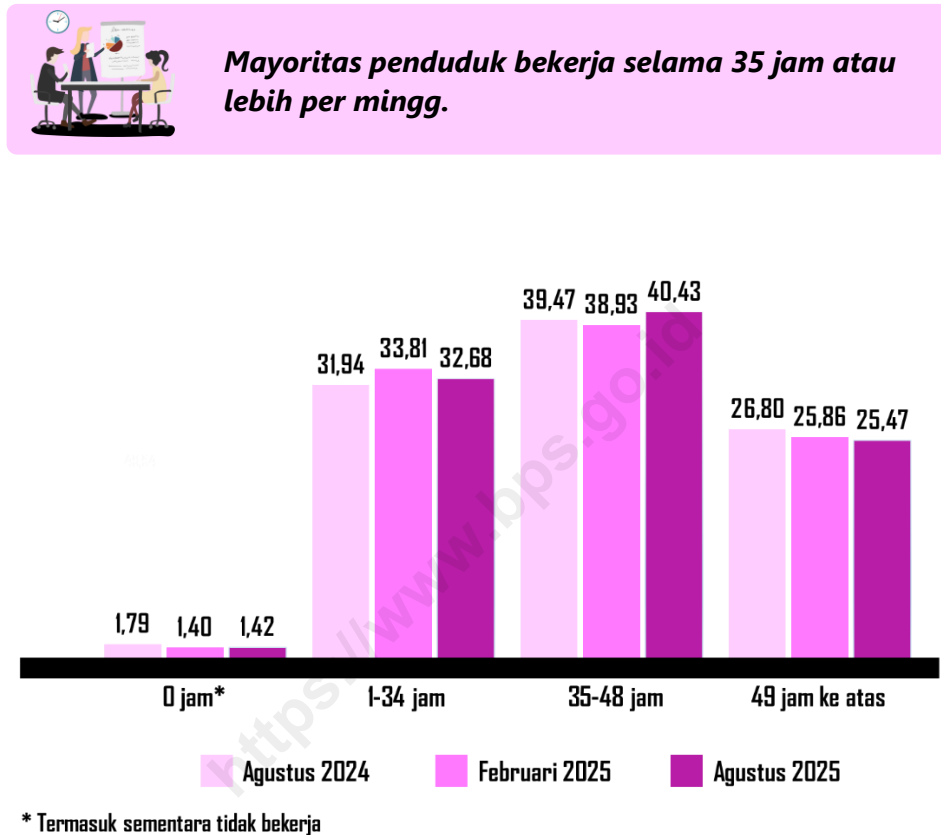
Berdasarkan data, provinsi dengan kontribusi perempuan terhadap pekerja paruh waktu tertinggi adalah DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 71,42 persen. Dua provinsi lainnya dengan kontribusi tertinggi adalah DI Yogyakarta (60,47 persen) dan Jawa Timur (60,26 persen). Sementara pada Februari 2025, provinsi dengan kontribusi perempuan terhadap pekerja paruh waktu tertinggi adalah DKI Jakarta (68,12 persen), Maluku Utara (63,14 persen) dan Banten (61,81 persen).

Secara keseluruhan, terdapat perubahan signifikan dalam urutan provinsi dengan kontribusi perempuan tertinggi dari Februari 2025 ke Agustus 2025. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kontribusi tertinggi pada satu tahun terakhir dari Agustus 2024-Agustus 2025, meningkat sebesar 3,30 persen poin dari Februari 2025. Sementara itu, provinsi Riau merupakan provinsi dengan kontribusi terendah pada satu tahun terakhir dari Agustus 2024-Agustus 2025, dengan penurunan sebesar 3,12 persen poin dari Februari 2025.



Gambar 19 Kontribusi Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), Februari 2025 dan Agustus 2025

2.7 KILM 7. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja



Gambar 20 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2024 dan 2025

Hasil Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja, yaitu sebesar 65,90 persen, memiliki jam kerja 35 jam atau lebih per minggu. Angka ini menunjukkan tren konsisten dengan dua periode sebelumnya, yaitu Februari 2025 dan Agustus 2024. Jika dibandingkan dengan Agustus 2024, terjadi penurunan sebesar 0,37 persen poin, namun mengalami peningkatan sebesar 1,11 persen poin dibanding Februari 2025. Kategori jam kerja 35 jam ke atas

ini lazim digunakan untuk mengidentifikasi pekerja dengan *full-time employment*, dan mencerminkan stabilitas struktur kerja dalam konteks nasional.

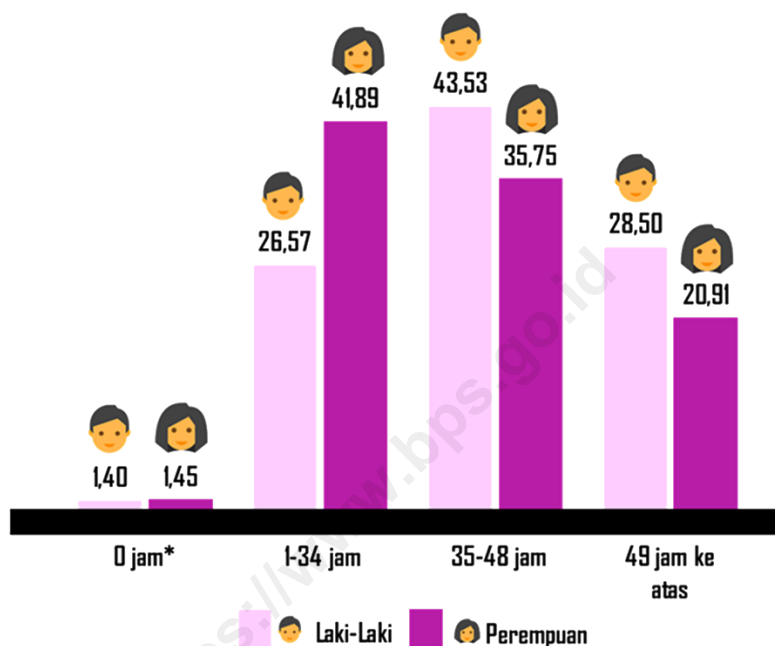
Namun demikian, terdapat pula proporsi signifikan penduduk yang bekerja dengan jam kerja sangat panjang, yakni 49 jam atau lebih per minggu, sebesar 25,47 persen. Berdasarkan KILM 7 dari ILO, kategori 49 jam ke atas tergolong dalam kelompok pekerja dengan waktu kerja berlebih (*excessive hours of work*), yang dapat berimplikasi pada isu ketenagakerjaan yang tidak layak, terutama apabila jam kerja yang panjang tidak disertai kompensasi memadai atau bersifat *involuntary* (ILO, 2008; ILO, 2018).

KILM menjelaskan bahwa jam kerja yang terlalu panjang dapat terjadi karena beberapa kondisi, seperti upah yang tidak memadai sehingga pekerja terpaksa menambah jam kerja, atau karena kewajiban pekerjaan yang tidak fleksibel. Kondisi ini dikenal juga sebagai *inadequate employment related to excessive hours* atau *over-employment*, yang menurut definisi ILO merupakan situasi ketika pekerja ingin atau mencoba bekerja lebih sedikit dengan pengurangan pendapatan yang sepadan, namun tidak dapat melakukannya (ILO, 1998).

Lebih lanjut, KILM juga menekankan bahwa pengukuran waktu kerja tidak hanya penting untuk memahami beban kerja individu, tetapi juga berpengaruh pada dimensi makroekonomi, seperti produktivitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja bagi perusahaan. Dalam banyak kasus, jam kerja yang terlalu panjang justru dapat berdampak negatif terhadap produktivitas, kesehatan pekerja, serta kualitas hubungan sosial di luar pekerjaan (Spurgeon, 2003; Messenger, 2004). Oleh karena itu, pemantauan tren jam kerja di berbagai kelompok penduduk bekerja menjadi penting sebagai bagian dari upaya menuju kondisi kerja yang layak (*decent work*), sebagaimana ditargetkan dalam SDGs 8.



Laki-laki cenderung lebih banyak bekerja dengan jam kerja berlebih (49 jam lebih per minggu) dibandingkan perempuan.



* Termasuk sementara tidak bekerja

Gambar 21 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2025

Data dari Gambar 21, pada Agustus 2025 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam hal jumlah jam kerja per minggu. Persentase penduduk laki-laki yang bekerja 35 jam atau lebih per minggu mencapai lebih dari 70 persen, yang mencakup 43,53 persen untuk kategori 35–48 jam dan 28,50 persen untuk kategori 49 jam ke atas. Sementara itu, hanya sekitar 56,66 persen perempuan yang bekerja dalam dua kategori tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa laki-laki lebih banyak bekerja dalam pola kerja

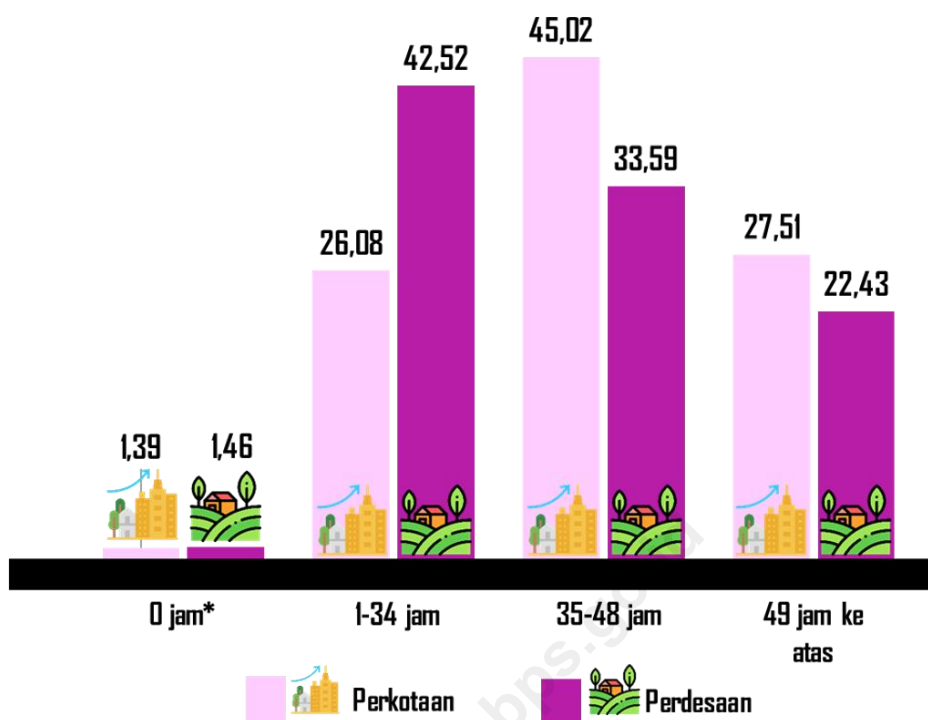
penyakit atau bahkan dalam kategori jam kerja berlebih, sedangkan perempuan cenderung lebih banyak ditemukan dalam kategori jam kerja pendek (1–34 jam per minggu).

Perempuan mendominasi pada kategori jam kerja 1–34 jam per minggu dengan persentase mencapai 41,89 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya sebesar 26,57 persen. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam distribusi beban kerja antara jenis kelamin, yang sangat mungkin dipengaruhi oleh peran domestik yang masih melekat kuat pada perempuan. Studi ILO (2007) menunjukkan bahwa beban ganda antara pekerjaan produktif dan kerja perawatan yang tidak dibayar cenderung membatasi jam kerja perempuan di pasar tenaga kerja formal.

Selain itu, persentase pekerja perempuan yang masuk dalam kategori jam kerja 49 jam ke atas per minggu lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu 20,91 persen berbanding 28,50 persen. Padahal, menurut definisi ILO dalam KILM 7, kelompok jam kerja 49 jam ke atas sudah masuk dalam kategori *excessive hours* dan dapat berimplikasi negatif terhadap kesehatan dan produktivitas. Walaupun lebih rendah, hal ini tidak serta-merta menunjukkan kondisi yang lebih baik bagi perempuan, karena sebagian besar perempuan justru berada pada pekerjaan dengan jam kerja pendek dan kondisi kerja yang tidak stabil, termasuk pekerjaan informal yang minim perlindungan.



Lebih dari seperempat penduduk perkotaan bekerja dengan jam kerja berlebih.



* Termasuk sementara tidak bekerja

Gambar 22 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2025

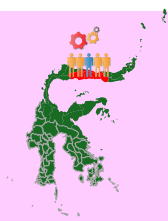
Distribusi jam kerja pada Agustus 2025 menurut wilayah tempat tinggal menunjukkan variasi struktural yang jelas antara perkotaan dan perdesaan. Dalam kategori jam kerja 35–48 jam per minggu, sebanyak 45,02 persen penduduk bekerja di perkotaan berada dalam rentang ini, lebih tinggi dibandingkan 33,59 persen di wilayah perdesaan. Jam kerja dalam rentang ini sesuai dengan apa yang dalam kerangka KILM 7 disebut sebagai *normal working hours*, yang sering digunakan sebagai *baseline* untuk menilai kestabilan keterlibatan dalam pekerjaan penuh waktu di banyak negara.

Namun, distribusi menjadi lebih kontras dalam kategori 49 jam ke atas per minggu. Sebanyak 27,51 persen penduduk perkotaan tercatat

bekerja dalam kategori *excessive working hours*, sedangkan di perdesaan sebesar 22,43 persen. Angka ini sering digunakan sebagai indikator tidak langsung untuk mendeteksi potensi *over-employment*, yaitu kondisi ketika pekerja ingin atau mencoba mengurangi jam kerja mereka namun tidak bisa melakukannya. Meski data ini tidak menyatakan keinginan tersebut secara eksplisit, proporsi tinggi dalam kategori ini tetap relevan untuk pemantauan kondisi kerja intensif (ILO, 2018).

Di sisi lain, wilayah perdesaan menunjukkan konsentrasi yang tinggi pada kategori jam kerja pendek, dengan persentase sebesar 42,52 persen, jauh di atas angka 26,08 persen di perkotaan. Meskipun *threshold* dan keinginan tidak dapat dievaluasi dari data ini saja, distribusi seperti ini memberi indikasi kuantitatif mengenai tingginya keterlibatan dalam pekerjaan dengan jam kerja rendah yang perlu perhatian dalam pengukuran ketenagakerjaan.

Selanjutnya, perbedaan antara wilayah dalam kategori jam kerja nol selama minggu referensi relatif tidak signifikan. Kategori ini, yang dalam KILM diartikan sebagai tidak adanya waktu kerja aktual karena alasan apa pun yang tidak termasuk dalam pengukuran *actual hours worked*. Persentase kategori ini kecil dan hampir setara yaitu 1,39 persen di perkotaan dan 1,46 persen di perdesaan, yang menunjukkan bahwa perbedaan utama dalam distribusi waktu kerja lebih terletak pada intensitas jam kerja, bukan partisipasi kerja secara keseluruhan.



Pada Agustus 2025, provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja berlebih paling tinggi berada di Provinsi Gorontalo.

Data Agustus 2025 menunjukkan variasi distribusi jam kerja yang tajam antarprovinsi di Indonesia. Secara nasional, proporsi terbesar penduduk bekerja berada pada kategori jam kerja 35–48 jam per minggu, yaitu 40,43 persen. Disusul oleh kategori 1–34 jam sebesar 32,68 persen,

dan kategori 49 jam ke atas sebesar 25,47 persen. Jam kerja nol, atau tidak bekerja selama minggu referensi, tercatat sebesar 1,42 persen.

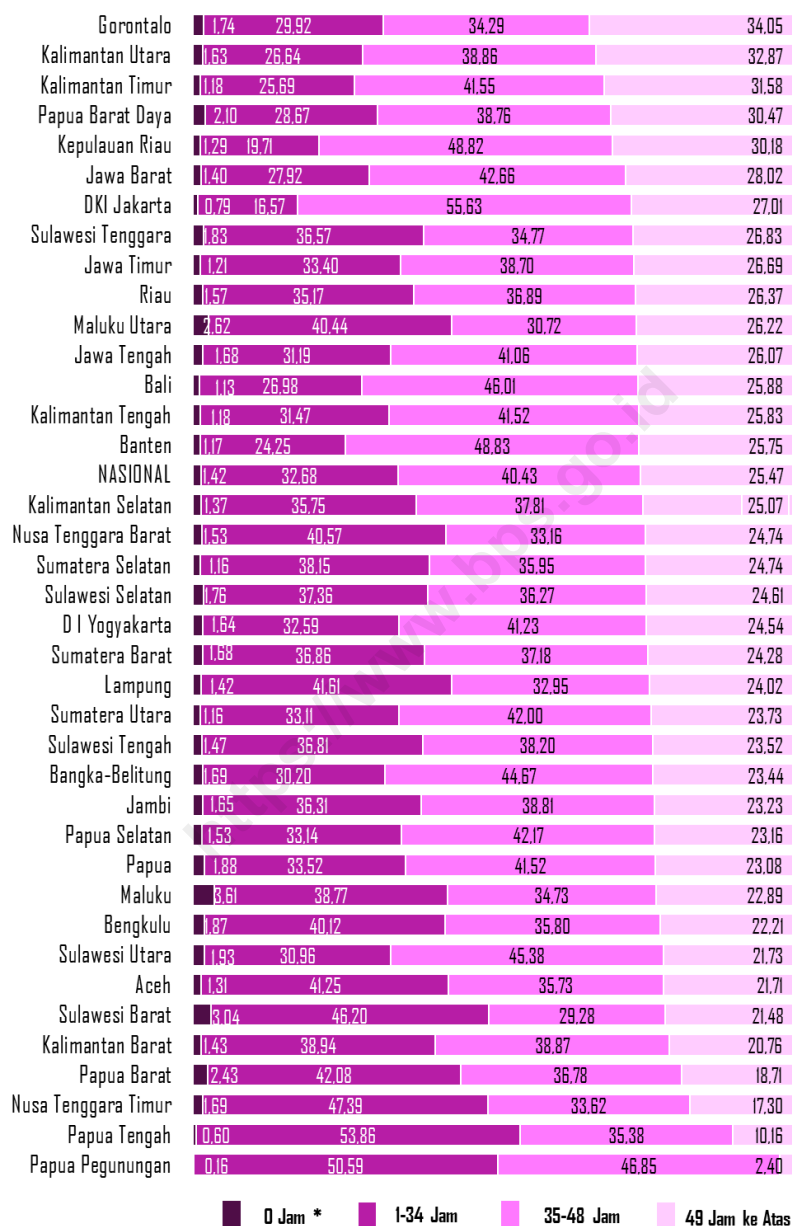
Tiga provinsi dengan dominasi penduduk bekerja dalam kategori jam kerja penuh waktu (35–48 jam) tertinggi adalah DKI Jakarta, Banten, dan Kepulauan Riau. DKI Jakarta mencatat proporsi tertinggi sebesar 55,63 persen, sementara Banten dan Kepulauan Riau masing-masing 48,83 persen dan 48,82 persen. Adapun provinsi Papua Pegunungan mencatat angka terendah dalam kategori jam kerja 0 jam, yaitu hanya sebesar 0,16 persen.

Sementara itu, Papua Tengah dan Papua Pegunungan memiliki proporsi tertinggi pada kategori jam kerja pendek 1 sampai 34 jam, masing-masing sebesar 53,86 persen dan 50,59 persen. Kelompok jam kerja panjang 49 jam ke atas di kedua provinsi tersebut sangat rendah, yaitu 2,40 persen di Papua Pegunungan dan 10,16 persen di Papua Tengah. Menurut KILM 7, kelompok jam kerja panjang digunakan untuk mengidentifikasi pekerja dengan waktu kerja berlebih (*excessive hours*), dan kelompok jam kerja pendek digunakan sebagai basis untuk mengamati potensi kekurangan jam kerja (*time-related underemployment*), terutama bila dikaitkan dengan keinginan untuk bekerja dengan jam kerja lebih lama.

Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan proporsi tertinggi pekerja dalam kategori jam kerja 49 jam ke atas, masing-masing sebesar 34,05 persen, 32,87 persen, dan 31,58 persen. Nilai ini secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dalam kerangka KILM 7, indikator ini penting untuk memantau dinamika beban kerja mingguan yang melebihi norma waktu kerja umum di banyak negara.

Di sisi lain, angka pekerja yang sementara tidak bekerja selama minggu referensi juga tercatat lebih tinggi dari rata-rata nasional di beberapa provinsi, seperti Maluku (3,61 persen), Sulawesi Barat (3,04 persen) dan Maluku Utara (2,62 persen). KILM 7 mencatat bahwa jam kerja nol biasanya mengindikasikan ketidakhadiran karena alasan yang

termasuk dalam definisi jam kerja aktual (*actual hours worked*), seperti cuti, gangguan cuaca, atau ketiadaan pekerjaan dalam periode referensi. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 23 dan Lampiran 15.



* Termasuk sementara tidak bekerja

**Gambar 23 Persentase Penduduk yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2025**

2.8 KILM 8. Penduduk Bekerja di Kegiatan Informal

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan utama. Penduduk bekerja di kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk penduduk bekerja di kegiatan informal.

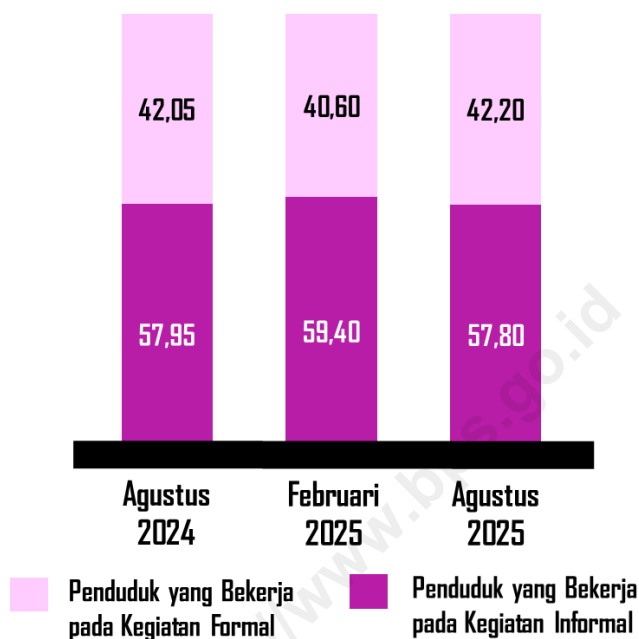


Mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di kegiatan informal yaitu sebesar 57,80 persen pada Agustus 2025.

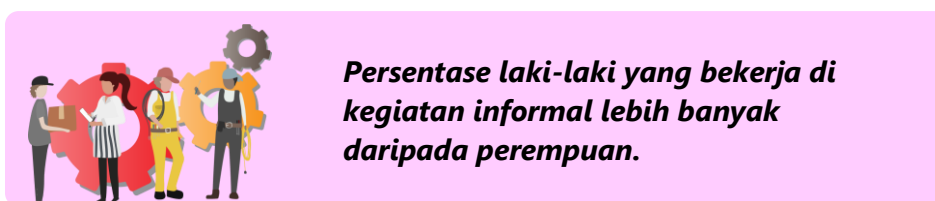
Data Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 57,80 persen dari total 146,54 juta penduduk bekerja berada dalam kegiatan informal. Angka ini setara dengan 84,70 juta orang, dan menunjukkan penurunan dibandingkan dua periode sebelumnya, yaitu Februari 2025 dan Agustus 2024. Dengan kata lain, mayoritas pekerja di Indonesia yang masih bergantung pada pekerjaan yang tidak berada dalam cakupan sistem perlindungan ketenagakerjaan nasional perlahan-lahan mulai berkurang. Sementara itu, proporsi pekerja di kegiatan formal tercatat sebesar 42,20 persen.

Tingginya angka pekerja pada pekerjaan informal ini memperlihatkan bahwa indikator seperti tingkat pengangguran atau jumlah jam kerja saja belum cukup untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja secara utuh. Seperti disebut dalam KILM 8, "*informal employment offers a necessary survival strategy*" terutama di negara-

negara yang belum memiliki sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Dalam konteks ini, pekerjaan informal menjadi strategi bertahan hidup bagi banyak kelompok, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan tetap.



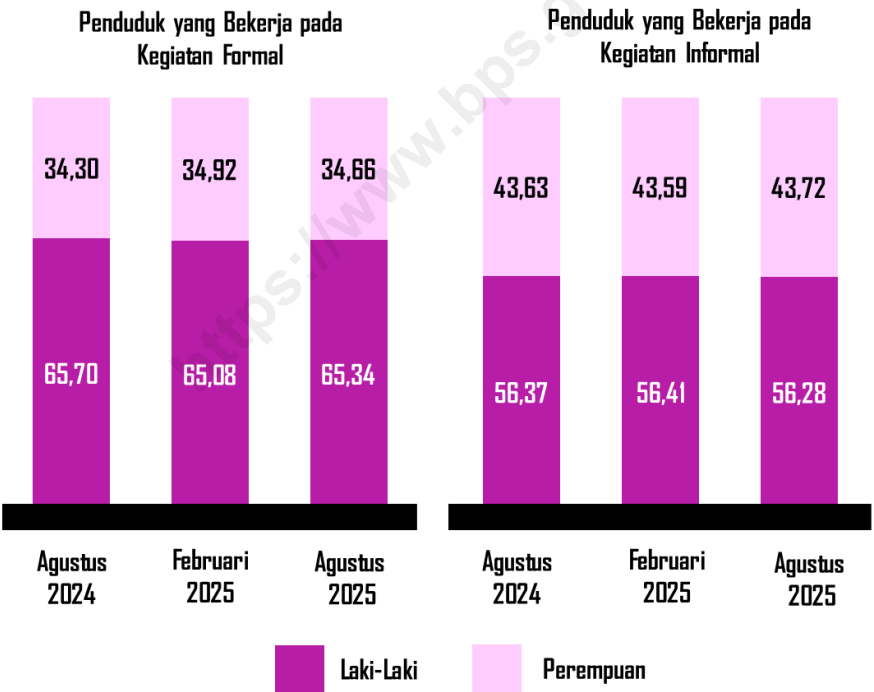
Gambar 24 Persentase Penduduk Bekerja pada Kegiatan Formal/Informal, 2024 dan 2025



Gambar 25 menunjukkan distribusi penduduk yang bekerja menurut status kegiatan (formal dan informal) serta jenis kelamin selama tiga periode, yakni Agustus 2024, Februari 2025, dan Agustus 2025. Secara konsisten, laki-laki mendominasi baik di kegiatan formal maupun informal, namun dengan pola yang berbeda dalam proporsi. Proporsi

penduduk bekerja laki-laki di kegiatan formal lebih tinggi daripada kegiatan informal, sedangkan pola sebaliknya terjadi pada perempuan. Pada Agustus 2025, pada kegiatan formal, sebanyak 65,34 persen penduduk bekerja adalah laki-laki, sementara perempuan hanya sekitar 34,66 persen. Di sisi lain, pada kegiatan informal, proporsi laki-laki tercatat sebesar 56,28 persen, sedangkan perempuan mencapai 43,72 persen.

Tingginya proporsi perempuan dalam kegiatan informal dapat dikaitkan dengan karakteristik pekerjaan informal yang lebih fleksibel secara waktu namun cenderung minim perlindungan. KILM 8 bahkan mencatat bahwa sektor informal sering kali menjadi "*fallback position*" bagi perempuan yang mengalami keterbatasan dalam mengakses pekerjaan formal karena hambatan struktural, kultural, atau tanggung jawab rumah tangga.



Gambar 25 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2024 dan 2025



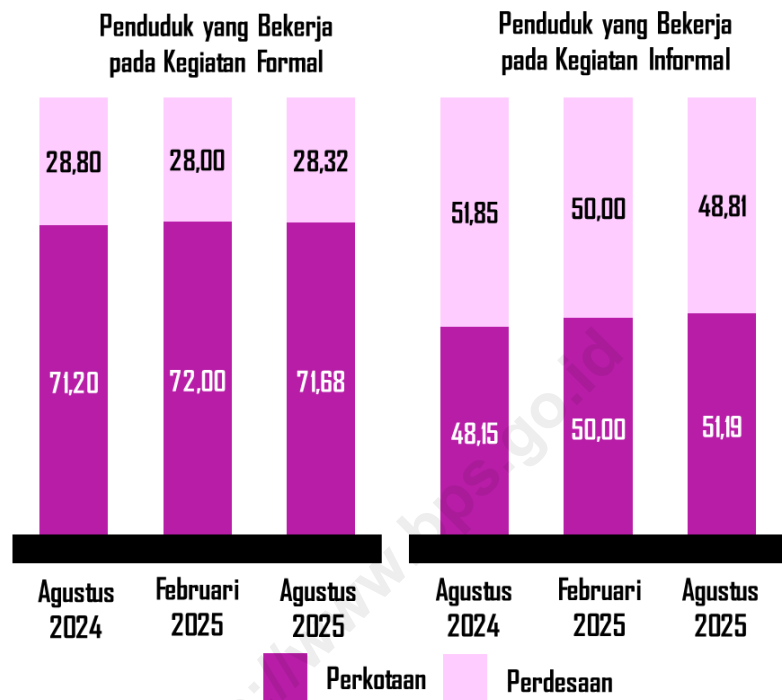
Pada Agustus 2025, penduduk bekerja di kegiatan informal sedikit lebih banyak tinggal di daerah perkotaan

Gambar 26 menunjukkan bahwa pada kelompok penduduk yang bekerja di kegiatan formal, mayoritas berasal dari wilayah perkotaan. Pada Agustus 2025, sebesar 71,68 persen penduduk bekerja di kegiatan formal tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan proporsi pekerja formal di perdesaan hanya sekitar 28,32 persen. Proporsi ini cenderung stabil pada periode 2024 dan 2025. Di sisi lain, gambaran ini mengindikasikan konsistensi dominasi wilayah perkotaan dalam menyediakan pekerjaan formal, yang biasanya dikaitkan dengan unit usaha terdaftar dan hubungan kerja yang terlindungi oleh sistem ketenagakerjaan formal sebagaimana didefinisikan dalam KILM 8 dan ICLS17.

Sementara itu, dalam kelompok penduduk yang bekerja pada kegiatan informal, proporsinya cenderung berimbang antara perkotaan dan perdesaan, dengan proporsi yang semakin menurun di perdesaan selama periode pengamatan. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja di kegiatan informal di perdesaan sebesar 51,85 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 48,15 persen. Namun, dalam dua periode berikutnya proporsinya terus menurun: pada Februari 2025 proporsi perdesaan menurun menjadi 50,00 persen, dan akhirnya mencapai 48,81 persen pada Agustus 2025. Sebaliknya, pada Agustus 2024, penduduk bekerja di kegiatan informal di perkotaan sebesar 48,15 persen, terus meningkat pada dua periode selanjutnya, yaitu menjadi 50,00 persen pada Februari 2025, dan akhirnya mencapai 51,19 persen pada Agustus 2025.

Fenomena ini mencerminkan bahwa pekerjaan informal tidak hanya terbatas di wilayah perdesaan, tetapi juga berkembang di wilayah perkotaan, sejalan dengan penekanan dalam KILM 8 bahwa "*the informal sector tends to absorb most of the expanding labour force in urban areas*", terutama dalam konteks urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Peningkatan informalitas di perkotaan juga dapat dikaitkan dengan

perubahan struktur produksi dan praktik subkontrak, yang mendorong unit usaha formal untuk menggunakan bentuk hubungan kerja non-standar, yang sering kali tidak tercakup dalam perlindungan ketenagakerjaan formal (Bacchetta et al., 2009).



Gambar 26 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Daerah Tempat Tinggal, 2024 dan 2025



Provinsi Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2025.

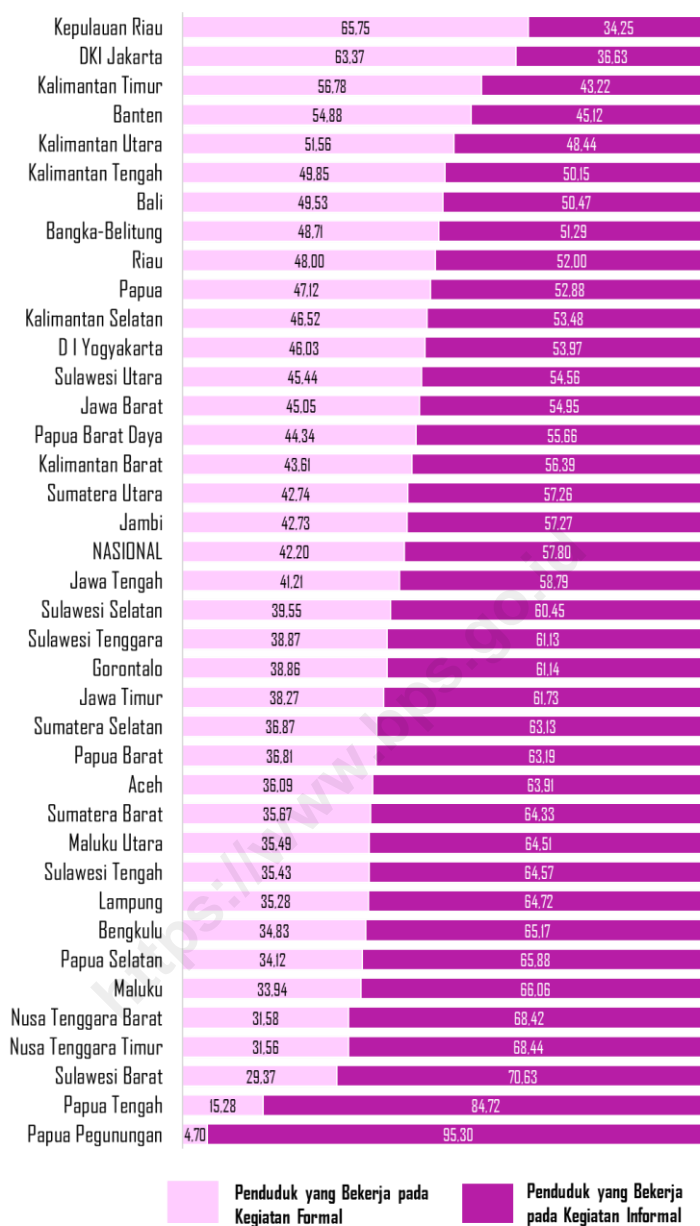
Gambar 27 menunjukkan bahwa persentase pekerjaan di kegiatan informal di Indonesia masih sangat tinggi dan menunjukkan variasi yang cukup mencolok antarprovinsi. Dari 38 provinsi yang tercatat, sebagian besar menunjukkan proporsi penduduk bekerja di kegiatan informal yang

melebihi 60 persen, menandakan dominasi kegiatan ekonomi di luar jangkauan sistem ketenagakerjaan formal.

Provinsi dengan persentase penduduk bekerja di kegiatan informal tertinggi tercatat di Papua Pegunungan (95,30 persen), Papua Tengah (84,72 persen), dan Sulawesi Barat (70,63 persen). Angka-angka ini jauh di atas rata-rata nasional dan mengindikasikan ketergantungan sangat tinggi terhadap kegiatan ekonomi nonformal di wilayah-wilayah tersebut. Beberapa provinsi lain dengan persentase penduduk bekerja di kegiatan informal di atas 65 persen antara lain Nusa Tenggara Timur (68,44 persen), Nusa Tenggara Barat (68,42 persen), Maluku (66,06 persen), Papua Selatan (65,88 persen) dan Bengkulu (65,17 persen). Hal ini memperkuat temuan ILO bahwa di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, pekerjaan informal sering kali berfungsi sebagai "*necessary survival strategy*", terutama ketika jaminan sosial, pendapatan minimum, atau perlindungan ketenagakerjaan belum merata.

Sebaliknya, provinsi-provinsi dengan persentase penduduk bekerja di kegiatan informal terendah ditemukan di wilayah yang secara ekonomi lebih maju dan urban, seperti Kepulauan Riau (34,25 persen), DKI Jakarta (36,63 persen), dan Kalimantan Timur (43,22 persen). Rendahnya angka ini sejalan dengan struktur ekonomi yang lebih terdiferensiasi dan dominasi sektor formal, termasuk industri dan jasa modern, serta cakupan regulasi ketenagakerjaan yang lebih kuat. Hal ini konsisten dengan catatan dalam KILM 8 bahwa ekspansi sektor formal dan sistem regulasi yang kuat dapat menekan prevalensi pekerjaan informal.

Di Pulau Jawa, variasi juga terlihat. Jawa Timur memiliki persentase penduduk bekerja di kegiatan informal sebesar 61,73 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Banten (45,12 persen), D.I. Yogyakarta (53,97 persen), atau Jawa Barat (54,95 persen). Sementara Jawa Tengah berada di angka menengah, yaitu 58,79 persen. Perbedaan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan struktur ekonomi lokal, karakteristik pasar kerja, serta kapasitas pelaksanaan regulasi dalam menginterpretasi angka informalitas.



Gambar 27 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Provinsi, Agustus 2025

BAB 3 INDIKATOR PENGANGGURAN

3.1 KILM 9. Pengangguran



Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia sebesar 4,85 persen pada Agustus 2025

Hasil Sakernas pada periode Agustus 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 4,85 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sekitar 15 orang penganggur. TPT Agustus 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan kondisi Februari 2025 sebesar 0,09 persen poin, namun mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Agustus 2023 yaitu sebesar 0,06 persen poin.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2024 dan 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	4,90	4,98	4,85
Perempuan	4,92	4,41	4,84
Perkotaan	5,79	5,73	5,75
Perdesaan	3,67	3,33	3,47
Total	4,91	4,76	4,85

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pada periode Februari dan Agustus 2025 TPT laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan. Sedangkan pada periode Agustus 2024, TPT perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada Agustus 2025, TPT laki-laki mencapai 4,85 persen, sedangkan TPT perempuan sebesar 4,84 persen. Adapun pada Februari 2025, TPT laki-laki sebesar 4,98 persen sedangkan TPT perempuan 4,41 persen. Jika dibandingkan Februari 2025, TPT laki-laki

pada Agustus 2025 mengalami penurunan sebesar 0,13 persen poin. Sedangkan TPT perempuan meningkat 0,43 persen poin. TPT sering berbeda menurut jenis kelamin karena perbedaan partisipasi di pasar tenaga kerja, segregasi pekerjaan, dan norma sosial (ILO, 2019).

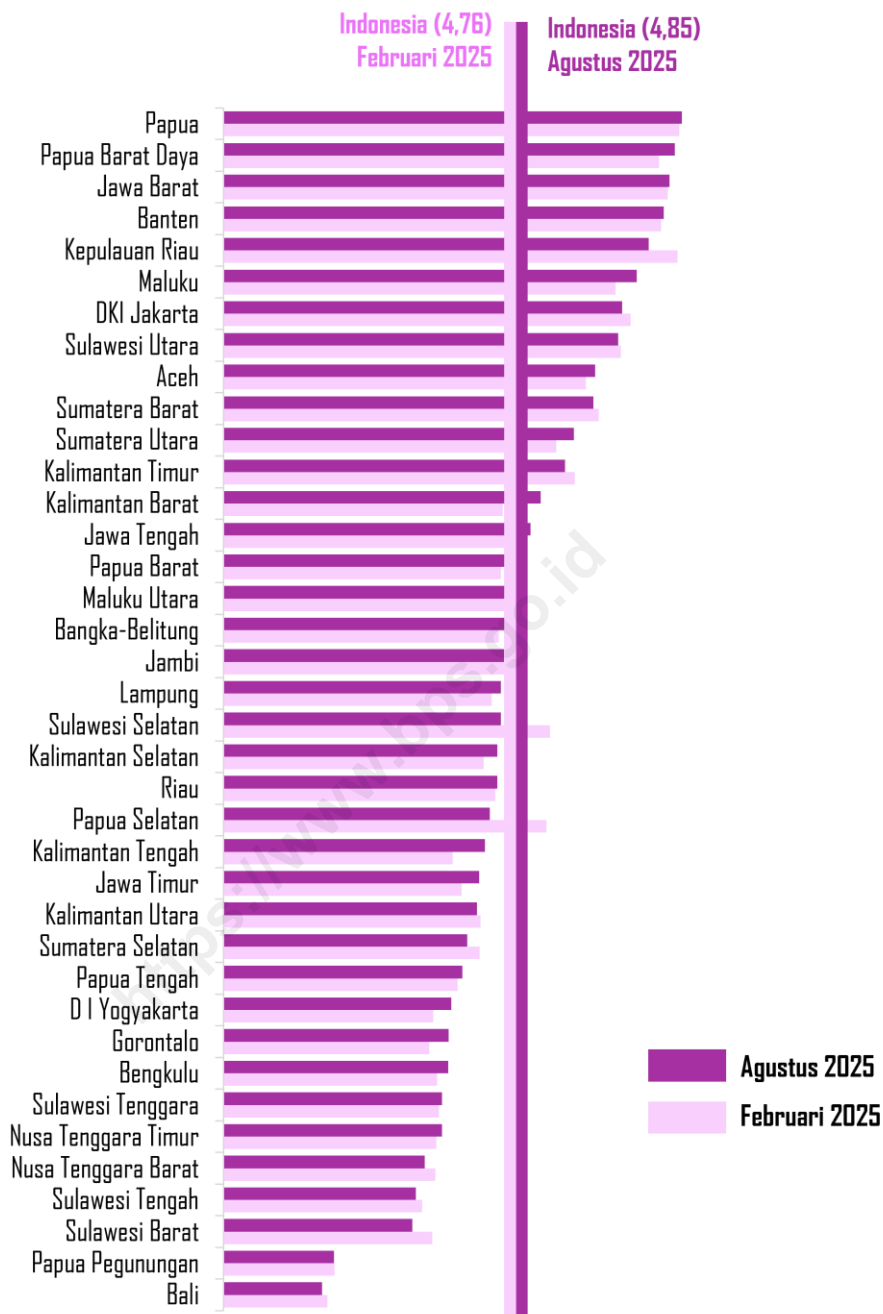
Mencermati TPT berdasarkan daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan. Pada Agustus 2025, TPT perkotaan mencapai 5,75 persen, sedangkan TPT perdesaan sebesar 3,47 persen. Apabila dibandingkan dengan Februari 2025, TPT perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,02 persen poin dan 0,14 persen poin.



Agustus 2025: TPT tertinggi terdapat pada Provinsi Papua, Papua Barat Daya, dan Jawa Barat

Hasil Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa TPT tertinggi menurut provinsi adalah Provinsi Papua (6,96 persen), Papua Barat Daya (6,85 persen) dan Jawa Barat (6,77 persen). Sementara pada Februari 2025 TPT tertinggi menurut provinsi adalah Provinsi Papua (6,92 persen), Kepulauan Riau (6,89 persen) dan Jawa Barat (6,74 persen).

Provinsi dengan TPT terendah pada Agustus 2025 terdapat pada Provinsi Bali (1,49 persen), Papua Pegunungan (1,68 persen), dan Sulawesi Barat (2,86 persen). Sementara pada Februari 2025 posisi ini urutannya adalah Provinsi Bali (1,58 persen), Papua Pegunungan (1,68 persen), dan Sulawesi Tengah (3,02 persen). Informasi ini dapat dilihat pada Gambar 28 dan Lampiran 17.



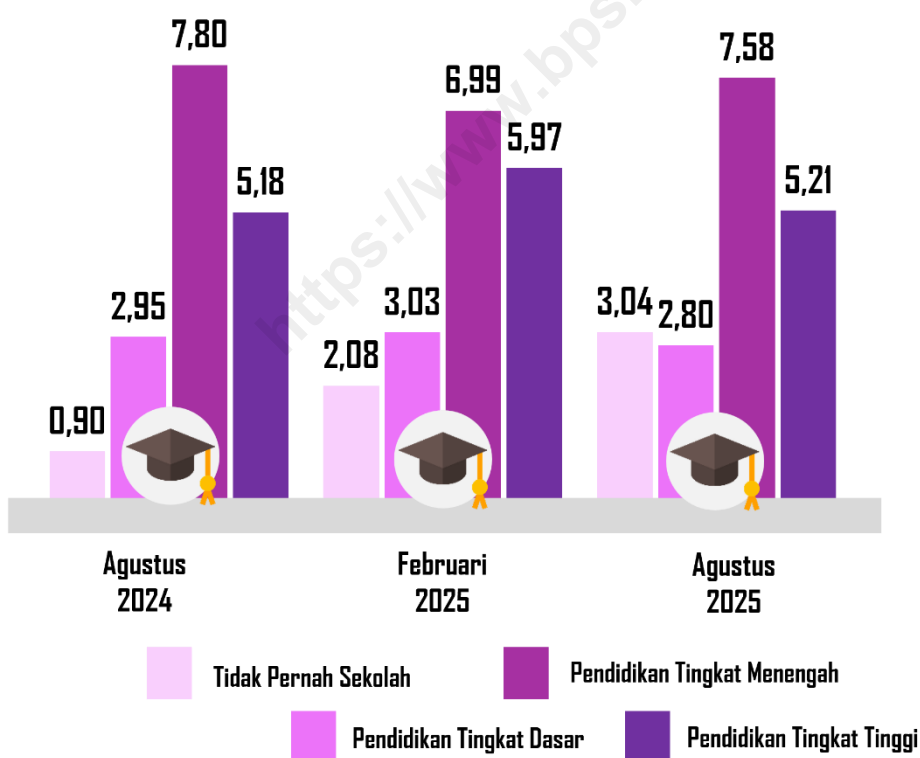
**Gambar 28 TPT Menurut Provinsi (persen),
Februari 2025 dan Agustus 2025**

Pengangguran dan Pendidikan



"TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan tingkat menengah"

Berdasarkan tingkat pendidikan, TPT tertinggi pada Agustus 2025 terdapat pada pendidikan tingkat menengah (SMA Umum dan Kejuruan) yaitu sebesar 7,58 persen. Pada kondisi ini, dapat dikatakan bahwa terdapat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada lulusan pendidikan tingkat menengah. Sementara mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Hal ini dapat dilihat dari TPT penduduk yang tidak pernah sekolah atau tidak pernah merasakan duduk dibangku sekolah yang relatif lebih rendah yaitu sebesar 3,04 persen.



Gambar 29 TPT Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2024 dan 2025



Februari 2025–Agustus 2025: Pada laki-laki terjadi penurunan TPT terbesar pada pendidikan tingkat tinggi

Dibandingkan dengan kondisi Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 menunjukkan pola perubahan yang bervariasi antarjenjang pendidikan. Pada tingkat pendidikan tidak pernah sekolah, TPT mengalami kenaikan dari 2,08 persen menjadi 3,04 persen (naik 0,96 persen poin). Kenaikan juga terjadi pada pendidikan menengah, dari 6,99 persen menjadi 7,58 persen (naik 0,59 persen poin). Sebaliknya, TPT menurun pada pendidikan dasar, dari 3,03 persen menjadi 2,80 persen (turun 0,23 persen poin), serta pada pendidikan tinggi yang turun dari 5,97 persen menjadi 5,21 persen (turun 0,76 persen poin).

Ditinjau menurut jenis kelamin, TPT laki-laki di Agustus 2025 meningkat pada kelompok tidak pernah sekolah, dari 2,19 persen menjadi 3,34 persen (naik 1,15 persen poin), serta pada pendidikan menengah yang naik dari 6,92 persen menjadi 7,19 persen (naik 0,27 persen poin). Sebaliknya, penurunan TPT laki-laki terjadi pada pendidikan dasar (dari 3,37 persen menjadi 2,99 persen) dan pendidikan tinggi (dari 6,15 persen menjadi 4,94 persen). Pada perempuan, kenaikan TPT terlihat pada pendidikan tidak pernah sekolah dari 1,98 persen menjadi 2,80 persen (naik 0,82 persen poin) serta pada pendidikan menengah yang naik dari 7,12 persen menjadi 8,31 persen (naik 1,19 persen poin). Penurunan terjadi pada pendidikan dasar (dari 2,53 persen menjadi 2,51 persen) serta pendidikan tinggi (dari 5,80 persen menjadi 5,46 persen).

**Tabel 5 Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2024 dan 2025**

Tingkat Pendidikan	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	0,90	2,08	3,04
Laki-Laki	1,13	2,19	3,34
Perempuan	0,72	1,98	2,80
Perkotaan	2,06	2,48	3,14
Perdesaan	0,56	1,98	3,00
Tingkat Dasar	2,95	3,03	2,80
Laki-Laki	3,10	3,37	2,99
Perempuan	2,72	2,53	2,51
Perkotaan	3,67	3,79	3,62
Perdesaan	2,29	2,26	1,98
Tingkat Menengah	7,80	6,99	7,58
Laki-Laki	7,41	6,92	7,19
Perempuan	8,55	7,12	8,31
Perkotaan	8,15	7,62	7,98
Perdesaan	7,06	5,61	6,68
Tingkat Tinggi	5,18	5,97	5,21
Laki-Laki	4,80	6,15	4,94
Perempuan	5,55	5,80	5,46
Perkotaan	5,46	6,35	5,54
Perdesaan	4,27	4,74	4,08
Indonesia	4,91	4,76	4,85

Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perkotaan pada Agustus 2025 mengalami kenaikan pada pendidikan tidak pernah sekolah dari 2,48 persen menjadi 3,14 persen (naik 0,66 persen poin) serta pada pendidikan menengah dari 7,62 persen menjadi 7,98 persen (naik 0,36 persen poin). Sebaliknya, TPT menurun pada pendidikan dasar (dari 3,79 persen menjadi 3,62 persen) dan pada pendidikan tinggi (dari 6,35 persen menjadi 5,54 persen). Pada perdesaan, TPT meningkat pada pendidikan tidak pernah sekolah dari 1,98 persen menjadi 3,00 persen (naik 1,02 persen poin) dan pada pendidikan menengah yang naik dari 5,61 persen menjadi 6,68 persen (naik 1,07 persen poin). Penurunan terjadi pada pendidikan dasar (dari 2,26 persen menjadi 1,98 persen, turun 0,28 persen poin) serta pendidikan tinggi (dari 4,74 persen menjadi 4,08 persen, turun 0,66 persen poin).



Pada periode Februari 2025 hingga Agustus 2025, persentase penganggur terbesar terdapat pada pendidikan tingkat menengah.

Jika mencermati distribusi penganggur menurut kategori pendidikan, terlihat bahwa lulusan pendidikan tingkat menengah tetap mendominasi jumlah pengangguran. Kondisi ini konsisten pada Agustus 2024, Februari 2025, hingga Agustus 2025. Pada Agustus 2024 persentase penganggur berpendidikan menengah sebesar 55,37 persen, menurun pada Februari 2025 menjadi 50,39 persen, dan kembali meningkat menjadi 56,52 persen pada Agustus 2025. Komposisi terbesar berikutnya adalah lulusan pendidikan tingkat dasar, kemudian tingkat tinggi, dan yang paling kecil adalah kategori tidak pernah sekolah.

Selama periode Februari 2025–Agustus 2025, terjadi peningkatan persentase penganggur berpendidikan menengah sebesar 6,13 persen poin. Sebaliknya, penganggur pada kategori pendidikan lainnya mengalami penurunan. Peningkatan terjadi pada kategori tidak pernah sekolah, dari 0,65 persen menjadi 0,55 persen (turun 0,10 persen poin—*penurunan kecil*), pada kategori pendidikan tingkat dasar mengalami

penurunan sebesar 3,79 persen poin, dan pendidikan tinggi turun sebesar 2,24 persen poin.

Dibandingkan Agustus 2024, komposisi penganggur pada Agustus 2025 menunjukkan kenaikan pada pendidikan menengah dan tinggi, masing-masing sebesar 1,15 persen poin dan 0,51 persen poin. Persentase penganggur pada kategori tidak pernah sekolah juga meningkat sebesar 0,38 persen poin. Sebaliknya, penganggur berpendidikan tingkat dasar mengalami penurunan sebesar 2,04 persen poin.



Agustus 2025: Persentase penganggur berpendidikan tingkat dasar dan menengah pada laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan

Merujuk pada Tabel 6, kondisi Agustus 2025 menunjukkan bahwa penganggur perempuan memiliki persentase lebih tinggi dibanding laki-laki pada jenjang pendidikan tidak pernah sekolah (0,71 persen berbanding 0,45 persen) dan pendidikan tinggi (19,03 persen berbanding 10,80 persen). Sebaliknya, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, persentase penganggur laki-laki lebih besar daripada perempuan, masing-masing 30,59 persen berbanding 26,21 persen serta 58,16 persen berbanding 54,05 persen.

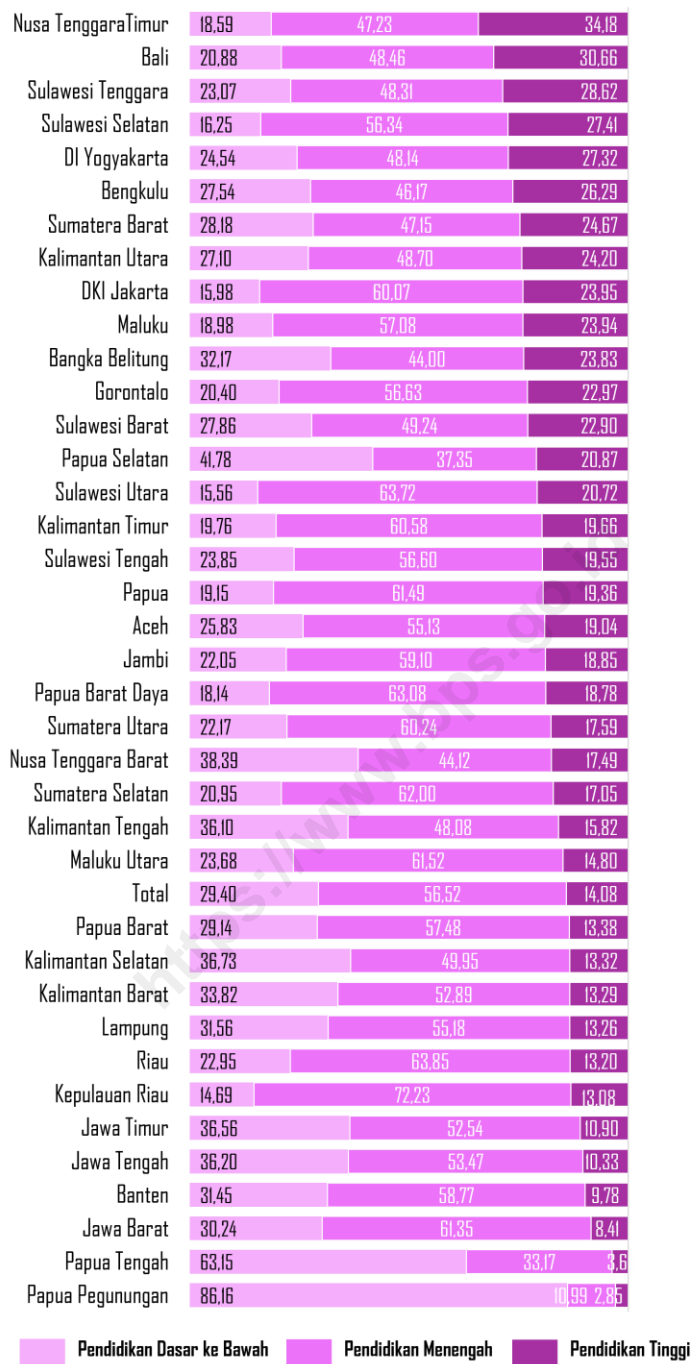
Dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk perdesaan yang menganggur dengan pendidikan tidak pernah sekolah dan tingkat dasar memiliki persentase lebih tinggi dibanding penduduk perkotaan pada jenjang yang sama. Pada Agustus 2025, penganggur perdesaan pada dua jenjang tersebut masing-masing mencapai 1,47 persen dan 36,00 persen, lebih tinggi dibanding perkotaan yang sebesar 0,19 persen dan 26,02 persen.

Sebaliknya, pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, penganggur perkotaan memiliki proporsi lebih besar daripada perdesaan. Pada Agustus 2025, persentase penganggur pendidikan menengah di perkotaan sebesar 57,66 persen, lebih tinggi dari perdesaan yang sebesar

53,64 persen. Pola serupa terjadi pada pendidikan tinggi, yaitu 16,13 persen di perkotaan dibanding 8,89 persen di perdesaan.

**Tabel 6 Distribusi Penganggur
Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2024 dan 2025**

Tingkat Pendidikan	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	0,17	0,65	0,55
Laki-Laki	0,16	0,52	0,45
Perempuan	0,19	0,88	0,71
Perkotaan	0,13	0,21	0,19
Perdesaan	0,26	1,77	1,47
Tingkat Dasar	30,89	32,64	28,85
Laki-Laki	32,21	34,27	30,59
Perempuan	28,90	29,87	26,21
Perkotaan	26,68	28,67	26,02
Perdesaan	40,21	42,70	36,00
Tingkat Menengah	55,37	50,39	56,52
Laki-Laki	57,28	52,05	58,16
Perempuan	52,47	47,57	54,05
Perkotaan	57,30	52,65	57,66
Perdesaan	51,09	44,67	53,64
Tingkat Tinggi	13,57	16,32	14,08
Laki-Laki	10,35	13,16	10,80
Perempuan	18,44	21,69	19,03
Perkotaan	15,89	18,47	16,13
Perdesaan	8,44	10,87	8,89



Gambar 30 Distribusi Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi (persen), Agustus 2025



Agustus 2025: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali dan Sulawesi Tenggara adalah tiga provinsi dengan persentase penganggur berpendidikan tinggi paling tinggi.

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 30 dan Lampiran 19, provinsi dengan persentase penganggur berpendidikan tinggi paling banyak pada Agustus 2025 adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (34,18 persen), Bali (30,66 persen), dan Sulawesi Tenggara (28,62 persen). Sebaliknya, tiga provinsi dengan persentase penganggur berpendidikan tinggi paling sedikit secara berturut-turut yaitu Provinsi Papua Pegunungan (2,85 persen), Papua Tengah (3,68 persen), dan Jawa Barat (8,41 persen).

Sementara itu, tiga provinsi dengan persentase penganggur berpendidikan menengah paling banyak pada Agustus 2025 secara berturut-turut yaitu Provinsi Kepulauan Riau (72,23 persen), Riau (63,85 persen), dan Sulawesi Utara (63,72 persen). Persentase penganggur berpendidikan menengah paling sedikit berada pada Provinsi Papua Pegunungan (10,99 persen), Papua Tengah (33,17 persen) dan Papua Selatan (37,35 persen).

Tiga provinsi dengan persentase paling banyak penganggur berpendidikan dasar ke bawah pada Agustus 2025 yaitu Provinsi Papua Pegunungan (86,16 persen), Papua Tengah (63,15 persen), dan Papua Selatan (41,78 persen). Sebaliknya, persentase penganggur paling sedikit pada kategori yang sama berada pada Provinsi Kepulauan Riau (14,69 persen), Sulawesi Utara (15,56 persen), dan DKI Jakarta (15,98 persen).

3.2 KILM 10. Pengangguran Pada Kelompok Umur Muda

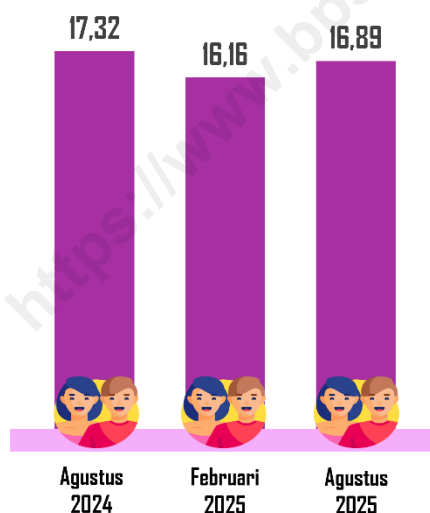
Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan

dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" atau "kaum muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran kaum muda;
2. Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
3. *Share* pengangguran kaum muda terhadap total penganggur; dan
4. Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.



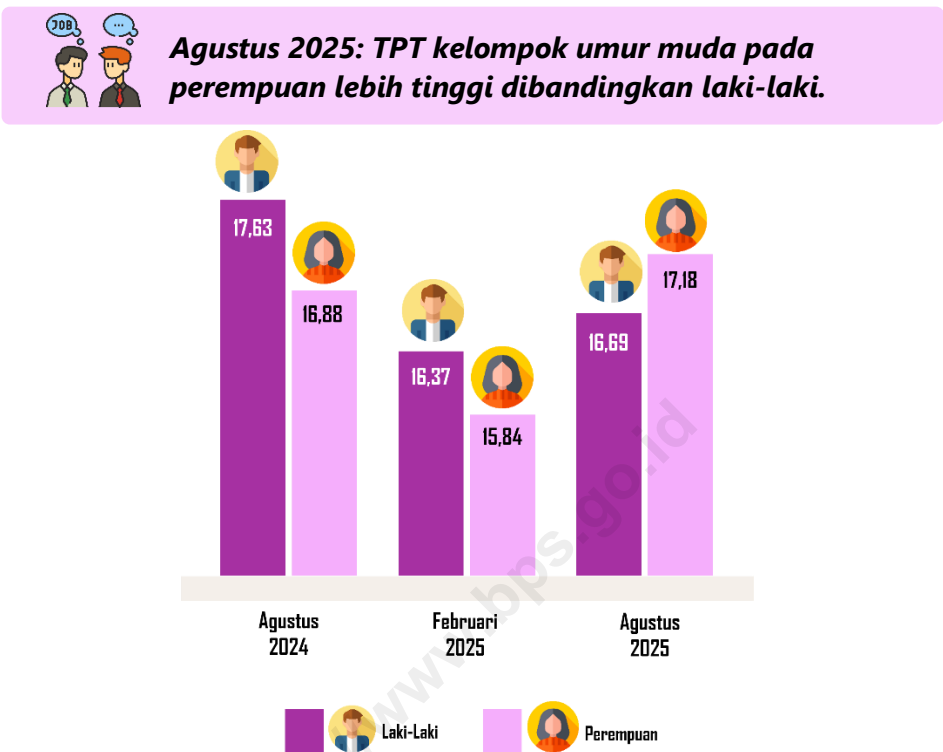
TPT kelompok umur muda pada Agustus 2025 mengalami peningkatan dibanding Februari 2025



Gambar 31 TPT Penduduk Umur Muda (persen), 2024 dan 2025

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, TPT penduduk kelompok umur muda mencapai 16,89 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 17 orang yang menganggur. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2025 yaitu

sebesar 0,73 persen poin dan mengalami penurunan sebesar 0,43 persen poin jika dibandingkan kondisi Agustus 2024 (Gambar 31).

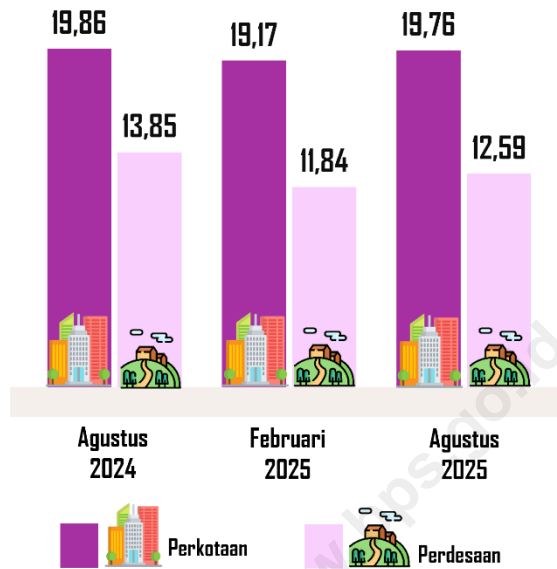


Gambar 32 TPT Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin (persen), 2024 dan 2025

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2025 TPT penduduk umur muda perempuan mencapai 17,18 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang sebesar 16,69 persen. Pola ini berbeda dengan kondisi Februari 2025, ketika TPT laki-laki (16,37 persen) masih sedikit lebih tinggi dibanding perempuan (15,84 persen). Sementara itu, pada Agustus 2024, TPT penduduk umur muda laki-laki (17,63 persen), juga lebih tinggi dibanding perempuan (16,88).



TPT kelompok umur muda lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan



Gambar 33 TPT Penduduk Umur Muda Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025

Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, terlihat bahwa TPT kelompok umur muda di daerah perkotaan tetap lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Pada Agustus 2025, TPT penduduk umur muda di perkotaan tercatat sebesar 19,76 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 12,59 persen. Dengan demikian, dari 100 penduduk usia 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 20 orang yang menganggur di perkotaan dan sekitar 13 orang yang menganggur di perdesaan.

Dibandingkan dengan kondisi Februari 2025, TPT umur muda pada Agustus 2025 mengalami peningkatan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Agustus 2024, TPT di perkotaan menunjukkan penurunan tipis dari 19,86 persen menjadi 19,76

persen, sedangkan TPT di perdesaan juga tercatat lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 13,85 persen menjadi 12,59 persen.



Agustus 2025: TPT kelompok umur muda sekitar enam kali lipat lebih tinggi dibandingkan TPT dewasa.

Pada Agustus 2025, rasio TPT umur muda terhadap TPT umur dewasa tercatat sebesar 6,13. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran penduduk usia muda masih sekitar enam kali lebih tinggi dibandingkan penduduk usia dewasa. Dibandingkan Februari 2025, nilai rasio tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,45 poin dari nilai rasio 5,68 menjadi 6,13.

Menurut jenis kelamin, rasio TPT umur muda terhadap umur dewasa pada Agustus 2025 tercatat lebih tinggi pada perempuan, yaitu sebesar 6,52, dibandingkan laki-laki yang sebesar 5,89. Pola ini sejalan dengan kondisi Februari 2025 ketika rasio perempuan juga lebih tinggi, namun berbeda dengan kondisi Agustus 2024 di mana rasio laki-laki masih lebih besar dibanding perempuan.

Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio TPT umur muda terhadap umur dewasa pada Agustus 2025 tetap lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan. Pada Agustus 2025, rasio di perdesaan mencapai 6,77, sedangkan di perkotaan sebesar 5,91. Pola ini konsisten dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 7 Rasio TPT Umur Muda Terhadap TPT Umur Dewasa di Indonesia, 2024 dan 2025

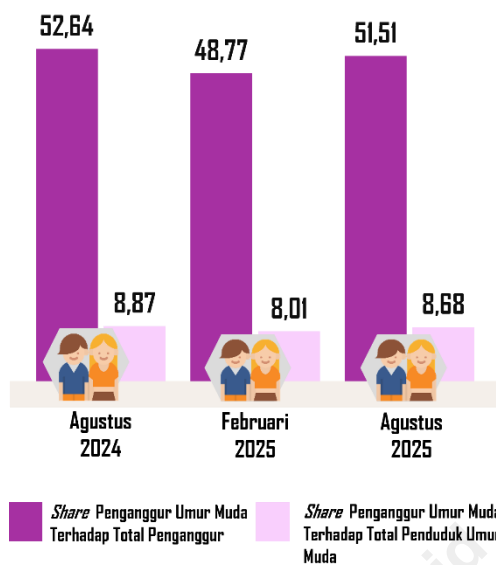
Rasio TPT Umur Muda Terhadap TPT Umur Dewasa	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	6,46	5,28	5,89
Perempuan	6,17	6,45	6,52
Perkotaan	5,93	5,48	5,91
Perdesaan	7,45	6,32	6,77
Indonesia	6,34	5,68	6,13



Agustus 2025: share penganggur umur muda terhadap total penganggur sebesar 51,51 persen, sedangkan share penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda sebesar 8,68 persen.

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur pada Agustus 2025 tercatat sebesar 51,51 persen. Artinya, dari 100 orang penganggur, terdapat sekitar 52 orang yang berumur 15–24 tahun. Pangsa ini meningkat dibandingkan Februari 2025 yang tercatat sebesar 48,77 persen, namun masih lebih rendah dibandingkan kondisi Agustus 2024.

Sementara itu, share penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Agustus 2025 mencapai 8,68 persen. Dengan demikian, dari setiap 100 penduduk berumur 15–24 tahun, terdapat sekitar 9 orang yang berstatus penganggur. Angka ini juga mengalami peningkatan sebesar 0,67 persen poin dibandingkan Februari 2025, namun sedikit lebih mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin dibandingkan capaian pada Agustus 2024.



Gambar 34 *Share Penganggur Umur Muda (persen), 2024 dan 2025*

3.3 KILM 12. Setengah Pengangguran (*Underemployment*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan tambahan/lain.



Jumlah setengah pengangguran Agustus 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Agustus 2024, tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Februari 2025.

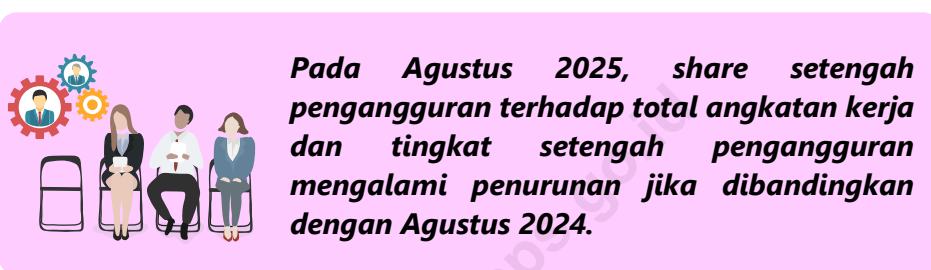
Tabel 8 Penduduk Bekerja yang Termasuk Setengah Penganggur Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (juta), 2024 dan 2025

Setengah Penganggur	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	7,22	7,31	7,31
Perempuan	4,34	4,36	4,29
Perkotaan	5,10	5,56	5,59
Perdesaan	6,46	6,11	6,01
Indonesia	11,56	11,67	11,60

Jumlah setengah pengangguran di Indonesia berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025 sebanyak 11,60 juta orang, yang terdiri dari 7,31 juta orang laki-laki dan 4,29 juta orang perempuan. Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah setengah pengangguran di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada Agustus 2025, jumlah setengah pengangguran di daerah perdesaan sebanyak 6,01 juta orang, sementara di perkotaan sebanyak 5,59 juta orang.

Apabila dibandingkan dengan kondisi setahun terakhir, yaitu Agustus 2024, secara nasional terjadi peningkatan jumlah setengah pengangguran sebanyak 0,04 juta orang. Peningkatan ini terutama terjadi di perkotaan sebesar 0,49 juta orang, sedangkan di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,45 juta orang. Jika ditinjau menurut jenis kelamin pada periode yang sama, jumlah setengah pengangguran mengalami peningkatan pada laki-laki sebesar 0,09 juta orang, sedangkan pada perempuan mengalami penurunan sebesar 0,05 juta orang. Hal ini menunjukkan adanya dinamika ketenagakerjaan yang berbeda antara wilayah dan jenis kelamin.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2025, secara nasional terjadi penurunan jumlah setengah pengangguran sebanyak 0,07 juta orang. Penurunan jumlah setengah pengangguran tersebut terjadi di perdesaan, dengan penurunan sebesar 0,10 juta orang. Sebaliknya di perkotaan jumlah setengah pengangguran mengalami kenaikan sebesar 0,03 juta orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah setengah pengangguran laki-laki terlihat tidak mengalami perubahan tetapi jumlah setengah pengangguran perempuan mengalami penurunan sebesar 0,07 juta orang selama pada periode yang sama.



Tingkat setengah pengangguran merupakan proporsi jumlah setengah penganggur terhadap total penduduk yang bekerja. Selain itu indikator lain yang bisa dilihat dari setengah penganggur adalah *share* setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja.

Share setengah pengangguran pada Agustus 2025 sebesar 7,53 persen (Tabel 9), yang berarti dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat sekitar delapan orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan lain.

Perkembangan dari *share* setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja selama periode Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025 cenderung fluktuatif. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 9, *share* setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja dari sebesar 7,60 persen pada Agustus 2024, naik menjadi 7,62 persen pada Februari 2025, kemudian turun menjadi sebesar 7,53 persen pada Agustus 2025.

Tabel 9 Indikator Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025

Setengah Penganggur	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Share Setengah			
Pengangguran Terhadap Total Angkatan Kerja			
Laki-Laki	7,87	7,95	7,90
Perempuan	7,19	7,14	6,98
Perkotaan	5,74	6,10	6,00
Perdesaan	10,21	9,87	9,86
Tingkat Setengah Pengangguran	7,99	8,00	7,91
Laki-Laki	8,28	8,36	8,30
Perempuan	7,57	7,47	7,33
Perkotaan	6,09	6,47	6,37
Perdesaan	10,60	10,20	10,22

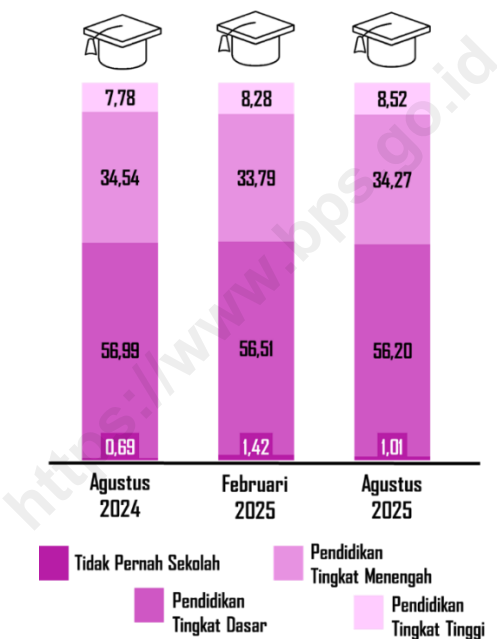
Tingkat setengah pengangguran juga memiliki pola yang sama dengan *share* setengah pengangguran. Pada Agustus 2024, dari total penduduk bekerja sekitar 7,99 persen diantaranya merupakan setengah penganggur. Kemudian pada Februari 2025 naik menjadi sebesar 8,00 persen, dan menurun menjadi sebesar 7,91 persen pada Agustus 2025.

Pola tingkat setengah pengangguran menurut jenis kelamin berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2024, tingkat setengah pengangguran laki-laki mengalami peningkatan sedangkan perempuan mengalami penurunan. Sebagai gambaran, jika dibandingkan dengan Agustus 2024 laki-laki naik sebesar 0,02 persen poin sedangkan perempuan turun sebesar 0,24 persen poin.

Pola tingkat setengah pengangguran menurut daerah tempat tinggal juga memiliki pola yang berbeda dengan nasional. Berdasarkan

klasifikasi daerah tempat tinggal, tingkat setengah pengangguran di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,28 persen poin, sebaliknya terjadi penurunan sebesar 0,38 persen poin di perdesaan jika dibandingkan dengan Agustus 2024.

 Selama setahun terakhir, persentase setengah pengangguran pada pendidikan tingkat dasar dan menengah mengalami penurunan, sementara itu persentase setengah pengangguran yang tidak pernah bersekolah dan pendidikan tingkat tinggi mengalami peningkatan.



Gambar 35 Distribusi Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2024 dan 2025

Apabila ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, persentase setengah pengangguran masih didominasi oleh mereka dengan tingkat pendidikan dasar. Sebagai gambaran, pada Agustus 2025 angka ini mencapai 56,20 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang setengah penganggur sekitar 56 orang diantaranya memiliki pendidikan pada tingkat dasar.

Pada Agustus 2025, persentase setengah pengangguran pada mereka dengan tingkat pendidikan dasar dan pendidikan tingkat menengah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2024. Sedangkan persentase setengah pengangguran pada mereka yang tidak pernah sekolah dan tingkat pendidikan tinggi mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 0,32 persen poin dan 0,74 persen poin.

Apabila dibandingkan dengan Februari 2025, peningkatan persentase setengah pengangguran terdapat pada tingkat pendidikan menengah dan tingkat pendidikan tinggi dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,48 persen poin dan 0,24 persen poin. Sedangkan persentase setengah pengangguran pada mereka yang tidak pernah sekolah dan pendidikan tingkat dasar mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,41 persen poin dan 0,31 persen poin (Gambar 35).



“Selama periode Agustus 2024–Agustus 2025, persentase setengah pengangguran yang tidak pernah sekolah dan pendidikan tinggi pada perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki.”

Apabila diamati lebih lanjut berdasarkan jenis kelamin (Tabel 10), kondisi Agustus 2025 menunjukkan bahwa perbandingan persentase setengah pengangguran pada perempuan yang tidak pernah sekolah dan pendidikan tinggi lebih dominan dibanding laki-laki. Sementara pada pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah, persentase setengah pengangguran pada laki-laki lebih dominan dibanding pada perempuan.

Ditinjau berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, persentase setengah pengangguran pada mereka yang tidak pernah bersekolah dan pendidikan tingkat dasar selalu lebih tinggi di perdesaan baik pada Agustus 2024, Februari 2025 maupun Agustus 2025. Sementara pada pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi, persentase setengah

pengangguran di perkotaan selalu lebih tinggi dibanding daerah perdesaan.

Apabila dibandingkan dengan Agustus 2024, penurunan persentase terbesar menurut jenis kelamin terdapat pada setengah penganggur perempuan dengan tingkat pendidikan dasar (sebesar 2,24 persen poin). Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggalnya, penurunan persentase terbesar terjadi pada setengah penganggur di perdesaan pada kelompok pendidikan menengah (sebesar 0,80 persen poin).

Tabel 10 Distribusi Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025

Tingkat Pendidikan	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	0,69	1,42	1,01
Laki-Laki	0,51	1,25	0,70
Perempuan	1,00	1,71	1,53
Perkotaan	0,43	0,71	0,45
Perdesaan	0,90	2,06	1,52
Tingkat Dasar	56,99	56,51	56,20
Laki-Laki	56,95	56,76	57,03
Perempuan	57,04	56,10	54,80
Perkotaan	51,24	52,02	50,75
Perdesaan	61,52	60,60	61,27
Tingkat Menengah	34,54	33,79	34,27
Laki-Laki	36,74	35,53	36,21
Perempuan	30,89	30,86	30,95
Perkotaan	38,12	37,05	37,87
Perdesaan	31,72	30,82	30,92
Tingkat Tinggi	7,78	8,28	8,52
Laki-Laki	5,80	6,46	6,06
Perempuan	11,07	11,33	12,72

Lanjutan Tabel 10

Tingkat Pendidikan	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	10,21	10,22	10,93
Perdesaan	5,86	6,52	6,29

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada periode Februari 2025 dan Agustus 2025, penurunan terbesar persentase setengah pengangguran terdapat pada perempuan di kategori pendidikan tingkat dasar (1,30 persen poin). Berdasarkan daerah tempat tinggal, penurunan persentase setengah pengangguran paling besar terdapat di perkotaan dengan jenjang pendidikan tingkat dasar (1,27 persen poin).

BAB 4 INDIKATOR BUKAN ANGKATAN KERJA

4.1 KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan



Tingkat ketidakaktifan Agustus 2025 mencapai 29,41 persen.

Tingkat ketidakaktifan merupakan persentase penduduk yang termasuk kategori bukan angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 29,41 persen, hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) terdapat sekitar 29 orang.

Tabel 11 Indikator Ketidakaktifan Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025

Tingkat Ketidakaktifan	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	15,34	15,66	15,60
Perempuan	43,58	43,30	43,37
Perkotaan	31,34	31,08	31,40
Perdesaan	26,41	26,77	26,14
Indonesia	29,37	29,40	29,41

Tingkat ketidakaktifan selama setahun terakhir cenderung meningkat, yaitu tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Agustus 2024 sebesar 0,04 persen

poin dan sebesar 0,01 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2025 (Tabel 11).

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam tingkat ketidakaktifan di pasar kerja. Hasil Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, sekitar 16 orang tidak aktif dalam pasar kerja, sedangkan pada kelompok perempuan angkanya mencapai sekitar 43 orang. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa faktor struktural dan norma sosial, seperti tanggung jawab domestik dan akses terhadap pekerjaan yang setara, masih menjadi tantangan utama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja (World Bank, 2012; ILO, 2020).

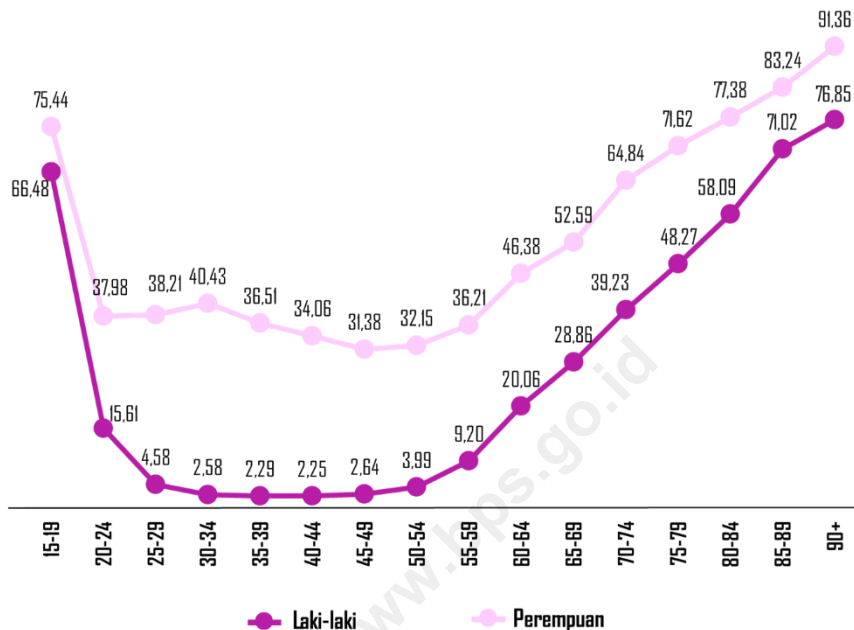
Dibandingkan Agustus 2024, tingkat ketidakaktifan pada laki-laki meningkat sebesar 0,26 persen poin, sebaliknya pada perempuan mengalami penurunan sebesar 0,21 persen poin. Pola tersebut berbeda jika dibandingkan dengan Februari 2025, pada laki-laki terjadi penurunan sebesar 0,06 persen poin dan pada perempuan terjadi kenaikan 0,07 persen poin.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan terlihat lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang bekerja di perdesaan lebih besar dibandingkan perkotaan sesuai dengan lebih tingginya EPR di daerah perdesaan dibanding daerah perkotaan. Pada Agustus 2025, tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan mencapai 31,40 persen, sedangkan di daerah perdesaan hanya sebesar 26,14 persen. Tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan mengalami peningkatan dibanding Februari 2025 dan Agustus 2024. Berbeda dengan daerah perdesaan, tingkat ketidakaktifan mengalami penurunan dibanding Februari 2025 dan Agustus 2024 (Tabel 11).



Pola tingkat ketidakaktifan berbeda antara laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur. Tingkat ketidakaktifan laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan di semua kelompok umur.

Pola tingkat ketidakaktifan seperti yang terlihat pada Gambar 36 mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk umur muda, lalu turun pada umur produktif dan kembali meningkat pada umur tua.



Gambar 36 Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (persen), Agustus 2025

Gambar 36 menunjukkan bahwa tingkat ketidakaktifan perempuan pada semua kelompok umur lebih tinggi daripada laki-laki. Pada Agustus 2025, titik terendah ketidakaktifan laki-laki berada pada kelompok umur 40–44 tahun sebesar 2,25 persen, sedangkan perempuan berada pada kelompok umur 45–49 tahun yaitu sebesar 31,38 persen.

Berdasarkan Gambar 36, pada Agustus 2025, terlihat bahwa tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur 15–19 tahun mencapai 66,48 persen kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 2,25 persen pada kelompok umur 40–44 tahun dan meningkat kembali mulai dari kelompok umur 45–49 tahun menjadi 2,64 persen dan meningkat terus hingga kelompok umur 90 tahun ke atas yang mencapai

76,85 persen. Sementara itu, tingkat ketidakaktifan pada perempuan mencapai 75,44 persen pada kelompok umur 15–19 tahun, mengalami penurunan menjadi 31,38 persen pada kelompok umur 45–49 tahun, kemudian pola peningkatan tingkat ketidakaktifan perempuan terus terjadi hingga kelompok umur 90 tahun ke atas yang mencapai 91,36 persen.

<https://www.bps.go.id>

BAB 5 INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

5.1 KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi utama selain sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi suatu negara.

Teori *human capital* menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi yang memberikan manfaat ekonomi penting, antara lain peningkatan produktivitas, akses terhadap pekerjaan yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan, serta peluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Becker, 1993; Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan adalah indikator terbaik yang tersedia untuk menggambarkan tingkat keahlian tenaga kerja. Keahlian ini menjadi salah satu faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing secara global dan memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal.

Indikator KILM 14 menyajikan komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan yang disesuaikan dengan *International Standard Classification of Education* (ISCED) berdasarkan variabel yang tersedia di Sakernas. Namun demikian, Sakernas tidak mendata kemampuan baca tulis sehingga tingkat literasi diprosikan menggunakan tingkat pendidikan formal.



Pada Agustus 2025 mayoritas angkatan kerja berpendidikan tingkat dasar sebesar 49,89 persen.

Komposisi angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditampilkan pada Tabel 12 menunjukkan bahwa pada Agustus 2025 mayoritas angkatan kerja masih berasal dari kelompok berpendidikan tingkat dasar, yaitu sebesar 49,89 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Februari 2025 yang bernilai 51,23 persen maupun Agustus 2024 yang bernilai 51,40 persen. Sebaliknya, terjadi peningkatan pada kelompok berpendidikan menengah yang sebesar 36,12 persen pada Agustus 2025, lebih tinggi daripada Februari 2025 (34,28 persen) maupun Agustus 2024 (34,82 persen). Persentase angkatan kerja berpendidikan tinggi juga mengalami peningkatan meskipun relatif kecil, dari 13,00 persen pada Februari 2025 menjadi 13,11 persen pada Agustus 2025. Sementara itu, proporsi angkatan kerja yang tidak pernah sekolah menurun dari 1,49 persen pada Februari 2025 menjadi 0,88 persen. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran struktur pendidikan angkatan kerja menuju jenjang menengah dan tinggi pada periode Februari 2025 dan Agustus 2025.

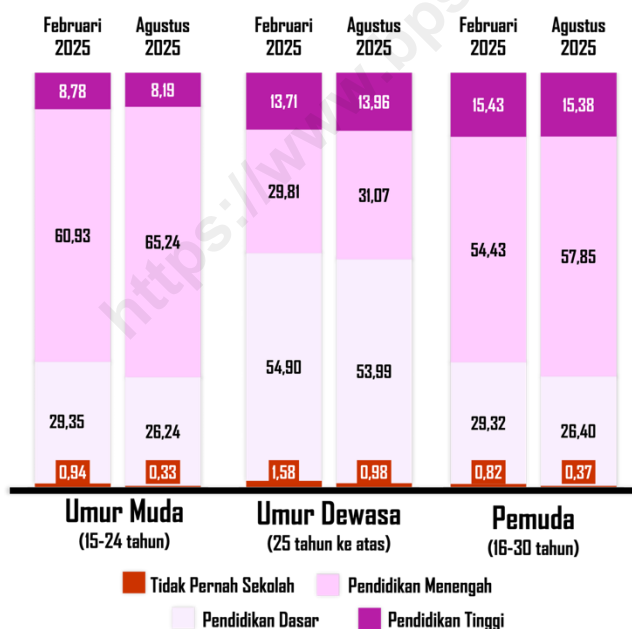
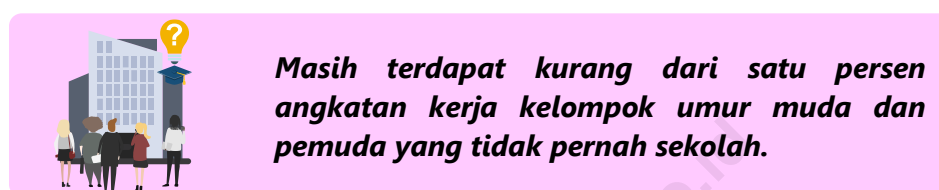
Jika dianalisis menurut jenis kelamin, Tabel 12 menunjukkan bahwa komposisi pendidikan angkatan kerja perempuan dan laki-laki memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok. Pada Agustus 2025, angkatan kerja perempuan lebih banyak memiliki pendidikan tinggi, yaitu sebesar 16,88 persen, sedangkan laki-laki sebesar 10,60 persen. Sebaliknya, laki-laki lebih dominan pada jenjang pendidikan menengah dibanding perempuan. Pada jenjang tidak pernah sekolah dan pendidikan dasar, persentase perempuan juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki, konsisten dengan pola yang muncul pada periode sebelumnya. Temuan ini menggambarkan bahwa capaian perempuan di pasar tenaga kerja relatif lebih baik dibanding laki-laki pada pendidikan dasar ke bawah dan pendidikan tinggi, namun sebagian perempuan masih menghadapi hambatan pada pendidikan menengah.

Tabel 12 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, 2024 dan 2025

Tingkat Pendidikan	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	0,92	1,49	0,88
Laki-Laki	0,69	1,17	0,65
Perempuan	1,28	1,96	1,23
Perkotaan	0,36	0,49	0,35
Perdesaan	1,70	2,96	1,70
Pendidikan Tingkat Dasar	51,40	51,23	49,89
Laki-Laki	50,87	50,69	49,54
Perempuan	52,20	52,05	50,43
Perkotaan	42,09	43,29	41,37
Perdesaan	64,46	62,93	62,90
Pendidikan Tingkat Menengah	34,82	34,28	36,12
Laki-Laki	37,87	37,47	39,21
Perempuan	30,18	29,48	31,46
Perkotaan	40,69	39,57	41,54
Perdesaan	26,58	26,49	27,84
Pendidikan Tingkat Tinggi	12,86	13,00	13,11
Laki-Laki	10,57	10,67	10,60
Perempuan	16,34	16,51	16,88
Perkotaan	16,86	16,65	16,74
Perdesaan	7,26	7,62	7,56

Perbedaan komposisi pendidikan berdasarkan daerah tempat tinggal juga terlihat jelas pada Tabel 12. Di perdesaan, proporsi angkatan kerja dengan pendidikan tingkat dasar masih sangat tinggi, yaitu mencapai 62,90 persen pada Agustus 2025. Selain itu, persentase tidak

pernah sekolah di perdesaan (1,70 persen) lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Sebaliknya, angkatan kerja di wilayah perkotaan lebih dominan dibanding perdesaan pada pendidikan tingkat menengah (41,54 persen) dan pendidikan tinggi (16,74 persen). Pola ini konsisten dengan kondisi Februari 2025 dan Agustus 2024, menunjukkan bahwa kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara perkotaan dan perdesaan masih berlanjut. Kesenjangan pendidikan ini berimplikasi pada kualitas dan produktivitas angkatan kerja serta kesenjangan pendapatan di pasar tenaga kerja (OECD, 2019).



Gambar 37 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari 2025 dan Agustus 2025

Gambar 37 menyajikan perubahan komposisi tingkat pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur pada Februari 2025 dan Agustus 2025. Untuk kelompok umur muda (15–24 tahun), terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada pendidikan tingkat menengah dari 60,93 persen pada Februari 2025 menjadi 65,24 persen pada Agustus 2025. Pada saat yang sama, pendidikan dasar menurun dari 29,35 persen menjadi 26,24 persen, sedangkan pendidikan tinggi sedikit menurun dari 8,78 persen menjadi 8,19 persen. Kelompok umur muda yang tidak pernah sekolah turun drastis dari 0,94 persen menjadi 0,33 persen, mencerminkan perbaikan akses pendidikan dasar di kalangan usia muda.

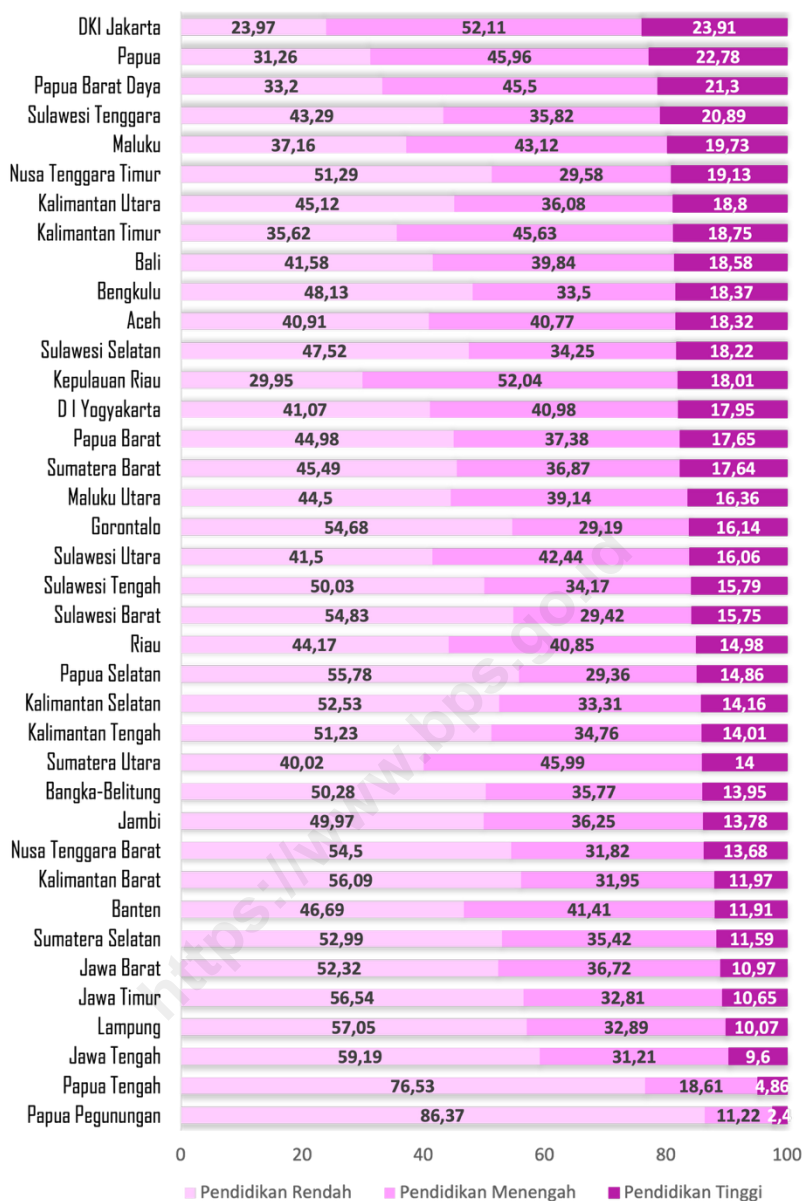
Pada kelompok umur dewasa (25 tahun ke atas), pendidikan dasar masih menjadi kelompok terbesar, yaitu 53,99 persen pada Agustus 2025. Persentase tersebut sedikit menurun dibanding Februari 2025 (54,90 persen). Pendidikan menengah juga meningkat dari 29,81 persen menjadi 31,07 persen, sementara pendidikan tinggi naik dari 13,71 persen menjadi 13,96 persen. Kelompok tidak pernah sekolah menurun dari 1,58 persen menjadi 0,98 persen. Meskipun pendidikan dasar tetap mendominasi, peningkatan pada pendidikan menengah dan tinggi mencerminkan perbaikan bertahap struktur pendidikan angkatan kerja dewasa.

Pada kelompok pemuda (16–30 tahun), pendidikan menengah mendominasi komposisi angkatan kerja dengan persentase 57,85 persen pada Agustus 2025, meningkat dari 54,43 persen pada Februari 2025. Pendidikan dasar turun dari 29,32 persen menjadi 26,40 persen, sementara pendidikan tinggi relatif stabil pada kisaran 15 persen. Kelompok tidak pernah sekolah juga menurun dari 0,82 persen menjadi 0,37 persen. Pola ini menunjukkan bahwa perbaikan struktur pendidikan paling nyata terjadi pada kelompok usia muda dan pemuda.



Pada Agustus 2025, Papua Pegunungan mencatat proporsi tertinggi angkatan kerja berpendidikan rendah yaitu mencapai 86,37 persen.

Berdasarkan distribusi angkatan kerja menurut jenjang pendidikan yang tersaji pada Grafik 38, terlihat bahwa Papua Pegunungan mencatat proporsi tertinggi angkatan kerja berpendidikan rendah, yaitu mencapai 86,37 persen. Persentase yang tinggi juga tampak di Papua Tengah sebesar 76,53 persen. Di wilayah barat Indonesia, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan proporsi pendidikan rendah terbesar, yaitu 59,19 persen. Sementara itu, beberapa provinsi menunjukkan struktur pendidikan angkatan kerja yang lebih seimbang atau mulai bergeser ke dominasi pendidikan menengah. DKI Jakarta dan Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi dengan proporsi angkatan kerja berpendidikan menengah masing-masing sebesar 52,11 persen dan 52,04 persen, keduanya berada di atas 50 persen. Secara keseluruhan, sebaran pada Grafik 38 menegaskan bahwa komposisi pendidikan angkatan kerja di Indonesia belum merata.



Gambar 38 Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Agustus 2025

BAB 6 INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

6.1 KILM 15. Upah dan Biaya Kompensasi

Salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja adalah besaran upah atau pendapatan yang diterima. Pada publikasi ini, informasi yang disajikan terbatas pada rata-rata upah atau gaji bersih sebulan dari penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Sakernas tidak menyediakan data mengenai biaya kompensasi, sehingga indikator tersebut tidak dapat dimasukkan dalam publikasi KILM.

Pada Agustus 2025, rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai berdasarkan hasil Sakernas mencapai 3,33 juta rupiah, meningkat dibandingkan Februari 2025 yang berada pada angka 3,09 juta rupiah. Peningkatan ini juga terjadi jika dibandingkan dengan Agustus 2024 yang nominalnya sebesar 3,27 juta rupiah. Informasi lengkap mengenai perkembangan rata-rata upah menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal dapat dilihat pada Tabel 13.

Dilihat menurut jenis kelamin, rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai laki-laki pada Agustus 2025 mencapai 3,59 juta rupiah, sementara perempuan menerima rata-rata 2,86 juta rupiah. Kedua kelompok mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2025, masing-masing meningkat sebesar 0,22 juta rupiah dan 0,25 juta rupiah. Walaupun demikian, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih cukup besar. Laki-laki secara konsisten memperoleh rata-rata upah yang lebih tinggi, mencerminkan perbedaan struktur pekerjaan, pengalaman kerja, serta sektor tempat bekerja sebagaimana sering diidentifikasi dalam kajian ketenagakerjaan internasional.

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai di wilayah perkotaan pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,62 juta rupiah, sedangkan di perdesaan sebesar 2,58 juta rupiah. Baik wilayah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2025, namun kesenjangan antara keduanya tetap signifikan. Upah di perkotaan secara konsisten lebih tinggi, sejalan dengan karakteristik pasar kerja yang umumnya menawarkan jenis pekerjaan dengan produktivitas dan tingkat upah lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan wilayah perdesaan.

**Tabel 13 Rata-Rata Upah/Gaji Selama Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Daerah
Tempat Tinggal (juta rupiah), 2024 dan 2025**

Rata Rata Upah	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	3,54	3,37	3,59
Perempuan	2,77	2,61	2,86
Perkotaan	3,59	3,32	3,62
Perdesaan	2,45	2,51	2,58
Indonesia	3,27	3,09	3,33



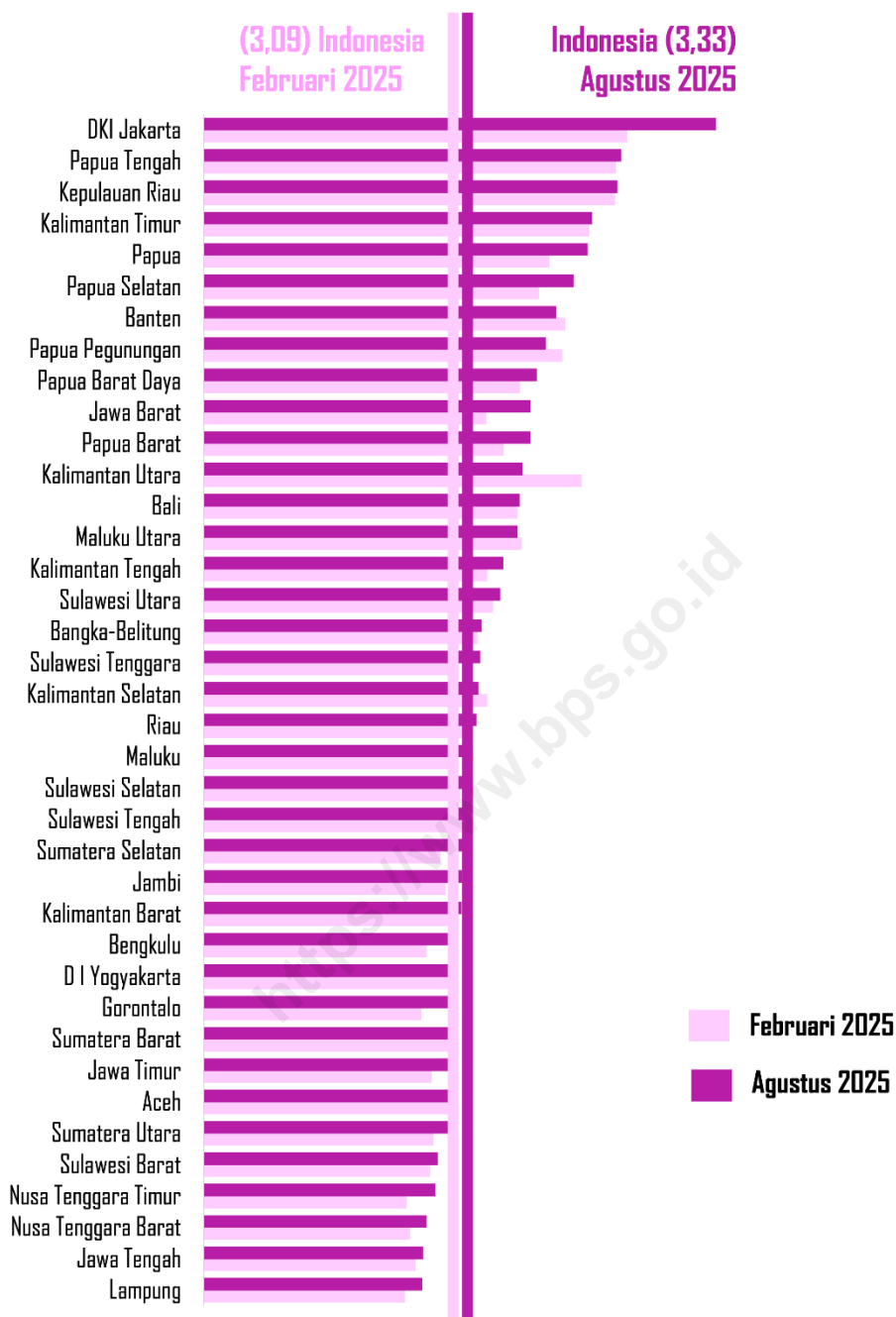
Agustus 2025: Rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai tertinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta, Papua Tengah, dan Kepulauan Riau.

Rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai menurut provinsi yang disajikan pada Gambar 39 menunjukkan bahwa pada Agustus 2025 provinsi dengan rata-rata upah tertinggi secara berturut-turut adalah DKI Jakarta, Papua Tengah, dan Kepulauan Riau. Ketiga provinsi tersebut secara konsisten menempati posisi teratas sejak periode sebelumnya. Struktur sektor ekonomi yang kuat, tingkat

urbanisasi yang tinggi, dan dominasi pekerjaan dengan nilai tambah besar menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat upah di provinsi-provinsi tersebut.

Sebaliknya, upah terendah umumnya berada pada provinsi-provinsi dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor primer, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meskipun terdapat peningkatan upah di sebagian provinsi tersebut, jarak terhadap provinsi berupah tinggi dan provinsi berupah rendah masih cukup lebar, memperlihatkan adanya ketimpangan regional yang persisten. Informasi lebih rinci mengenai perbandingan upah per provinsi dapat dilihat pada Gambar 39 serta Lampiran 26.

Secara keseluruhan, perkembangan upah/gaji buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, baik berdasarkan jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal. Namun demikian, kesenjangan upah antarjenis kelamin dan antarwilayah masih cukup nyata. Kenaikan upah pada periode ini juga mengindikasikan adanya perbaikan dalam kondisi pasar kerja, meskipun disparitas struktural antarprovinsi, antarwilayah, dan antarjenis kelamin masih menjadi tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 39, Lampiran 26, dan Lampiran 27.



**Gambar 39 Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi (juta rupiah),
Februari dan Agustus 2025**

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank (ADB). (2021). *Employment and labor markets in developing Asia*. ADB.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Hussmanns, R., Mehran, F., & Verma, V. (1990). *Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment: An ILO manual in concepts and methods*. International Labour Office.
- International Labour Organization (ILO). (2012). *International standard classification of occupations: ISCO-08*. ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2013). *Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization*. ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2018). *Global Wage Report 2018/19: What Lies Behind Gender Pay Gaps*. ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture* (3rd ed.). ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2019). *Quick guide on interpreting the unemployment rate*. ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2020). *Global employment trends for youth 2020: Technology and the future of jobs*. ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2020). *Women at Work: Trends 2016-2020*. ILO.
- ILOSTAT. (n.d.-a). *Employment by industry - ILO definition and interpretation*. Retrieved from <https://ilostat ilo.org>

- ILOSTAT. (n.d.-b). Employment by occupation and sex - ILO definition and interpretation. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>
- ILOSTAT. (n.d.-c). Employment by status in employment - ILO definition and interpretation. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>
- ILOSTAT. (n.d.-d). Employment-to-population ratio - ILO definition and interpretation. International Labour Organization. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>
- ILOSTAT. (n.d.-e). Labour force participation rate - ILO definition and interpretation. International Labour Organization. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>
- ILOSTAT. (n.d.-f). Part-time employment - ILO definition and interpretation. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>
- ILOSTAT. (n.d.-g). Time-related underemployment rate - ILO definition and interpretation. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>
- ILOSTAT. (n.d.-h). Youth unemployment rate. International Labour Organization. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>
- Lewis, W. A. (1954). *Economic development with unlimited supplies of labour*. The Manchester School, 22(2), 139–191.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Education at a Glance 2019: OECD Indicators*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Future of work: Employment outlook 2019*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *Part-time and temporary employment: Realities and challenges*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *How's Life? 2020: Measuring Well-being*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9870c393-en>

- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Getting Skills Right: Assessing and Anticipating Labour Market Needs*. <https://doi.org/10.1787/1a1f4094-en>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature. *The World Bank Economic Review*, 32(3), 676–699. <https://doi.org/10.1093/wber/lhy002>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148*.
- World Bank. (2012). *World Development Report 2012: Gender Equality and Development*. Washington, DC: World Bank.
- World Health Organization (WHO) & International Labour Organization (ILO). (2021). Long working hours increasing deaths from heart disease and stroke: WHO, ILO. <https://www.who.int/news/item/17-05-2021-long-working-hours-increasing-deaths-from-heart-disease-and-stroke-who-ilo>
- World Bank. (2021). Gender and Education. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
- World Bank. (2022). Gender Equality and Labor Market Outcomes. Retrieved from <https://www.worldbank.org>

LAMPIRAN

<https://www.kps.go.id>

**Lampiran 1 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi
dan Jenis Kelamin (orang), 2024 dan 2025**

Provinsi	Agustus 2024			Februari 2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2.038.581	2.048.549	4.087.130	2.056.173	2.064.684	4.120.857
Sumatera Utara	5.716.942	5.747.673	11.464.615	5.763.325	5.797.831	11.561.156
Sumatera Barat	2.213.648	2.201.434	4.415.082	2.231.572	2.219.607	4.451.179
Riau	2.525.979	2.420.224	4.946.203	2.544.486	2.441.601	4.986.087
Jambi	1.414.495	1.372.612	2.787.107	1.425.322	1.382.654	2.807.976
Sumatera Selatan	3.343.407	3.236.326	6.579.733	3.365.776	3.258.752	6.624.528
Bengkulu	809.149	775.852	1.585.001	815.221	781.967	1.597.188
Lampung	3.621.112	3.475.107	7.096.219	3.645.541	3.501.457	7.146.998
Kep. Bangka Belitung	599.119	567.249	1.166.368	604.035	572.551	1.176.586
Kepulauan Riau	821.151	799.049	1.620.200	827.359	805.951	1.633.310
DKI Jakarta	4.183.322	4.181.505	8.364.827	4.185.074	4.188.382	8.373.456
Jawa Barat	19.518.565	19.151.827	38.670.392	19.625.984	19.267.918	38.893.902
Jawa Tengah	14.852.064	14.860.118	29.712.182	14.939.329	14.951.367	29.890.696
DI Yogyakarta	1.484.717	1.539.342	3.024.059	1.490.866	1.547.091	3.037.957
Jawa Timur	16.440.322	16.752.809	33.193.131	16.515.044	16.831.353	33.346.397
Banten	4.764.337	4.623.932	9.388.269	4.788.998	4.652.298	9.441.296
Bali	1.754.759	1.765.127	3.519.886	1.762.161	1.774.033	3.536.194
Nusa Tenggara Barat	2.061.160	2.072.620	4.133.780	2.081.127	2.089.736	4.170.863
Nusa Tenggara Timur	1.997.794	2.026.385	4.024.179	2.013.459	2.043.752	4.057.211
Kalimantan Barat	2.194.967	2.077.842	4.272.809	2.213.027	2.096.062	4.309.089
Kalimantan Tengah	1.101.032	1.025.277	2.126.309	1.109.421	1.034.020	2.143.441
Kalimantan Selatan	1.593.864	1.571.212	3.165.076	1.604.563	1.581.499	3.186.062
Kalimantan Timur	1.612.566	1.493.740	3.106.306	1.658.698	1.538.595	3.197.293
Kalimantan Utara	296.483	263.140	559.623	298.928	265.806	564.734
Sulawesi Utara	1.070.673	1.028.484	2.099.157	1.076.327	1.033.924	2.110.251
Sulawesi Tengah	1.188.516	1.128.092	2.316.608	1.197.616	1.135.450	2.333.066
Sulawesi Selatan	3.571.782	3.679.602	7.251.384	3.594.136	3.704.050	7.298.186
Sulawesi Tenggara	1.026.180	1.001.599	2.027.779	1.037.501	1.011.807	2.049.308
Gorontalo	469.137	463.789	932.926	472.565	467.872	940.437
Sulawesi Barat	552.383	537.728	1.090.111	557.101	542.500	1.099.601
Maluku	732.448	721.038	1.453.486	738.829	727.399	1.466.228
Maluku Utara	514.361	482.681	997.042	518.759	485.954	1.004.713
Papua Barat	224.920	199.771	424.691	228.805	202.471	431.276
Papua Barat Daya	246.587	222.925	469.512	247.937	224.910	472.847
Papua	379.877	337.321	717.198	383.694	341.603	725.297
Papua Selatan	173.733	155.764	329.497	175.982	158.588	334.570
Papua Tengah	587.868	507.011	1.094.879	594.636	509.335	1.103.971
Papua Pegunungan	623.410	535.002	1.158.412	625.508	536.282	1.161.790
Indonesia	108.321.410	107.049.758	215.371.168	109.014.885	107.771.112	216.785.997

Lanjutan Lampiran 1

Provinsi	Agustus 2025		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2.074.225	2.081.719	4.155.944
Sumatera Utara	5.810.933	5.842.427	11.653.360
Sumatera Barat	2.248.262	2.234.780	4.483.042
Riau	2.567.441	2.466.654	5.034.095
Jambi	1.435.174	1.393.826	2.829.000
Sumatera Selatan	3.390.473	3.285.286	6.675.759
Bengkulu	820.815	787.923	1.608.738
Lampung	3.666.213	3.526.324	7.192.537
Kep. Bangka Belitung	608.039	577.108	1.185.147
Kepulauan Riau	834.196	814.021	1.648.217
DKI Jakarta	4.200.256	4.230.367	8.430.623
Jawa Barat	19.789.443	19.447.942	39.237.385
Jawa Tengah	15.011.396	15.025.691	30.037.087
DI Yogyakarta	1.496.152	1.552.974	3.049.126
Jawa Timur	16.575.843	16.896.577	33.472.420
Banten	4.836.321	4.703.503	9.539.824
Bali	1.766.970	1.780.549	3.547.519
Nusa Tenggara Barat	2.103.266	2.107.316	4.210.582
Nusa Tenggara Timur	2.031.043	2.060.895	4.091.938
Kalimantan Barat	2.229.070	2.112.991	4.342.061
Kalimantan Tengah	1.116.181	1.042.070	2.158.251
Kalimantan Selatan	1.617.579	1.594.887	3.212.466
Kalimantan Timur	1.619.367	1.500.745	3.120.112
Kalimantan Utara	300.948	268.178	569.126
Sulawesi Utara	1.080.761	1.039.134	2.119.895
Sulawesi Tengah	1.206.518	1.144.952	2.351.470
Sulawesi Selatan	3.617.498	3.725.992	7.343.490
Sulawesi Tenggara	1.047.726	1.021.658	2.069.384
Gorontalo	475.468	470.831	946.299
Sulawesi Barat	562.250	547.513	1.109.763
Maluku	743.846	732.583	1.476.429
Maluku Utara	524.238	489.988	1.014.226
Papua Barat	230.224	204.115	434.339
Papua Barat Daya	249.237	226.648	475.885
Papua	385.519	343.553	729.072
Papua Selatan	177.054	159.664	336.718
Papua Tengah	597.223	512.495	1.109.718
Papua Pegunungan	627.501	539.266	1.166.767
Indonesia	109.674.669	108.493.145	218.167.814

**Lampiran 2 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut
Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (orang), 2024
dan 2025**

Karakteristik	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke Atas	215.371.168	216.785.997	218.167.814
Laki-Laki	108.321.410	109.014.885	109.674.669
Perempuan	107.049.758	107.771.112	108.493.145
Perkotaan	129.344.603	132.228.778	135.617.318
Perdesaan	86.026.565	84.557.219	82.550.496
15–64 Tahun	194.734.678	195.571.859	196.487.524
Laki-Laki	98.581.472	99.018.308	99.474.683
Perempuan	96.153.206	96.553.551	97.012.841
Perkotaan	117.178.593	119.485.314	122.280.302
Perdesaan	77.556.085	76.086.545	74.207.222
15–24 Tahun	44.328.216	44.294.146	44.259.960
Laki-Laki	22.834.599	22.810.238	22.798.944
Perempuan	21.493.617	21.483.908	21.461.016
Perkotaan	26.249.136	26.673.673	27.159.184
Perdesaan	18.079.080	17.620.473	17.100.776
25+ Tahun	171.042.952	172.491.851	173.907.854
Laki-Laki	85.486.811	86.204.647	86.875.725
Perempuan	85.556.141	86.287.204	87.032.129
Perkotaan	103.095.467	105.555.105	108.458.134
Perdesaan	67.947.485	66.936.746	65.449.720
25–54 Tahun	123.573.822	124.025.331	124.479.666
Laki-Laki	62.487.509	62.746.008	62.979.522
Perempuan	61.086.313	61.279.323	61.500.144
Perkotaan	74.694.553	76.059.084	77.758.128
Perdesaan	48.879.269	47.966.247	46.721.538
25–34 Tahun	44.602.768	44.695.014	44.692.203
Laki-Laki	22.770.410	22.842.797	22.842.841
Perempuan	21.832.358	21.852.217	21.849.362
Perkotaan	26.691.512	27.113.548	27.621.580
Perdesaan	17.911.256	17.581.466	17.070.623
35–54 Tahun	78.971.054	79.330.317	79.787.463
Laki-Laki	39.717.099	39.903.211	40.136.681
Perempuan	39.253.955	39.427.106	39.650.782
Perkotaan	48.003.041	48.945.536	50.136.548
Perdesaan	30.968.013	30.384.781	29.650.915
55–64 Tahun	26.832.640	27.252.382	27.747.898
Laki-Laki	13.259.364	13.462.062	13.696.217
Perempuan	13.573.276	13.790.320	14.051.681
Perkotaan	16.234.904	16.752.557	17.362.990
Perdesaan	10.597.736	10.499.825	10.384.908
65 Tahun ke Atas	20.636.490	21.214.138	21.680.290
Laki-Laki	9.739.938	9.996.577	10.199.986
Perempuan	10.896.552	11.217.561	11.480.304
Perkotaan	12.166.010	12.743.464	13.337.016
Perdesaan	8.470.480	8.470.674	8.343.274

Lampiran 3 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (orang), 2024 dan 2025

Provinsi	Agustus 2024			Februari 2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1.644.705	1.016.578	2.661.283	1.671.375	1.033.246	2.704.621
Sumatera Utara	4.816.446	3.364.712	8.181.158	4.828.423	3.279.915	8.108.338
Sumatera Barat	1.831.757	1.271.274	3.103.031	1.831.132	1.326.780	3.157.912
Riau	2.141.959	1.138.769	3.280.728	2.155.769	1.069.040	3.224.809
Jambi	1.216.964	702.378	1.919.342	1.217.640	666.695	1.884.335
Sumatera Selatan	2.868.429	1.791.380	4.659.809	2.855.930	1.818.129	4.674.059
Bengkulu	688.595	447.978	1.136.573	688.492	453.546	1.142.038
Lampung	3.100.210	1.896.540	4.996.750	3.185.369	1.900.496	5.085.865
Kep. Bangka Belitung	516.435	286.863	803.298	519.354	276.852	796.206
Kepulauan Riau	703.994	416.665	1.120.659	680.620	411.134	1.091.754
DKI Jakarta	3.344.774	2.100.993	5.445.767	3.284.395	2.191.601	5.475.996
Jawa Barat	16.496.005	9.689.331	26.185.336	16.695.307	10.106.490	26.801.797
Jawa Tengah	12.722.606	9.186.238	21.908.844	12.695.340	9.175.870	21.871.210
DI Yogyakarta	1.236.335	1.025.101	2.261.436	1.235.455	1.004.300	2.239.755
Jawa Timur	14.223.463	10.158.298	24.381.761	14.187.375	10.571.820	24.759.195
Banten	3.951.803	2.260.874	6.212.677	4.027.823	2.186.136	6.213.959
Bali	1.469.916	1.244.181	2.714.097	1.470.599	1.266.556	2.737.155
Nusa Tenggara Barat	1.782.340	1.410.220	3.192.560	1.798.298	1.392.444	3.190.742
Nusa Tenggara Timur	1.692.120	1.426.558	3.118.678	1.639.454	1.436.178	3.075.632
Kalimantan Barat	1.888.748	1.120.974	3.009.722	1.837.840	1.076.911	2.914.751
Kalimantan Tengah	952.338	508.568	1.460.906	952.895	545.293	1.498.188
Kalimantan Selatan	1.350.169	872.363	2.222.532	1.363.115	880.331	2.243.446
Kalimantan Timur	1.350.523	732.946	2.083.469	1.374.764	748.392	2.123.156
Kalimantan Utara	256.496	137.208	393.704	244.296	146.449	390.745
Sulawesi Utara	877.013	510.001	1.387.014	884.694	493.356	1.378.050
Sulawesi Tengah	1.021.381	625.709	1.647.090	1.025.783	619.334	1.645.117
Sulawesi Selatan	2.947.411	1.938.277	4.885.688	2.937.871	1.878.514	4.816.385
Sulawesi Tenggara	872.511	603.950	1.476.461	863.129	566.682	1.429.811
Gorontalo	396.431	256.157	652.588	390.634	244.353	634.987
Sulawesi Barat	474.759	303.624	778.383	477.694	311.940	789.634
Maluku	561.227	405.586	966.813	569.443	421.191	990.634
Maluku Utara	423.845	265.390	689.235	432.014	261.129	693.143
Papua Barat	183.134	119.454	302.588	181.336	126.790	308.126
Papua Barat Daya	196.377	121.995	318.372	205.026	117.191	322.217
Papua	300.133	190.432	490.565	312.303	198.131	510.434
Papua Selatan	143.146	92.994	236.140	141.001	86.995	227.996
Papua Tengah	499.887	300.756	800.643	511.384	360.396	871.780
Papua Pegunungan	563.352	458.551	1.021.903	569.137	456.372	1.025.509
Indonesia	91.707.737	60.399.866	152.107.603	91.942.509	61.106.978	153.049.487

Lanjutan Lampiran 3

Provinsi	Agustus 2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1.673.470	1.041.048	2.714.518
Sumatera Utara	4.930.807	3.493.718	8.424.525
Sumatera Barat	1.870.762	1.327.454	3.198.216
Riau	2.174.017	1.176.120	3.350.137
Jambi	1.228.576	705.635	1.934.211
Sumatera Selatan	2.875.677	1.789.258	4.664.935
Bengkulu	696.363	458.335	1.154.698
Lampung	3.167.483	1.899.067	5.066.550
Kep. Bangka Belitung	522.081	300.230	822.311
Kepulauan Riau	700.239	424.295	1.124.534
DKI Jakarta	3.345.953	2.112.846	5.458.799
Jawa Barat	16.704.553	9.581.921	26.286.474
Jawa Tengah	12.814.060	9.522.138	22.336.198
DI Yogyakarta	1.255.297	1.023.517	2.278.814
Jawa Timur	14.237.001	10.524.733	24.761.734
Banten	3.963.911	2.204.371	6.168.282
Bali	1.481.466	1.261.254	2.742.720
Nusa Tenggara Barat	1.820.314	1.384.347	3.204.661
Nusa Tenggara Timur	1.676.025	1.415.493	3.091.518
Kalimantan Barat	1.901.767	1.176.918	3.078.685
Kalimantan Tengah	951.687	524.608	1.476.295
Kalimantan Selatan	1.366.533	880.015	2.246.548
Kalimantan Timur	1.346.308	731.105	2.077.413
Kalimantan Utara	255.651	140.152	395.803
Sulawesi Utara	899.788	524.913	1.424.701
Sulawesi Tengah	1.037.900	664.651	1.702.551
Sulawesi Selatan	2.995.112	1.972.915	4.968.027
Sulawesi Tenggara	875.441	607.756	1.483.197
Gorontalo	405.555	250.126	655.681
Sulawesi Barat	491.784	332.252	824.036
Maluku	576.102	408.139	984.241
Maluku Utara	439.576	266.002	705.578
Papua Barat	184.240	117.838	302.078
Papua Barat Daya	200.259	123.812	324.071
Papua	292.872	173.619	466.491
Papua Selatan	138.520	88.322	226.842
Papua Tengah	481.264	338.696	819.960
Papua Pegunungan	582.769	474.969	1.057.738
Indonesia	92.561.183	61.442.588	154.003.771

**Lampiran 4 Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin,
dan Daerah Tempat Tinggal (orang), 2024 dan 2025**

Karakteristik	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja	144.642.004	145.771.180	146.542.264
Laki-Laki	87.212.275	87.361.944	88.072.304
Perempuan	57.429.729	58.409.236	58.469.960
Perkotaan	83.664.842	85.909.158	87.684.420
Perdesaan	60.977.162	59.862.022	58.857.844
Umur Muda (15–24 tahun) yang Bekerja	18.758.726	18.421.906	18.913.205
Laki-Laki	11.017.937	10.893.357	11.210.706
Perempuan	7.740.789	7.528.549	7.702.499
Perkotaan	10.504.662	10.463.942	10.944.966
Perdesaan	8.254.064	7.957.964	7.968.239
Umur Dewasa (25+ Tahun) yang Bekerja	125.883.278	127.349.274	127.629.059
Laki-Laki	76.194.338	76.468.587	76.861.598
Perempuan	49.688.940	50.880.687	50.767.461
Perkotaan	73.160.180	75.445.216	76.739.454
Perdesaan	52.723.098	51.904.058	50.889.605

Lampiran 5 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (orang), 2024 dan 2025

Karakteristik	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke Atas	152.107.603	153.049.487	154.003.771
Laki-Laki	91.707.737	91.942.509	92.561.183
Perempuan	60.399.866	61.106.978	61.442.588
Perkotaan	88.804.501	91.127.875	93.032.510
Perdesaan	63.303.102	61.921.612	60.971.261
15–64 Tahun	141.876.590	142.627.557	143.475.756
Laki-Laki	85.565.594	85.716.576	86.284.464
Perempuan	56.310.996	56.910.981	57.191.292
Perkotaan	83.585.228	85.576.236	87.435.856
Perdesaan	58.291.362	57.051.321	56.039.900
15–24 Tahun	22.688.665	21.971.834	22.756.772
Laki-Laki	13.376.073	13.026.136	13.456.558
Perempuan	9.312.592	8.945.698	9.300.214
Perkotaan	13.107.811	12.945.534	13.640.433
Perdesaan	9.580.854	9.026.300	9.116.339
25–54 Tahun	99.608.918	100.533.167	100.634.856
Laki-Laki	60.682.741	60.963.582	61.060.046
Perempuan	38.926.177	39.569.585	39.574.810
Perkotaan	59.479.493	60.914.191	62.033.617
Perdesaan	40.129.425	39.618.976	38.601.239
25–34 Tahun	34.987.650	35.123.186	35.281.859
Laki-Laki	21.895.245	22.035.792	22.022.625
Perempuan	13.092.405	13.087.394	13.259.234
Perkotaan	20.956.725	21.275.474	21.820.883
Perdesaan	14.030.925	13.847.712	13.460.976
35–54 Tahun	64.621.268	65.409.981	65.352.997
Laki-Laki	38.787.496	38.927.790	39.037.421
Perempuan	25.833.772	26.482.191	26.315.576
Perkotaan	38.522.768	39.638.717	40.212.734
Perdesaan	26.098.500	25.771.264	25.140.263
55–64 tahun	19.579.007	20.122.556	20.084.128
Laki-Laki	11.506.780	11.726.858	11.767.860
Perempuan	8.072.227	8.395.698	8.316.268
Perkotaan	10.997.924	11.716.511	11.761.806
Perdesaan	8.581.083	8.406.045	8.322.322
65 Tahun ke Atas	10.231.013	10.421.930	10.528.015
Laki-Laki	6.142.143	6.225.933	6.276.719
Perempuan	4.088.870	4.195.997	4.251.296
Perkotaan	5.219.273	5.551.639	5.596.654
Perdesaan	5.011.740	4.870.291	4.931.361

Lampiran 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2024 dan 2025

Karakteristik	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke Atas	70,63	70,60	70,59
Laki-Laki	84,66	84,34	84,40
Perempuan	56,42	56,70	56,63
Perkotaan	68,66	68,92	68,60
Perdesaan	73,59	73,23	73,86
15–64 Tahun	72,86	72,93	73,02
Laki-Laki	86,80	86,57	86,74
Perempuan	58,56	58,94	58,95
Perkotaan	71,33	71,62	71,50
Perdesaan	75,16	74,98	75,52
15–24 Tahun	51,18	49,60	51,42
Laki-Laki	58,58	57,11	59,02
Perempuan	43,33	41,64	43,34
Perkotaan	49,94	48,53	50,22
Perdesaan	52,99	51,23	53,31
25–54 Tahun	80,61	81,06	80,84
Laki-Laki	97,11	97,16	96,95
Perempuan	63,72	64,57	64,35
Perkotaan	79,63	80,09	79,78
Perdesaan	82,10	82,60	82,62
25–34 Tahun	78,44	78,58	78,94
Laki-Laki	96,16	96,47	96,41
Perempuan	59,97	59,89	60,68
Perkotaan	78,51	78,47	79,00
Perdesaan	78,34	78,76	78,85
35–54 Tahun	81,83	82,45	81,91
Laki-Laki	97,66	97,56	97,26
Perempuan	65,81	67,17	66,37
Perkotaan	80,25	80,99	80,21
Perdesaan	84,28	84,82	84,79
55–64 Tahun	72,97	73,84	72,38
Laki-Laki	86,78	87,11	85,92
Perempuan	59,47	60,88	59,18
Perkotaan	67,74	69,94	67,74
Perdesaan	80,97	80,06	80,14
65 Tahun ke Atas	49,58	49,13	48,56
Laki-Laki	63,06	62,28	61,54
Perempuan	37,52	37,41	37,03
Perkotaan	42,90	43,56	41,96
Perdesaan	59,17	57,50	59,11

**Lampiran 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2024 dan 2025**

Provinsi	Agustus 2024			Februari 2025			Agustus 2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	80,68	49,62	65,11	81,29	50,04	65,63	80,68	50,01	65,32
Sumatera Utara	84,25	58,54	71,36	83,78	56,57	70,13	84,85	59,80	72,29
Sumatera Barat	82,75	57,75	70,28	82,06	59,78	70,95	83,21	59,40	71,34
Riau	84,80	47,05	66,33	84,72	43,78	64,68	84,68	47,68	66,55
Jambi	86,04	51,17	68,87	85,43	48,22	67,11	85,60	50,63	68,37
Sumatera Selatan	85,79	55,35	70,82	84,85	55,79	70,56	84,82	54,46	69,88
Bengkulu	85,10	57,74	71,71	84,45	58,00	71,50	84,84	58,17	71,78
Lampung	85,61	54,58	70,41	87,38	54,28	71,16	86,40	53,85	70,44
Kep. Bangka Belitung	86,20	50,57	68,87	85,98	48,35	67,67	85,86	52,02	69,38
Kepulauan Riau	85,73	52,15	69,17	82,26	51,01	66,84	83,94	52,12	68,23
DKI Jakarta	79,95	50,24	65,10	78,48	52,33	65,40	79,66	49,94	64,75
Jawa Barat	84,51	50,59	67,71	85,07	52,45	68,91	84,41	49,27	66,99
Jawa Tengah	85,66	61,82	73,74	84,98	61,37	73,17	85,36	63,37	74,36
DI Yogyakarta	83,27	66,59	74,78	82,87	64,92	73,73	83,90	65,91	74,74
Jawa Timur	86,52	60,64	73,45	85,91	62,81	74,25	85,89	62,29	73,98
Banten	82,95	48,90	66,17	84,11	46,99	65,82	81,96	46,87	64,66
Bali	83,77	70,49	77,11	83,45	71,39	77,40	83,84	70,84	77,31
Nusa Tenggara Barat	86,47	68,04	77,23	86,41	66,63	76,50	86,55	65,69	76,11
Nusa Tenggara Timur	84,70	70,40	77,50	81,42	70,27	75,81	82,52	68,68	75,55
Kalimantan Barat	86,05	53,95	70,44	83,05	51,38	67,64	85,32	55,70	70,90
Kalimantan Tengah	86,50	49,60	68,71	85,89	52,74	69,90	85,26	50,34	68,40
Kalimantan Selatan	84,71	55,52	70,22	84,95	55,66	70,41	84,48	55,18	69,93
Kalimantan Timur	83,75	49,07	67,07	82,88	48,64	66,40	83,14	48,72	66,58
Kalimantan Utara	86,51	52,14	70,35	81,72	55,10	69,19	84,95	52,26	69,55
Sulawesi Utara	81,91	49,59	66,07	82,20	47,72	65,30	83,26	50,51	67,21
Sulawesi Tengah	85,94	55,47	71,10	85,65	54,55	70,51	86,02	58,05	72,40
Sulawesi Selatan	82,52	52,68	67,38	81,74	50,72	65,99	82,80	52,95	67,65
Sulawesi Tenggara	85,03	60,30	72,81	83,19	56,01	69,77	83,56	59,49	71,67
Gorontalo	84,50	55,23	69,95	82,66	52,23	67,52	85,30	53,12	69,29
Sulawesi Barat	85,95	56,46	71,40	85,75	57,50	71,81	87,47	60,68	74,25
Maluku	76,62	56,25	66,52	77,07	57,90	67,56	77,45	55,71	66,66
Maluku Utara	82,40	54,98	69,13	83,28	53,74	68,99	83,85	54,29	69,57
Papua Barat	81,42	59,80	71,25	79,25	62,62	71,45	80,03	57,73	69,55
Papua Barat Daya	79,64	54,72	67,81	82,69	52,11	68,14	80,35	54,63	68,10
Papua	79,01	56,45	68,40	81,39	58,00	70,38	75,97	50,54	63,98
Papua Selatan	82,39	59,70	71,67	80,12	54,86	68,15	78,24	55,32	67,37
Papua Tengah	85,03	59,32	73,13	86,00	70,76	78,97	80,58	66,09	73,89
Papua Pegunungan	90,37	85,71	88,22	90,99	85,10	88,27	92,87	88,08	90,66
Indonesia	84,66	56,42	70,63	84,34	56,70	70,60	84,40	56,63	70,59

**Lampiran 8 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Provinsi dan Jenis Kelamin (orang), 2024 dan 2025**

Provinsi	Agustus 2024			Februari 2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1.567.321	941.033	2.508.354	1.562.969	992.849	2.555.818
Sumatera Utara	4.555.470	3.167.894	7.723.364	4.593.651	3.105.457	7.699.108
Sumatera Barat	1.742.061	1.182.692	2.924.753	1.727.611	1.250.576	2.978.187
Riau	2.073.157	1.086.210	3.159.367	2.072.590	1.019.250	3.091.840
Jambi	1.184.396	648.871	1.833.267	1.157.019	642.841	1.799.860
Sumatera Selatan	2.760.733	1.719.367	4.480.100	2.743.786	1.748.541	4.492.327
Bengkulu	668.412	432.822	1.101.234	666.365	438.681	1.105.046
Lampung	2.988.075	1.799.514	4.787.589	3.074.940	1.804.121	4.879.061
Kep. Bangka Belitung	495.971	270.113	766.084	501.267	261.715	762.982
Kepulauan Riau	661.596	387.491	1.049.087	637.063	379.477	1.016.540
DKI Jakarta	3.136.459	1.971.316	5.107.775	3.061.989	2.075.613	5.137.602
Jawa Barat	15.321.478	9.095.632	24.417.110	15.508.191	9.486.395	24.994.586
Jawa Tengah	12.107.961	8.753.432	20.861.393	12.103.214	8.820.748	20.923.962
DI Yogyakarta	1.186.159	996.610	2.182.769	1.197.795	970.768	2.168.563
Jawa Timur	13.589.175	9.771.935	23.361.110	13.612.701	10.251.999	23.864.700
Banten	3.699.739	2.098.184	5.797.923	3.759.960	2.041.286	5.801.246
Bali	1.441.337	1.224.084	2.665.421	1.445.067	1.248.957	2.694.024
Nusa Tenggara Barat	1.731.971	1.373.578	3.105.549	1.737.778	1.350.335	3.088.113
Nusa Tenggara Timur	1.642.961	1.381.501	3.024.462	1.579.073	1.397.287	2.976.360
Kalimantan Barat	1.793.046	1.070.475	2.863.521	1.753.240	1.038.137	2.791.377
Kalimantan Tengah	920.912	481.363	1.402.275	919.829	526.310	1.446.139
Kalimantan Selatan	1.288.738	840.538	2.129.276	1.308.150	846.797	2.154.947
Kalimantan Timur	1.286.802	689.645	1.976.447	1.307.740	702.250	2.009.990
Kalimantan Utara	246.234	132.127	378.361	232.377	143.136	375.513
Sulawesi Utara	830.580	475.254	1.305.834	839.462	455.458	1.294.920
Sulawesi Tengah	994.866	603.790	1.598.656	1.001.820	593.692	1.595.512
Sulawesi Selatan	2.836.724	1.844.204	4.680.928	2.779.126	1.798.462	4.577.588
Sulawesi Tenggara	850.513	580.376	1.430.889	838.877	544.218	1.383.095
Gorontalo	386.009	246.175	632.184	379.211	235.959	615.170
Sulawesi Barat	465.079	292.428	757.507	467.431	297.182	764.613
Maluku	527.282	380.431	907.713	538.011	393.656	931.667
Maluku Utara	407.245	254.243	661.488	415.620	247.991	663.611
Papua Barat	175.699	114.378	290.077	173.760	121.401	295.161
Papua Barat Daya	185.280	112.465	297.745	191.564	109.364	300.928
Papua	282.976	175.816	458.792	289.434	185.684	475.118
Papua Selatan	138.095	88.491	226.586	134.969	81.851	216.820
Papua Tengah	486.470	292.126	778.596	490.199	350.618	840.817
Papua Pegunungan	555.293	453.125	1.008.418	558.095	450.174	1.008.269
Indonesia	87.212.275	57.429.729	144.642.004	87.361.944	58.409.236	145.771.180

Lanjutan Lampiran 8

Provinsi	Agustus 2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1.598.571	962.758	2.561.329
Sumatera Utara	4.681.696	3.294.577	7.976.273
Sumatera Barat	1.773.910	1.244.672	3.018.582
Riau	2.091.215	1.119.714	3.210.929
Jambi	1.178.883	672.981	1.851.864
Sumatera Selatan	2.773.238	1.719.336	4.492.574
Bengkulu	675.424	439.910	1.115.334
Lampung	3.049.783	1.803.594	4.853.377
Kep. Bangka Belitung	502.532	283.191	785.723
Kepulauan Riau	655.426	396.549	1.051.975
DKI Jakarta	3.138.026	1.990.438	5.128.464
Jawa Barat	15.549.049	8.957.803	24.506.852
Jawa Tengah	12.195.848	9.099.949	21.295.797
DI Yogyakarta	1.206.607	993.464	2.200.071
Jawa Timur	13.682.118	10.118.916	23.801.034
Banten	3.708.425	2.047.501	5.755.926
Bali	1.459.076	1.242.650	2.701.726
Nusa Tenggara Barat	1.760.006	1.346.723	3.106.729
Nusa Tenggara Timur	1.622.174	1.366.916	2.989.090
Kalimantan Barat	1.806.281	1.124.151	2.930.432
Kalimantan Tengah	916.341	501.342	1.417.683
Kalimantan Selatan	1.305.821	847.318	2.153.139
Kalimantan Timur	1.276.104	693.635	1.969.739
Kalimantan Utara	246.600	133.972	380.572
Sulawesi Utara	852.765	486.568	1.339.333
Sulawesi Tengah	1.010.030	642.816	1.652.846
Sulawesi Selatan	2.863.568	1.895.509	4.759.077
Sulawesi Tenggara	850.472	583.561	1.434.033
Gorontalo	392.164	241.099	633.263
Sulawesi Barat	479.997	320.436	800.433
Maluku	542.103	380.383	922.486
Maluku Utara	421.157	252.299	673.456
Papua Barat	175.147	113.176	288.323
Papua Barat Daya	188.503	113.359	301.862
Papua	273.795	160.221	434.016
Papua Selatan	132.159	85.523	217.682
Papua Tengah	463.526	326.713	790.239
Papua Pegunungan	573.764	466.237	1.040.001
Indonesia	88.072.304	58.469.960	146.542.264

**Lampiran 9 Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja terhadap
Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen),
2024 dan 2025**

Provinsi	Agustus 2024			Februari 2025			Agustus 2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	76,88	45,94	61,37	76,01	48,09	62,02	77,07	46,25	61,63
Sumatera Utara	79,68	55,12	67,37	79,70	53,56	66,59	80,57	56,39	68,45
Sumatera Barat	78,70	53,72	66,24	77,42	56,34	66,91	78,90	55,70	67,33
Riau	82,07	44,88	63,87	81,45	41,75	62,01	81,45	45,39	63,78
Jambi	83,73	47,27	65,78	81,18	46,49	64,10	82,14	48,28	65,46
Sumatera Selatan	82,57	53,13	68,09	81,52	53,66	67,81	81,80	52,33	67,30
Bengkulu	82,61	55,79	69,48	81,74	56,10	69,19	82,29	55,83	69,33
Lampung	82,52	51,78	67,47	84,35	51,52	68,27	83,19	51,15	67,48
Kep. Bangka Belitung	82,78	47,62	65,68	82,99	45,71	64,85	82,65	49,07	66,30
Kepulauan Riau	80,57	48,49	64,75	77,00	47,08	62,24	78,57	48,71	63,83
DKI Jakarta	74,98	47,14	61,06	73,16	49,56	61,36	74,71	47,05	60,83
Jawa Barat	78,50	47,49	63,14	79,02	49,23	64,26	78,57	46,06	62,46
Jawa Tengah	81,52	58,91	70,21	81,02	59,00	70,00	81,24	60,56	70,90
DI Yogyakarta	79,89	64,74	72,18	80,34	62,75	71,38	80,65	63,97	72,15
Jawa Timur	82,66	58,33	70,38	82,43	60,91	71,57	82,54	59,89	71,11
Banten	77,65	45,38	61,76	78,51	43,88	61,45	76,68	43,53	60,34
Bali	82,14	69,35	75,72	82,01	70,40	76,18	82,58	69,79	76,16
Nusa Tenggara Barat	84,03	66,27	75,13	83,50	64,62	74,04	83,68	63,91	73,78
Nusa Tenggara Timur	82,24	68,18	75,16	78,43	68,37	73,36	79,87	66,33	73,05
Kalimantan Barat	81,69	51,52	67,02	79,22	49,53	64,78	81,03	53,20	67,49
Kalimantan Tengah	83,64	46,95	65,95	82,91	50,90	67,47	82,10	48,11	65,69
Kalimantan Selatan	80,86	53,50	67,27	81,53	53,54	67,64	80,73	53,13	67,02
Kalimantan Timur	79,80	46,17	63,63	78,84	45,64	62,87	78,80	46,22	63,13
Kalimantan Utara	83,05	50,21	67,61	77,74	53,85	66,49	81,94	49,96	66,87
Sulawesi Utara	77,58	46,21	62,21	77,99	44,05	61,36	78,90	46,82	63,18
Sulawesi Tengah	83,71	53,52	69,01	83,65	52,29	68,39	83,71	56,14	70,29
Sulawesi Selatan	79,42	50,12	64,55	77,32	48,55	62,72	79,16	50,87	64,81
Sulawesi Tenggara	82,88	57,94	70,56	80,86	53,79	67,49	81,17	57,12	69,30
Gorontalo	82,28	53,08	67,76	80,25	50,43	65,41	82,48	51,21	66,92
Sulawesi Barat	84,20	54,38	69,49	83,90	54,78	69,54	85,37	58,53	72,13
Maluku	71,99	52,76	62,45	72,82	54,12	63,54	72,88	51,92	62,48
Maluku Utara	79,17	52,67	66,35	80,12	51,03	66,05	80,34	51,49	66,40
Papua Barat	78,12	57,25	68,30	75,94	59,96	68,44	76,08	55,45	66,38
Papua Barat Daya	75,14	50,45	63,42	77,26	48,63	63,64	75,63	50,02	63,43
Papua	74,49	52,12	63,97	75,43	54,36	65,51	71,02	46,64	59,53
Papua Selatan	79,49	56,81	68,77	76,69	51,61	64,81	74,64	53,56	64,65
Papua Tengah	82,75	57,62	71,11	82,44	68,84	76,16	77,61	63,75	71,21
Papua Pegunungan	89,07	84,70	87,05	89,22	83,94	86,79	91,44	86,46	89,14
Indonesia	80,51	53,65	67,16	80,14	54,20	67,24	80,30	53,89	67,17

**Lampiran 10 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2024 dan 2025**

Provinsi	Buruh/Karyawan/ Pegawai			Berusaha Dibantu Buruh Tetap			Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap		
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus	Februari	Agustus	Agustus	Februari	Agustus
	2024	2025	2025	2024	2025	2025	2024	2025	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	35,65	30,73	31,64	4,18	4,96	4,45	12,96	16,08	14,38
Sumatera Utara	38,84	37,71	38,42	3,81	4,22	4,33	13,18	16,98	13,59
Sumatera Barat	33,45	31,21	31,64	4,00	4,65	4,02	16,33	18,93	17,34
Riau	42,66	41,58	41,26	7,28	5,63	6,75	9,79	10,91	8,96
Jambi	36,13	38,31	36,14	5,51	7,11	6,58	13,19	13,91	13,59
Sumatera Selatan	35,05	33,20	33,87	2,61	3,54	3,00	17,07	18,10	16,02
Bengkulu	30,04	31,64	30,27	3,95	5,57	4,56	18,26	17,73	18,02
Lampung	27,87	26,92	31,47	2,99	2,48	3,81	18,61	20,38	16,68
Kep. Bangka Belitung	44,30	41,80	43,69	4,56	5,65	5,03	9,00	11,45	8,74
Kepulauan Riau	64,16	63,94	61,87	4,29	3,60	3,89	6,06	6,02	8,12
DKI Jakarta	59,90	58,30	60,12	3,79	3,75	3,25	5,24	6,56	5,86
Jawa Barat	42,34	40,58	42,02	3,27	3,53	3,03	11,29	11,66	11,09
Jawa Tengah	37,40	36,40	37,75	2,96	3,16	3,46	14,52	16,49	14,40
DI Yogyakarta	43,39	42,21	42,52	3,49	4,91	3,51	14,01	16,42	15,68
Jawa Timur	35,38	32,54	34,67	3,12	3,54	3,60	15,72	18,98	15,48
Banten	51,60	50,54	52,37	2,19	2,83	2,51	8,37	10,51	9,57
Bali	46,11	46,09	46,03	3,22	3,48	3,50	13,19	14,16	11,12
Nusa Tenggara Barat	27,16	26,66	28,92	2,33	1,54	2,65	19,78	23,61	17,13
Nusa Tenggara Timur	25,08	24,05	30,00	1,60	1,52	1,56	21,00	25,58	20,69
Kalimantan Barat	40,58	38,09	39,73	3,40	4,47	3,87	13,21	14,87	13,92
Kalimantan Tengah	46,74	44,46	45,84	3,93	3,65	4,01	10,23	14,56	11,39
Kalimantan Selatan	43,36	36,90	42,97	3,08	4,00	3,55	13,01	16,34	12,17
Kalimantan Timur	53,86	49,16	52,84	3,82	3,92	3,95	7,63	10,94	9,72
Kalimantan Utara	46,28	47,20	47,55	3,32	4,34	4,01	12,73	10,62	12,74
Sulawesi Utara	41,35	41,11	42,21	3,18	3,01	3,23	8,62	12,39	11,37
Sulawesi Tengah	31,28	29,45	31,81	3,28	3,90	3,62	16,08	21,53	18,89
Sulawesi Selatan	35,85	33,72	36,12	3,65	3,65	3,42	16,05	19,34	16,61
Sulawesi Tenggara	34,70	33,76	36,19	3,38	3,28	2,68	15,30	18,63	16,75
Gorontalo	35,55	35,14	36,35	3,01	1,91	2,51	13,92	17,86	15,86
Sulawesi Barat	26,08	24,06	26,55	1,84	4,11	2,81	22,11	23,92	20,60
Maluku	33,08	29,67	32,62	1,88	1,92	1,32	13,81	17,13	15,73
Maluku Utara	32,50	36,80	32,92	2,74	2,12	2,57	15,60	19,43	17,21
Papua Barat	35,63	33,17	35,39	1,51	1,64	1,42	16,26	19,42	17,00
Papua Barat Daya	41,61	39,44	42,89	1,44	1,40	1,45	10,65	17,68	15,66
Papua	41,41	36,48	45,08	1,31	1,81	2,04	10,06	17,37	12,55
Papua Selatan	31,71	29,75	32,45	1,45	1,45	1,67	13,75	19,87	19,02
Papua Tengah	12,54	10,78	14,53	0,44	0,71	0,74	22,96	28,82	23,13
Papua Pegunungan	3,98	5,00	4,10	0,26	0,29	0,60	37,04	34,92	31,25
Indonesia	38,80	37,09	38,74	3,24	3,52	3,46	13,83	16,05	13,86

Lanjutan Lampiran 10

Provinsi	Berusaha Sendiri			Pekerja Bebas			Pekerja Keluarga		
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus	Februari	Agustus	Agustus	Februari	Agustus
	2024	2025	2025	2024	2025	2025	2024	2025	2025
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	25,73	21,57	21,81	10,35	12,44	16,19	11,13	14,22	11,53
Sumatera Utara	21,72	19,60	19,51	7,28	7,92	10,10	15,17	13,58	14,05
Sumatera Barat	22,84	19,64	22,11	10,59	10,74	11,56	12,79	14,84	13,33
Riau	21,58	19,68	20,84	7,76	10,82	12,23	10,93	11,37	9,96
Jambi	23,78	18,22	20,71	8,16	10,13	10,54	13,23	12,32	12,44
Sumatera Selatan	22,06	20,04	20,66	5,01	5,51	9,18	18,20	19,61	17,27
Bengkulu	20,73	18,88	19,43	9,69	10,56	11,31	17,33	15,60	16,41
Lampung	21,14	18,44	19,41	11,84	12,01	12,21	17,55	19,77	16,42
Kep. Bangka Belitung	27,42	25,02	27,88	4,81	5,56	5,35	9,91	10,52	9,31
Kepulauan Riau	17,42	16,82	16,50	2,30	4,26	1,85	5,77	5,36	7,77
DKI Jakarta	22,99	23,36	23,63	2,52	2,40	2,25	5,56	5,62	4,89
Jawa Barat	21,61	22,54	23,06	12,41	11,76	11,62	9,08	9,93	9,18
Jawa Tengah	21,76	21,25	21,63	10,55	10,51	10,21	12,81	12,20	12,55
DI Yogyakarta	20,81	18,37	20,65	4,81	5,75	5,17	13,49	12,34	12,47
Jawa Timur	20,31	20,77	20,74	11,11	9,34	11,27	14,36	14,82	14,24
Banten	20,20	14,70	17,74	9,25	12,05	8,56	8,39	9,37	9,25
Bali	18,41	16,96	21,13	6,15	7,90	7,84	12,92	11,40	10,38
Nusa Tenggara Barat	19,49	20,46	21,83	13,65	8,51	13,24	17,59	19,21	16,23
Nusa Tenggara Timur	23,06	17,87	21,76	3,23	3,59	4,35	26,03	27,38	21,64
Kalimantan Barat	22,39	19,57	20,77	6,90	8,97	8,02	13,52	14,03	13,69
Kalimantan Tengah	24,14	19,26	20,81	5,61	4,84	7,26	9,35	13,23	10,69
Kalimantan Selatan	23,84	25,94	25,56	3,47	4,35	4,68	13,24	12,47	11,07
Kalimantan Timur	22,53	21,73	19,41	3,08	3,85	5,09	9,08	10,41	8,99
Kalimantan Utara	20,80	16,80	19,02	4,16	6,76	6,44	12,71	14,28	10,24
Sulawesi Utara	27,40	24,85	24,68	10,69	9,43	10,11	8,76	9,22	8,40
Sulawesi Tengah	24,19	19,01	21,04	8,34	8,95	8,79	16,83	17,17	15,85
Sulawesi Selatan	21,81	19,54	20,94	6,02	5,88	6,86	16,62	17,87	16,05
Sulawesi Tenggara	23,35	21,73	22,05	4,14	4,68	4,96	19,13	17,93	17,37
Gorontalo	26,90	22,46	24,22	8,42	13,00	10,64	12,20	9,63	10,42
Sulawesi Barat	22,48	20,31	22,55	7,39	5,65	7,79	20,10	21,95	19,70
Maluku	30,69	26,19	30,21	3,26	4,61	3,97	17,28	20,48	16,15
Maluku Utara	27,82	22,04	26,70	4,77	3,35	4,19	16,57	16,26	16,41
Papua Barat	23,98	24,32	22,60	3,27	2,03	5,40	19,35	19,41	18,19
Papua Barat Daya	28,42	23,22	23,93	2,78	0,32	2,97	15,10	17,95	13,10
Papua	31,39	23,06	23,97	1,67	3,78	4,08	14,16	17,51	12,28
Papua Selatan	32,50	28,18	26,73	2,10	2,01	3,60	18,49	18,74	16,53
Papua Tengah	33,01	17,24	19,24	1,68	1,07	2,75	29,37	41,39	39,61
Papua Pegunungan	7,82	8,95	11,67	0,18	0,04	0,10	50,72	50,80	52,28
Indonesia	21,78	20,58	21,40	9,01	8,95	9,58	13,34	13,83	12,96

Lampiran 11 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (orang), 2024 dan 2025

Lapangan Pekerjaan Utama	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	40.757.151	41.609.136	41.247.117
Laki-Laki	26.193.887	26.398.887	26.463.807
Perempuan	14.563.264	15.210.249	14.783.310
B. Pertambangan dan Penggalian	1.733.523	1.644.392	1.728.814
Laki-Laki	1.589.520	1.508.828	1.612.373
Perempuan	144.003	135.564	116.441
C. Industri Pengolahan	20.010.758	19.602.200	20.308.685
Laki-Laki	11.109.498	10.987.898	11.204.721
Perempuan	8.901.260	8.614.302	9.103.964
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	355.280	358.781	363.987
Laki-Laki	276.718	278.304	296.194
Perempuan	78.562	80.477	67.793
E. <i>Treatment</i> Air, <i>Treatment</i> Limbah, <i>Treatment</i> dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	556.713	626.518	596.565
Laki-Laki	405.544	480.454	460.447
Perempuan	151.169	146.064	136.118
F. Konstruksi	9.470.763	8.700.181	9.543.258
Laki-Laki	9.237.006	8.535.538	9.204.300
Perempuan	233.757	164.643	338.958
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	27.328.692	28.073.467	27.452.952
Laki-Laki	14.078.360	14.513.119	14.216.082
Perempuan	13.250.332	13.560.348	13.236.870
H. Pengangkutan dan Pergudangan	6.199.637	6.167.623	6.270.920
Laki-Laki	5.856.069	5.743.768	5.941.833
Perempuan	343.568	423.855	329.087
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11.270.801	11.479.960	11.692.579
Laki-Laki	4.535.705	4.644.217	4.709.333
Perempuan	6.735.096	6.835.743	6.983.246

Lanjutan Lampiran 11

Lapangan Pekerjaan Utama	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
J. Informasi dan Komunikasi	1.026.529	1.248.445	1.064.357
Laki-Laki	648.972	866.187	708.193
Perempuan	377.557	382.258	356.164
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.711.261	1.659.648	1.650.077
Laki-Laki	1.064.764	988.170	987.446
Perempuan	646.497	671.478	662.631
L. Real Estat	559.307	498.473	509.154
Laki-Laki	373.061	335.457	355.535
Perempuan	186.246	163.016	153.619
M,N. Aktivitas Profesional dan Perusahaan	2.445.403	2.532.979	2.581.616
Laki-Laki	1.829.960	1.926.703	1.939.799
Perempuan	615.443	606.276	641.817
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5.093.430	5.323.636	5.130.470
Laki-Laki	3.532.718	3.768.081	3.549.034
Perempuan	1.560.712	1.555.555	1.581.436
P. Pendidikan	7.158.071	7.348.363	7.413.725
Laki-Laki	2.595.909	2.571.184	2.671.758
Perempuan	4.562.162	4.777.179	4.741.967
Q. Aktivitas Kesehatan dan Aktivitas Sosial	2.374.984	2.507.242	2.458.567
Laki-Laki	753.696	804.737	766.529
Perempuan	1.621.288	1.702.505	1.692.038
R,S,T,U. Aktivitas Jasa Lainnya	6.589.701	6.390.136	6.529.421
Laki-Laki	3.130.888	3.010.412	2.984.920
Perempuan	3.458.813	3.379.724	3.544.501
Total	144.642.004	145.771.180	146.542.264
Laki-Laki	87.212.275	87.361.944	88.072.304
Perempuan	57.429.729	58.409.236	58.469.960

**Lampiran 12 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin/Daerah Tempat Tinggal (orang),
2024 dan 2025**

Jenis Pekerjaan Utama (1)	2024	2025	
	Agustus (3)	Februari (4)	Agustus (5)
0/1. Tenaga Profesional, Teknisi, dan yang Sejenis	10.617.910	10.709.245	10.989.243
Laki-Laki	4.547.692	4.425.482	4.621.057
Perempuan	6.070.218	6.283.763	6.368.186
Perkotaan	7.537.251	7.742.210	7.991.863
Perdesaan	3.080.659	2.967.035	2.997.380
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	1.816.725	1.711.206	1.745.738
Laki-Laki	1.382.324	1.298.384	1.311.470
Perempuan	434.401	412.822	434.268
Perkotaan	1.397.074	1.294.195	1.319.455
Perdesaan	419.651	417.011	426.283
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	7.916.772	8.236.084	7.759.048
Laki-Laki	4.218.228	4.494.040	4.096.933
Perempuan	3.698.544	3.742.044	3.662.115
Perkotaan	6.188.161	6.445.636	6.096.342
Perdesaan	1.728.611	1.790.448	1.662.706
4. Tenaga Usaha Penjualan	29.815.735	30.802.132	30.227.852
Laki-Laki	13.260.122	13.632.102	13.316.453
Perempuan	16.555.613	17.170.030	16.911.399
Perkotaan	20.607.245	21.896.371	21.445.020
Perdesaan	9.208.490	8.905.761	8.782.832
5. Tenaga Usaha Jasa	9.474.226	8.221.183	9.434.860
Laki-Laki	4.137.466	3.323.890	4.060.718
Perempuan	5.336.760	4.897.293	5.374.142
Perkotaan	6.911.527	6.367.459	7.102.227
Perdesaan	2.562.699	1.853.724	2.332.633
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	39.612.517	40.607.600	39.848.183
Laki-Laki	25.325.601	25.660.952	25.382.443
Perempuan	14.286.916	14.946.648	14.465.740
Perkotaan	10.138.931	9.813.658	11.414.797
Perdesaan	29.473.586	30.793.942	28.433.386
7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar	43.100.267	43.041.936	44.041.500
Laki-Laki	32.115.765	32.166.953	32.843.332
Perempuan	10.984.502	10.874.983	11.198.168
Perkotaan	29.044.054	30.365.498	30.296.506
Perdesaan	14.056.213	12.676.438	13.744.994
X/00. Lainnya	2.287.852	2.441.794	2.495.840
Laki-Laki	2.225.077	2.360.141	2.439.898
Perempuan	62.775	81.653	55.942
Perkotaan	1.840.599	1.984.131	2.018.210
Perdesaan	447.253	457.663	477.630

**Lampiran 13 Indikator Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk
Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2024 dan 2025**

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (orang)			Tingkat Pekerja Paruh Waktu(persen)			Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu(persen)		
	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	699.410	798.348	702.344	27,88	31,24	27,42	54,42	54,76	52,02
Sumatera Utara	1.937.260	1.862.916	1.919.059	25,08	24,20	24,06	56,73	55,83	54,81
Sumatera Barat	727.612	811.434	789.783	24,88	27,25	26,16	55,07	55,79	53,59
Riau	869.509	846.301	840.898	27,52	27,37	26,19	46,67	46,30	43,18
Jambi	468.320	545.070	500.657	25,55	30,28	27,04	49,06	46,88	48,18
Sumatera Selatan	1.248.405	1.367.302	1.310.564	27,87	30,44	29,17	54,41	53,67	51,19
Bengkulu	309.625	324.286	339.202	28,12	29,35	30,41	53,33	50,84	48,20
Lampung	1.429.877	1.521.196	1.471.348	29,87	31,18	30,32	56,70	52,25	51,47
Kep. Bangka Belitung	168.954	178.011	179.292	22,05	23,33	22,82	54,80	56,09	55,41
Kepulauan Riau	144.900	156.288	154.665	13,81	15,37	14,70	60,01	60,27	59,29
DKI Jakarta	708.692	760.249	684.377	13,87	14,80	13,34	66,52	68,12	71,42
Jawa Barat	4.764.987	5.219.860	4.796.143	19,51	20,88	19,57	59,90	59,99	55,12
Jawa Tengah	4.536.207	4.930.458	5.150.839	21,74	23,56	24,19	59,24	58,49	58,98
DI Yogyakarta	553.866	577.517	594.606	25,37	26,63	27,03	61,46	54,80	60,47
Jawa Timur	6.207.040	7.177.107	6.387.955	26,57	30,07	26,84	60,74	60,44	60,26
Banten	892.798	935.693	1.012.361	15,40	16,13	17,59	60,09	61,81	55,66
Bali	617.614	643.178	653.247	23,17	23,87	24,18	56,84	57,09	55,98
Nusa Tenggara Barat	785.963	786.427	827.261	25,31	25,47	26,63	60,44	52,93	59,20
Nusa Tenggara Timur	1.071.856	1.108.911	1.074.809	35,44	37,26	35,96	58,03	58,60	56,02
Kalimantan Barat	825.485	760.027	895.187	28,83	27,23	30,55	54,27	52,13	53,30
Kalimantan Tengah	308.290	393.807	361.600	21,98	27,23	25,51	50,64	53,21	48,08
Kalimantan Selatan	580.657	660.429	610.605	27,27	30,65	28,36	57,44	54,48	55,45
Kalimantan Timur	394.279	407.198	394.369	19,95	20,26	20,02	53,03	54,83	49,46
Kalimantan Utara	86.645	96.494	83.450	22,90	25,70	21,93	47,81	55,09	45,55
Sulawesi Utara	284.851	284.975	310.624	21,81	22,01	23,19	51,90	50,19	50,88
Sulawesi Tengah	372.262	430.993	475.628	23,29	27,01	28,78	55,41	56,44	55,66
Sulawesi Selatan	1.357.310	1.579.963	1.400.634	29,00	34,52	29,43	52,57	49,32	51,28
Sulawesi Tenggara	404.190	427.208	410.523	28,25	30,89	28,63	57,28	59,02	55,78
Gorontalo	132.044	128.751	146.276	20,89	20,93	23,10	57,51	58,16	50,32
Sulawesi Barat	261.375	275.269	279.143	34,50	36,00	34,87	47,99	48,39	50,68
Maluku	219.612	269.830	251.617	24,19	28,96	27,28	56,67	56,25	52,92
Maluku Utara	185.070	149.814	201.239	27,98	22,58	29,88	54,98	63,14	50,43
Papua Barat	76.024	73.138	93.258	26,21	24,78	32,34	55,54	54,74	49,89
Papua Barat Daya	58.636	94.081	63.937	19,69	31,26	21,18	52,99	48,11	52,95
Papua	106.001	121.502	107.987	23,10	25,57	24,88	54,51	52,53	48,16
Papua Selatan	65.314	57.820	58.103	28,83	26,67	26,69	53,48	50,59	53,43
Papua Tengah	297.170	369.566	292.098	38,17	43,95	36,96	49,35	57,18	49,98
Papua Pegunungan	472.216	487.294	470.279	46,83	48,33	45,22	49,28	50,58	49,00
Indonesia	34.630.326	37.618.711	36.295.967	23,94	25,81	24,77	57,52	56,92	55,68

Lampiran 14 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Jumlah Jam Kerja, 2024 dan 2025

Kelompok Umur	2024	2025	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
0 Jam ¹⁾	1,79	1,40	1,42
1–34 Jam	31,94	33,81	32,68
35–48 Jam	39,47	38,93	40,43
49 Jam ke Atas	26,80	25,86	25,47
Laki-Laki	100,00	100,00	100,00
0 Jam ¹⁾	1,75	1,49	1,40
1–34 Jam	25,14	26,91	26,57
35–48 Jam	42,82	42,30	43,53
49 Jam ke Atas	30,29	29,30	28,50
Perempuan	100,00	100,00	100,00
0 Jam ¹⁾	1,86	1,28	1,45
1–34 Jam	42,25	44,13	41,89
35–48 Jam	34,37	33,89	35,75
49 Jam ke Atas	21,52	20,70	20,91
Perkotaan	100,00	100,00	100,00
0 Jam ¹⁾	1,77	1,37	1,39
1–34 Jam	24,90	27,32	26,08
35–48 Jam	44,39	43,43	45,02
49 Jam ke Atas	28,94	27,88	27,51
Perdesaan	100,00	100,00	100,00
0 Jam ¹⁾	1,83	1,44	1,46
1–34 Jam	41,59	43,13	42,52
35–48 Jam	32,71	32,47	33,59
49 Jam ke Atas	23,87	22,96	22,43

Catatan:

¹⁾ Sementara tidak bekerja

**Lampiran 15 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2024 dan 2025**

Provinsi	0 jam ¹⁾			1–34 Jam		
	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2,63	1,42	1,31	41,67	43,68	41,25
Sumatera Utara	1,65	1,10	1,16	33,80	32,76	33,11
Sumatera Barat	1,98	1,30	1,68	35,99	38,49	36,86
Riau	1,55	1,56	1,57	36,65	37,52	35,17
Jambi	1,78	1,98	1,65	33,97	39,26	36,31
Sumatera Selatan	1,65	1,42	1,16	37,69	39,63	38,15
Bengkulu	2,05	1,18	1,87	38,17	38,06	40,12
Lampung	1,46	0,98	1,42	39,50	43,03	41,61
Kep. Bangka Belitung	2,63	1,53	1,69	29,47	29,26	30,20
Kepulauan Riau	1,86	1,24	1,29	17,73	19,67	19,71
DKI Jakarta	0,83	0,39	0,79	17,85	18,79	16,57
Jawa Barat	2,07	1,30	1,40	27,24	28,45	27,92
Jawa Tengah	2,16	2,04	1,68	29,22	30,30	31,19
DI Yogyakarta	2,02	0,95	1,64	30,92	32,83	32,59
Jawa Timur	1,34	1,04	1,21	33,63	37,05	33,40
Banten	1,23	0,80	1,17	22,17	22,68	24,25
Bali	1,42	1,08	1,13	25,52	26,13	26,98
Nusa Tenggara Barat	2,07	1,36	1,53	40,54	45,10	40,57
Nusa Tenggara Timur	1,92	2,10	1,69	50,34	49,94	47,39
Kalimantan Barat	1,49	1,15	1,43	37,08	37,08	38,94
Kalimantan Tengah	1,59	1,42	1,18	27,88	33,17	31,47
Kalimantan Selatan	1,93	1,79	1,37	34,88	39,23	35,75
Kalimantan Timur	1,92	1,45	1,18	24,56	25,94	25,69
Kalimantan Utara	1,76	2,57	1,63	29,63	32,13	26,64
Sulawesi Utara	1,84	2,53	1,93	28,44	31,12	30,96
Sulawesi Tengah	2,38	1,52	1,47	32,18	34,66	36,81
Sulawesi Selatan	2,61	2,55	1,76	36,93	42,56	37,36
Sulawesi Tenggara	1,78	1,89	1,83	36,86	38,93	36,57
Gorontalo	2,22	1,90	1,74	29,38	30,30	29,92
Sulawesi Barat	3,04	1,77	3,04	46,60	50,16	46,20
Maluku	2,33	1,87	3,61	36,32	39,34	38,77
Maluku Utara	2,10	3,50	2,62	37,11	29,62	40,44
Papua Barat	2,01	2,81	2,43	37,11	33,94	42,08
Papua Barat Daya	2,79	2,29	2,10	33,41	37,74	28,67
Papua	1,27	1,92	1,88	31,52	36,15	33,52
Papua Selatan	2,69	1,61	1,53	35,92	33,94	33,14
Papua Tengah	0,68	0,50	0,60	44,00	50,90	53,86
Papua Pegunungan	0,21	0,16	0,16	52,71	57,07	50,59
Indonesia	1,79	1,40	1,42	31,94	33,81	32,68

Catatan:

¹⁾ Sementara tidak bekerja

Lanjutan Lampiran 15

Provinsi	35–48 Jam			49 Jam ke Atas		
	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	34,09	33,85	35,73	21,61	21,05	21,71
Sumatera Utara	39,71	39,30	42,00	24,85	26,84	23,73
Sumatera Barat	36,05	33,26	37,18	25,98	26,95	24,28
Riau	36,63	35,09	36,89	25,17	25,83	26,37
Jambi	39,59	37,05	38,81	24,67	21,70	23,23
Sumatera Selatan	35,58	32,91	35,95	25,08	26,04	24,74
Bengkulu	36,18	38,34	35,80	23,60	22,42	22,21
Lampung	33,63	32,05	32,95	25,42	23,93	24,02
Kep. Bangka Belitung	43,69	41,01	44,67	24,21	28,20	23,44
Kepulauan Riau	48,35	50,73	48,82	32,07	28,36	30,18
DKI Jakarta	53,41	51,76	55,63	27,91	29,06	27,01
Jawa Barat	42,14	41,88	42,66	28,55	28,37	28,02
Jawa Tengah	40,13	40,10	41,06	28,49	27,56	26,07
DI Yogyakarta	40,65	39,30	41,23	26,41	26,92	24,54
Jawa Timur	37,04	37,58	38,70	28,00	24,33	26,69
Banten	50,90	51,35	48,83	25,70	25,17	25,75
Bali	44,31	47,09	46,01	28,76	25,70	25,88
Nusa Tenggara Barat	29,98	28,88	33,16	27,42	24,66	24,74
Nusa Tenggara Timur	30,92	31,10	33,62	16,82	16,86	17,30
Kalimantan Barat	38,84	40,04	38,87	22,59	21,73	20,76
Kalimantan Tengah	40,95	38,06	41,52	29,58	27,35	25,83
Kalimantan Selatan	36,44	34,45	37,81	26,74	24,53	25,07
Kalimantan Timur	40,77	37,09	41,55	32,76	35,52	31,58
Kalimantan Utara	35,50	34,77	38,86	33,12	30,53	32,87
Sulawesi Utara	44,59	41,35	45,38	25,13	25,00	21,73
Sulawesi Tengah	37,75	36,16	38,20	27,69	27,66	23,52
Sulawesi Selatan	33,43	29,94	36,27	27,04	24,95	24,61
Sulawesi Tenggara	32,20	34,02	34,77	29,16	25,17	26,83
Gorontalo	32,90	33,23	34,29	35,50	34,57	34,05
Sulawesi Barat	28,49	26,02	29,28	21,87	22,05	21,48
Maluku	33,04	32,32	34,73	28,31	26,47	22,89
Maluku Utara	35,09	36,59	30,72	25,70	30,29	26,22
Papua Barat	36,79	38,78	36,78	24,09	24,47	18,71
Papua Barat Daya	33,46	33,01	38,76	30,34	26,96	30,47
Papua	42,09	38,61	41,52	25,11	23,32	23,08
Papua Selatan	42,43	37,71	42,17	18,96	26,74	23,16
Papua Tengah	44,17	41,39	35,38	11,15	7,21	10,16
Papua Pegunungan	44,33	40,63	46,85	2,75	2,14	2,40
Indonesia	39,47	38,93	40,43	26,80	25,86	25,47

**Lampiran 16 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Kegiatan Formal/Informal, 2024 dan 2025**

Provinsi	Formal			Informal		
	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	39,83	35,69	36,09	60,17	64,31	63,91
Sumatera Utara	42,65	41,93	42,74	57,35	58,07	57,26
Sumatera Barat	37,45	35,86	35,67	62,55	64,14	64,33
Riau	49,93	47,21	48,00	50,07	52,79	52,00
Jambi	41,65	45,43	42,73	58,35	54,57	57,27
Sumatera Selatan	37,66	36,74	36,87	62,34	63,26	63,13
Bengkulu	33,99	37,22	34,83	66,01	62,78	65,17
Lampung	30,86	29,40	35,28	69,14	70,60	64,72
Kep. Bangka Belitung	48,86	47,45	48,71	51,14	52,55	51,29
Kepulauan Riau	68,45	67,54	65,75	31,55	32,46	34,25
DKI Jakarta	63,69	62,05	63,37	36,31	37,95	36,63
Jawa Barat	45,61	44,11	45,05	54,39	55,89	54,95
Jawa Tengah	40,36	39,55	41,21	59,64	60,45	58,79
DI Yogyakarta	46,88	47,12	46,03	53,12	52,88	53,97
Jawa Timur	38,51	36,09	38,27	61,49	63,91	61,73
Banten	53,79	53,37	54,88	46,21	46,63	45,12
Bali	49,32	49,57	49,53	50,68	50,43	50,47
Nusa Tenggara Barat	29,49	28,20	31,58	70,51	71,80	68,42
Nusa Tenggara Timur	26,68	25,58	31,56	73,32	74,42	68,44
Kalimantan Barat	43,98	42,56	43,61	56,02	57,44	56,39
Kalimantan Tengah	50,67	48,11	49,85	49,33	51,89	50,15
Kalimantan Selatan	46,44	40,90	46,52	53,56	59,10	53,48
Kalimantan Timur	57,68	53,08	56,78	42,32	46,92	43,22
Kalimantan Utara	49,59	51,54	51,56	50,41	48,46	48,44
Sulawesi Utara	44,53	44,12	45,44	55,47	55,88	54,56
Sulawesi Tengah	34,57	33,35	35,43	65,43	66,65	64,57
Sulawesi Selatan	39,50	37,37	39,55	60,50	62,63	60,45
Sulawesi Tenggara	38,08	37,04	38,87	61,92	62,96	61,13
Gorontalo	38,55	37,05	38,86	61,45	62,95	61,14
Sulawesi Barat	27,92	28,17	29,37	72,08	71,83	70,63
Maluku	34,96	31,59	33,94	65,04	68,41	66,06
Maluku Utara	35,24	38,92	35,49	64,76	61,08	64,51
Papua Barat	37,13	34,82	36,81	62,87	65,18	63,19
Papua Barat Daya	43,04	40,83	44,34	56,96	59,17	55,66
Papua	42,72	38,29	47,12	57,28	61,71	52,88
Papua Selatan	33,16	31,20	34,12	66,84	68,80	65,88
Papua Tengah	12,98	11,49	15,28	87,02	88,51	84,72
Papua Pegunungan	4,24	5,29	4,70	95,76	94,71	95,30
Indonesia	42,05	40,60	42,20	57,95	59,40	57,80

**Lampiran 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
dan Jenis Kelamin (persen), 2024 dan 2025**

Provinsi	Agustus 2024			Februari 2025			Agustus 2025		
	Laki-Laki	Pe-rem-puan	Total	Laki-Laki	Pe-rem-puan	Total	Laki-Laki	Pe-rem-puan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	4,71	7,43	5,75	6,49	3,91	5,50	4,48	7,52	5,64
Sumatera Utara	5,42	5,85	5,60	4,86	5,32	5,05	5,05	5,70	5,32
Sumatera Barat	4,90	6,97	5,75	5,65	5,74	5,69	5,18	6,24	5,62
Riau	3,21	4,62	3,70	3,86	4,66	4,12	3,81	4,80	4,16
Jambi	2,68	7,62	4,48	4,98	3,58	4,48	4,04	4,63	4,26
Sumatera Selatan	3,75	4,02	3,86	3,93	3,83	3,89	3,56	3,91	3,69
Bengkulu	2,93	3,38	3,11	3,21	3,28	3,24	3,01	4,02	3,41
Lampung	3,62	5,12	4,19	3,47	5,07	4,07	3,72	5,03	4,21
Kep. Bangka Belitung	3,96	5,84	4,63	3,48	5,47	4,17	3,74	5,68	4,45
Kepulauan Riau	6,02	7,00	6,39	6,40	7,70	6,89	6,40	6,54	6,45
DKI Jakarta	6,23	6,17	6,21	6,77	5,29	6,18	6,21	5,79	6,05
Jawa Barat	7,12	6,13	6,75	7,11	6,14	6,74	6,92	6,51	6,77
Jawa Tengah	4,83	4,71	4,78	4,66	3,87	4,33	4,82	4,43	4,66
DI Yogyakarta	4,06	2,78	3,48	3,05	3,34	3,18	3,88	2,94	3,46
Jawa Timur	4,46	3,80	4,19	4,05	3,03	3,61	3,90	3,86	3,88
Banten	6,38	7,20	6,68	6,65	6,63	6,64	6,45	7,12	6,69
Bali	1,94	1,62	1,79	1,74	1,39	1,58	1,51	1,48	1,49
Nusa Tenggara Barat	2,83	2,60	2,73	3,37	3,02	3,22	3,31	2,72	3,06
Nusa Tenggara Timur	2,91	3,16	3,02	3,68	2,71	3,23	3,21	3,43	3,31
Kalimantan Barat	5,07	4,50	4,86	4,60	3,60	4,23	5,02	4,48	4,82
Kalimantan Tengah	3,30	5,35	4,01	3,47	3,48	3,47	3,71	4,43	3,97
Kalimantan Selatan	4,55	3,65	4,20	4,03	3,81	3,94	4,44	3,72	4,16
Kalimantan Timur	4,72	5,91	5,14	4,88	6,17	5,33	5,21	5,13	5,18
Kalimantan Utara	4,00	3,70	3,90	4,88	2,26	3,90	3,54	4,41	3,85
Sulawesi Utara	5,29	6,81	5,85	5,11	7,68	6,03	5,23	7,31	5,99
Sulawesi Tengah	2,60	3,50	2,94	2,34	4,14	3,02	2,69	3,29	2,92
Sulawesi Selatan	3,76	4,85	4,19	5,40	4,26	4,96	4,39	3,92	4,21
Sulawesi Tenggara	2,52	3,90	3,09	2,81	3,96	3,27	2,85	3,98	3,31
Gorontalo	2,63	3,90	3,13	2,92	3,44	3,12	3,30	3,61	3,42
Sulawesi Barat	2,04	3,69	2,68	2,15	4,73	3,17	2,40	3,56	2,86
Maluku	6,05	6,20	6,11	5,52	6,54	5,95	5,90	6,80	6,27
Maluku Utara	3,92	4,20	4,03	3,79	5,03	4,26	4,19	5,15	4,55
Papua Barat	4,06	4,25	4,13	4,18	4,25	4,21	4,94	3,96	4,55
Papua Barat Daya	5,65	7,81	6,48	6,57	6,68	6,61	5,87	8,44	6,85
Papua	5,72	7,68	6,48	7,32	6,28	6,92	6,51	7,72	6,96
Papua Selatan	3,53	4,84	4,05	4,28	5,91	4,90	4,59	3,17	4,04
Papua Tengah	2,68	2,87	2,75	4,14	2,71	3,55	3,69	3,54	3,62
Papua Pegunungan	1,43	1,18	1,32	1,94	1,36	1,68	1,55	1,84	1,68
Indonesia	4,90	4,92	4,91	4,98	4,41	4,76	4,85	4,84	4,85

**Lampiran 18 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
dan Tingkat Pendidikan (persen), 2024 dan 2025**

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus	Februari	Agustus	Agustus	Februari	Agustus
	2024	2025	2025	2024	2025	2025	2024	2025	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	3,26	2,32	3,56	8,23	8,35	7,63	6,12	6,87	5,87
Sumatera Utara	3,77	2,51	2,95	7,38	6,45	6,97	5,28	7,90	6,69
Sumatera Barat	3,26	3,01	3,48	8,44	7,02	7,18	6,88	9,71	7,86
Riau	1,45	3,00	2,16	5,87	5,64	6,49	4,86	3,58	3,66
Jambi	2,78	1,94	1,88	6,55	7,26	6,94	5,95	5,64	5,82
Sumatera Selatan	1,47	1,25	1,46	6,83	7,12	6,47	6,49	7,00	5,44
Bengkulu	1,54	1,82	1,95	4,47	4,48	4,70	4,98	4,70	4,88
Lampung	2,57	2,93	2,33	7,05	6,53	7,06	4,35	3,60	5,54
Kep. Bangka Belitung	3,01	3,05	2,85	6,96	5,31	5,47	4,71	5,87	7,60
Kepulauan Riau	5,78	5,76	3,17	7,41	7,85	8,95	4,58	6,33	4,69
DKI Jakarta	4,54	3,11	4,03	7,58	8,92	6,97	4,95	4,26	6,06
Jawa Barat	3,94	3,78	3,91	11,37	10,73	11,31	5,57	8,69	5,19
Jawa Tengah	3,10	3,68	2,85	8,06	5,54	7,98	5,21	4,83	5,01
DI Yogyakarta	1,87	2,80	2,06	4,75	3,61	4,06	4,09	3,13	5,26
Jawa Timur	2,60	2,50	2,51	6,74	4,98	6,21	5,18	5,58	3,97
Banten	4,23	5,10	4,50	10,34	9,19	9,49	4,96	4,72	5,49
Bali	1,32	0,61	0,75	2,23	1,95	1,82	2,05	2,91	2,47
Nusa Tenggara Barat	1,76	2,46	2,15	4,37	4,09	4,24	3,14	4,11	3,91
Nusa Tenggara Timur	1,26	1,10	1,20	5,44	5,96	5,29	4,96	6,22	5,92
Kalimantan Barat	3,51	3,43	2,90	7,22	5,14	7,97	5,70	5,93	5,35
Kalimantan Tengah	2,37	2,01	2,80	6,80	5,72	5,49	3,87	3,67	4,48
Kalimantan Selatan	2,93	3,55	2,91	6,65	5,62	6,24	3,46	1,72	3,91
Kalimantan Timur	3,09	4,42	2,88	6,85	6,84	6,88	5,13	3,22	5,43
Kalimantan Utara	1,82	2,06	2,31	6,13	5,28	5,19	4,83	5,40	4,95
Sulawesi Utara	2,18	2,36	2,25	8,98	8,44	9,00	7,16	9,75	7,73
Sulawesi Tengah	1,89	1,47	1,39	4,73	5,30	4,84	2,74	3,29	3,61
Sulawesi Selatan	1,88	2,74	1,44	6,30	7,37	6,92	6,65	6,54	6,33
Sulawesi Tenggara	1,35	1,18	1,77	4,35	3,87	4,47	4,93	7,03	4,54
Gorontalo	1,29	1,59	1,28	6,54	5,29	6,63	3,49	4,96	4,87
Sulawesi Barat	1,76	2,81	1,46	4,58	3,27	4,79	2,58	4,21	4,16
Maluku	3,28	2,97	3,20	8,70	6,22	8,31	6,81	12,62	7,61
Maluku Utara	1,71	2,16	2,42	6,64	7,00	7,15	4,73	3,22	4,12
Papua Barat	3,12	1,20	2,95	6,00	9,28	7,00	3,35	2,94	3,45
Papua Barat Daya	3,16	1,09	3,75	9,48	10,91	9,50	6,85	8,57	6,04
Papua	4,36	4,36	4,26	8,10	9,88	9,31	6,54	5,97	5,92
Papua Selatan	3,14	3,82	3,02	6,24	7,01	5,14	3,77	5,81	5,67
Papua Tengah	1,57	1,89	2,99	6,09	10,12	6,46	7,77	8,90	2,74
Papua Pegunungan	0,86	1,75	1,67	2,99	1,37	1,64	5,86	0,93	1,99
Indonesia	2,91	3,00	2,81	7,80	6,99	7,58	5,18	5,97	5,21

Lampiran 19 Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2024 dan 2025

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	24,04	18,03	25,83	57,20	58,73	55,13	18,76	23,24	19,04
Sumatera Utara	27,88	20,45	22,17	58,97	56,40	60,24	13,15	23,15	17,59
Sumatera Barat	26,63	24,23	28,18	52,68	43,53	47,15	20,69	32,25	24,67
Riau	17,87	32,90	22,95	62,35	53,39	63,85	19,78	13,71	13,20
Jambi	32,66	20,46	22,05	50,28	58,86	59,10	17,07	20,68	18,85
Sumatera Selatan	20,85	17,65	20,95	59,97	60,87	62,00	19,19	21,48	17,05
Bengkulu	24,56	27,13	27,53	47,34	45,25	46,17	28,10	27,62	26,30
Lampung	35,76	43,73	31,56	54,54	48,06	55,18	9,70	8,21	13,26
Kep. Bangka Belitung	33,57	38,97	32,17	53,37	43,88	44,00	13,06	17,15	23,83
Kepulauan Riau	26,24	25,10	14,69	59,81	54,62	72,23	13,95	20,28	13,08
DKI Jakarta	19,87	15,40	15,98	63,52	70,30	60,07	16,61	14,30	23,95
Jawa Barat	31,07	30,37	30,24	59,59	55,37	61,35	9,34	14,26	8,41
Jawa Tengah	39,35	52,15	36,20	50,47	37,58	53,47	10,18	10,27	10,33
DI Yogyakarta	21,47	37,06	24,54	57,11	44,10	48,14	21,42	18,84	27,32
Jawa Timur	35,86	39,97	36,56	50,68	42,78	52,54	13,46	17,25	10,90
Banten	30,88	38,04	31,45	59,72	53,68	58,77	9,40	8,28	9,78
Bali	32,72	16,00	20,88	46,85	48,62	48,46	20,43	35,38	30,66
Nusa Tenggara Barat	36,70	41,15	38,39	47,75	40,61	44,12	15,55	18,24	17,49
Nusa Tenggara Timur	23,50	19,55	18,59	50,18	51,47	47,23	26,31	28,98	34,18
Kalimantan Barat	42,53	47,46	33,83	43,76	34,88	52,89	13,71	17,66	13,28
Kalimantan Tengah	31,64	30,91	36,10	54,92	55,46	48,08	13,44	13,63	15,82
Kalimantan Selatan	37,80	50,31	36,73	50,86	43,92	49,95	11,35	5,77	13,32
Kalimantan Timur	22,92	30,54	19,77	60,47	59,11	60,58	16,61	10,35	19,65
Kalimantan Utara	21,61	23,08	27,10	56,14	47,64	48,70	22,25	29,28	24,20
Sulawesi Utara	15,41	16,97	15,56	63,85	55,17	63,72	20,74	27,86	20,72
Sulawesi Tengah	34,28	25,63	23,85	52,95	59,81	56,60	12,77	14,55	19,55
Sulawesi Selatan	21,97	27,13	16,25	49,34	49,88	56,34	28,69	22,99	27,41
Sulawesi Tenggara	20,15	16,42	23,07	48,24	41,10	48,31	31,60	42,48	28,62
Gorontalo	23,57	29,22	20,40	61,82	47,52	56,63	14,60	23,25	22,97
Sulawesi Barat	36,92	48,63	27,86	47,92	29,88	49,24	15,16	21,49	22,90
Maluku	21,91	21,51	18,98	56,18	40,82	57,08	21,91	37,66	23,94
Maluku Utara	19,73	22,45	23,68	60,34	65,71	61,52	19,93	11,84	14,80
Papua Barat	37,58	14,48	29,14	49,24	74,91	57,48	13,17	10,61	13,38
Papua Barat Daya	19,11	6,44	18,15	59,69	68,49	63,07	21,20	25,07	18,78
Papua	23,62	23,11	19,15	56,35	56,22	61,49	20,03	20,68	19,36
Papua Selatan	47,80	47,96	41,78	41,35	37,35	37,35	10,84	14,69	20,87
Papua Tengah	43,22	42,17	63,15	41,48	48,15	33,17	15,30	9,68	3,68
Papua Pegunungan	54,68	89,06	86,16	29,32	8,92	10,99	16,00	2,02	2,85
Indonesia	31,06	33,29	29,40	55,37	50,39	56,52	13,57	16,32	14,08

**Lampiran 20 Persentase Setengah Pengangguran Menurut Provinsi
dan Tingkat Pendidikan, 2024 dan 2025**

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	41,25	39,63	44,48	44,31	41,38	42,90	14,44	18,99	12,62
Sumatera Utara	41,12	40,97	41,50	49,19	49,40	48,27	9,69	9,63	10,23
Sumatera Barat	51,64	50,38	48,42	38,97	37,72	39,34	9,39	11,90	12,24
Riau	52,21	50,90	48,56	40,97	39,27	41,42	6,82	9,83	10,02
Jambi	54,60	53,32	58,71	33,76	35,94	33,20	11,64	10,74	8,09
Sumatera Selatan	55,45	51,64	53,63	38,47	37,61	40,22	6,08	10,75	6,15
Bengkulu	56,23	51,51	50,20	34,24	36,24	38,75	9,53	12,25	11,05
Lampung	58,50	63,65	61,48	35,50	31,85	31,87	6,00	4,50	6,65
Kep. Bangka Belitung	62,35	51,89	54,58	30,01	36,19	37,45	7,64	11,92	7,97
Kepulauan Riau	37,11	38,85	32,74	52,50	42,53	54,00	10,39	18,62	13,26
DKI Jakarta	31,98	31,75	23,37	53,17	61,07	58,81	14,85	7,18	17,82
Jawa Barat	64,74	62,71	61,39	29,54	32,21	31,63	5,72	5,08	6,98
Jawa Tengah	67,62	69,94	70,88	28,03	23,32	24,06	4,35	6,74	5,06
DI Yogyakarta	45,15	50,69	41,85	42,49	35,58	42,96	12,36	13,73	15,19
Jawa Timur	63,18	61,04	64,05	29,44	31,63	27,74	7,38	7,33	8,21
Banten	63,16	65,28	60,79	32,17	33,08	33,70	4,67	1,64	5,51
Bali	42,89	52,89	43,76	44,79	37,24	41,85	12,32	9,87	14,39
Nusa Tenggara Barat	56,08	63,06	57,49	34,98	27,58	33,31	8,94	9,36	9,20
Nusa Tenggara Timur	53,58	52,79	51,52	34,87	35,10	35,36	11,55	12,11	13,12
Kalimantan Barat	66,59	67,45	57,58	27,68	26,15	34,95	5,73	6,40	7,47
Kalimantan Tengah	57,06	57,24	60,82	35,72	37,75	33,70	7,22	5,01	5,48
Kalimantan Selatan	60,14	61,01	55,26	33,59	30,31	36,05	6,27	8,68	8,69
Kalimantan Timur	38,49	48,21	44,86	52,02	36,26	44,57	9,49	15,53	10,57
Kalimantan Utara	41,18	51,62	44,81	41,47	44,94	38,12	17,35	3,44	17,07
Sulawesi Utara	45,48	51,64	48,36	42,78	39,08	41,13	11,74	9,28	10,51
Sulawesi Tengah	55,46	50,26	54,55	36,53	41,28	37,63	8,01	8,46	7,82
Sulawesi Selatan	51,68	49,81	46,00	36,72	36,55	39,79	11,60	13,64	14,21
Sulawesi Tenggara	40,91	44,27	38,21	44,30	40,23	44,85	14,79	15,50	16,94
Gorontalo	59,70	57,63	55,89	32,36	32,54	35,39	7,94	9,83	8,72
Sulawesi Barat	53,06	54,56	52,90	34,85	33,59	35,68	12,09	11,85	11,42
Maluku	38,62	38,03	35,06	48,79	48,97	52,83	12,59	13,00	12,11
Maluku Utara	43,18	36,58	43,01	44,88	54,58	46,98	11,94	8,84	10,01
Papua Barat	55,62	62,10	52,22	35,30	31,02	41,69	9,08	6,88	6,09
Papua Barat Daya	49,33	35,41	41,19	36,53	53,51	42,06	14,14	11,08	16,75
Papua	44,87	40,65	38,49	46,15	44,86	53,32	8,98	14,49	8,19
Papua Selatan	65,07	64,86	77,06	29,41	26,25	20,97	5,52	8,89	1,97
Papua Tengah	76,70	75,99	86,58	19,33	21,95	11,81	3,97	2,06	1,61
Papua Pegunungan	74,50	88,73	84,65	20,80	7,81	13,81	4,70	3,46	1,54
Indonesia	57,68	57,93	57,21	34,54	33,79	34,27	7,78	8,28	8,52

Lampiran 21 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (orang), 2024 dan 2025

Provinsi	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1.425.847	1.416.236	1.441.426
Sumatera Utara	3.283.457	3.452.818	3.228.835
Sumatera Barat	1.312.051	1.293.267	1.284.826
Riau	1.665.475	1.761.278	1.683.958
Jambi	867.765	923.641	894.789
Sumatera Selatan	1.919.924	1.950.469	2.010.824
Bengkulu	448.428	455.150	454.040
Lampung	2.099.469	2.061.133	2.125.987
Kep. Bangka Belitung	363.070	380.380	362.836
Kepulauan Riau	499.541	541.556	523.683
DKI Jakarta	2.919.060	2.897.460	2.971.824
Jawa Barat	12.485.056	12.092.105	12.950.911
Jawa Tengah	7.803.338	8.019.486	7.700.889
DI Yogyakarta	762.623	798.202	770.312
Jawa Timur	8.811.370	8.587.202	8.710.686
Banten	3.175.592	3.227.337	3.371.542
Bali	805.789	799.039	804.799
Nusa Tenggara Barat	941.220	980.121	1.005.921
Nusa Tenggara Timur	905.501	981.579	1.000.420
Kalimantan Barat	1.263.087	1.394.338	1.263.376
Kalimantan Tengah	665.403	645.253	681.956
Kalimantan Selatan	942.544	942.616	965.918
Kalimantan Timur	1.022.837	1.074.137	1.042.699
Kalimantan Utara	165.919	173.989	173.323
Sulawesi Utara	712.143	732.201	695.194
Sulawesi Tengah	669.518	687.949	648.919
Sulawesi Selatan	2.365.696	2.481.801	2.375.463
Sulawesi Tenggara	551.318	619.497	586.187
Gorontalo	280.338	305.450	290.618
Sulawesi Barat	311.728	309.967	285.727
Maluku	486.673	475.594	492.188
Maluku Utara	307.807	311.570	308.648
Papua Barat	122.103	123.150	132.261
Papua Barat Daya	151.140	150.630	151.814
Papua	226.633	214.863	262.581
Papua Selatan	93.357	106.574	109.876
Papua Tengah	294.236	232.191	289.758
Papua Pegunungan	136.509	136.281	109.029
Indonesia	63.263.565	63.736.510	64.164.043

**Lampiran 22 Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi
dan Jenis Kelamin (persen), 2024 dan 2025**

Provinsi	Agustus 2024			Februari 2025			Agustus 2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	19,32	50,38	34,89	18,71	49,96	34,37	19,32	49,99	34,68
Sumatera Utara	15,75	41,46	28,64	16,22	43,43	29,87	15,15	40,20	27,71
Sumatera Barat	17,25	42,25	29,72	17,94	40,22	29,05	16,79	40,60	28,66
Riau	15,20	52,95	33,67	15,28	56,22	35,32	15,32	52,32	33,45
Jambi	13,96	48,83	31,13	14,57	51,78	32,89	14,40	49,37	31,63
Sumatera Selatan	14,21	44,65	29,18	15,15	44,21	29,44	15,18	45,54	30,12
Bengkulu	14,90	42,26	28,29	15,55	42,00	28,50	15,16	41,83	28,22
Lampung	14,39	45,42	29,59	12,62	45,72	28,84	13,60	46,15	29,56
Kep. Bangka Belitung	13,80	49,43	31,13	14,02	51,65	32,33	14,14	47,98	30,62
Kepulauan Riau	14,27	47,85	30,83	17,74	48,99	33,16	16,06	47,88	31,77
DKI Jakarta	20,05	49,76	34,90	21,52	47,67	34,60	20,34	50,06	35,25
Jawa Barat	15,49	49,41	32,29	14,93	47,55	31,09	15,59	50,73	33,01
Jawa Tengah	14,34	38,18	26,26	15,02	38,63	26,83	14,64	36,63	25,64
DI Yogyakarta	16,73	33,41	25,22	17,13	35,08	26,27	16,10	34,09	25,26
Jawa Timur	13,48	39,36	26,55	14,09	37,19	25,75	14,11	37,71	26,02
Banten	17,05	51,10	33,83	15,89	53,01	34,18	18,04	53,13	35,34
Bali	16,23	29,51	22,89	16,55	28,61	22,60	16,16	29,16	22,69
Nusa Tenggara Barat	13,53	31,96	22,77	13,59	33,37	23,50	13,45	34,31	23,89
Nusa Tenggara Timur	15,30	29,60	22,50	18,58	29,73	24,19	17,48	31,32	24,45
Kalimantan Barat	13,95	46,05	29,56	16,95	48,62	32,36	14,68	44,30	29,10
Kalimantan Tengah	13,50	50,40	31,29	14,11	47,26	30,10	14,74	49,66	31,60
Kalimantan Selatan	15,29	44,48	29,78	15,05	44,34	29,59	15,52	44,82	30,07
Kalimantan Timur	16,25	50,93	32,93	17,12	51,36	33,60	16,86	51,28	33,42
Kalimantan Utara	13,49	47,86	29,65	18,28	44,90	30,81	15,05	47,74	30,45
Sulawesi Utara	18,09	50,41	33,93	17,80	52,28	34,70	16,74	49,49	32,79
Sulawesi Tengah	14,06	44,53	28,90	14,35	45,45	29,49	13,98	41,95	27,60
Sulawesi Selatan	17,48	47,32	32,62	18,26	49,28	34,01	17,20	47,05	32,35
Sulawesi Tenggara	14,97	39,70	27,19	16,81	43,99	30,23	16,44	40,51	28,33
Gorontalo	15,50	44,77	30,05	17,34	47,77	32,48	14,70	46,88	30,71
Sulawesi Barat	14,05	43,54	28,60	14,25	42,50	28,19	12,53	39,32	25,75
Maluku	23,38	43,75	33,48	22,93	42,10	32,44	22,55	44,29	33,34
Maluku Utara	17,60	45,02	30,87	16,72	46,26	31,01	16,15	45,71	30,43
Papua Barat	18,58	40,20	28,75	20,75	37,38	28,55	19,97	42,27	30,45
Papua Barat Daya	20,36	45,28	32,19	17,31	47,89	31,86	19,65	45,37	31,90
Papua	20,99	43,55	31,60	18,61	42,00	29,62	24,03	49,46	36,02
Papua Selatan	17,61	40,30	28,33	19,88	45,14	31,85	21,76	44,68	32,63
Papua Tengah	14,97	40,68	26,87	14,00	29,24	21,03	19,42	33,91	26,11
Papua Pegunungan	9,63	14,29	11,78	9,01	14,90	11,73	7,13	11,92	9,34
Indonesia	15,34	43,58	29,37	15,66	43,30	29,40	15,60	43,37	29,41

**Lampiran 23 Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi
dan Tingkat Pendidikan, 2024 dan 2025**

Provinsi	Pendidikan Rendah (Dasar ke Bawah)			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	42,43	42,68	40,91	39,96	38,71	40,77	17,61	18,62	18,32
Sumatera Utara	41,33	41,10	40,02	44,72	44,10	45,98	13,94	14,80	14,00
Sumatera Barat	46,89	45,81	45,49	35,84	35,29	36,87	17,27	18,90	17,64
Riau	45,67	45,16	44,17	39,29	39,04	40,85	15,04	15,80	14,98
Jambi	52,70	47,25	49,97	34,43	36,33	36,25	12,86	16,43	13,78
Sumatera Selatan	54,73	54,83	52,99	33,87	33,24	35,42	11,40	11,93	11,59
Bengkulu	49,53	48,30	48,13	32,92	32,69	33,50	17,56	19,02	18,37
Lampung	58,29	60,79	57,05	32,36	29,95	32,89	9,34	9,26	10,06
Kep. Bangka Belitung	51,64	53,33	50,28	35,51	34,48	35,77	12,84	12,19	13,95
Kepulauan Riau	28,99	30,00	29,95	51,55	47,92	52,12	19,47	22,08	18,01
DKI Jakarta	27,13	30,56	23,97	52,03	48,72	52,11	20,84	20,72	23,91
Jawa Barat	53,30	54,15	52,32	35,38	34,79	36,72	11,32	11,06	10,96
Jawa Tengah	60,71	61,40	59,19	29,94	29,40	31,21	9,35	9,21	9,60
DI Yogyakarta	39,95	42,00	41,07	41,85	38,87	40,98	18,20	19,13	17,95
Jawa Timur	57,65	57,77	56,54	31,46	31,05	32,81	10,89	11,18	10,65
Banten	48,78	49,56	46,69	38,57	38,78	41,40	12,65	11,66	11,91
Bali	44,52	41,63	41,58	37,65	39,20	39,84	17,83	19,17	18,58
Nusa Tenggara Barat	56,72	53,83	54,50	29,79	31,91	31,82	13,49	14,26	13,68
Nusa Tenggara Timur	56,13	57,10	51,29	27,86	27,85	29,58	16,01	15,05	19,13
Kalimantan Barat	58,87	58,66	56,08	29,44	28,74	31,95	11,69	12,61	11,97
Kalimantan Tengah	53,64	53,40	51,23	32,43	33,70	34,76	13,93	12,90	14,01
Kalimantan Selatan	54,16	55,95	52,53	32,08	30,83	33,31	13,76	13,22	14,16
Kalimantan Timur	38,03	36,80	35,62	45,32	46,07	45,63	16,65	17,13	18,75
Kalimantan Utara	46,36	43,71	45,12	35,67	35,16	36,08	17,96	21,13	18,80
Sulawesi Utara	41,44	43,32	41,50	41,60	39,45	42,44	16,96	17,24	16,06
Sulawesi Tengah	53,35	52,65	50,04	32,93	34,00	34,17	13,72	13,35	15,79
Sulawesi Selatan	49,09	49,01	47,52	32,84	33,57	34,26	18,07	17,42	18,22
Sulawesi Tenggara	45,99	45,52	43,29	34,22	34,74	35,82	19,79	19,73	20,89
Gorontalo	57,34	57,34	54,68	29,56	28,04	29,19	13,09	14,62	16,13
Sulawesi Barat	56,15	54,86	54,83	28,06	28,97	29,42	15,78	16,17	15,75
Maluku	40,87	43,17	37,15	39,47	39,07	43,12	19,66	17,76	19,73
Maluku Utara	46,50	44,35	44,50	36,55	39,97	39,14	16,95	15,68	16,36
Papua Barat	49,78	50,87	44,98	33,96	33,96	37,38	16,26	15,17	17,64
Papua Barat Daya	39,15	39,19	33,20	40,79	41,49	45,50	20,06	19,32	21,30
Papua	35,10	36,69	31,26	45,08	39,37	45,96	19,82	23,95	22,78
Papua Selatan	61,54	61,47	55,78	26,81	26,13	29,36	11,65	12,40	14,86
Papua Tengah	75,82	79,24	76,53	18,76	16,90	18,61	5,42	3,86	4,86
Papua Pegunungan	83,44	85,38	86,37	12,96	10,98	11,23	3,60	3,65	2,40
Indonesia	52,32	52,72	50,77	34,82	34,28	36,12	12,86	13,00	13,11

**Lampiran 24 Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah), 2024 dan 2025**

Provinsi	Agustus 2024			Februari 2025			Agustus 2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2.827.592	2.258.007	2.624.922	3.305.886	2.255.295	2.884.151	3.112.620	2.433.968	2.837.520
Sumatera Utara	3.028.095	2.275.569	2.760.361	2.914.514	2.185.999	2.647.529	3.076.927	2.344.533	2.815.066
Sumatera Barat	2.912.474	2.559.936	2.772.393	3.039.808	2.561.524	2.831.404	3.079.380	2.678.446	2.911.450
Riau	3.423.597	2.513.811	3.139.242	3.288.075	2.625.959	3.083.274	3.423.937	2.598.906	3.144.261
Jambi	3.059.090	2.335.468	2.831.081	2.997.143	2.396.489	2.789.581	3.287.658	2.382.430	2.975.646
Sumatera Selatan	3.124.456	2.394.279	2.886.117	3.016.102	2.152.380	2.727.684	3.272.078	2.513.026	3.015.055
Bengkulu	3.119.889	2.444.814	2.839.093	2.876.880	2.162.773	2.566.215	3.133.254	2.657.569	2.935.681
Lampung	2.730.693	2.109.143	2.517.788	2.502.261	1.970.413	2.320.932	2.731.463	2.129.859	2.520.619
Kep. Bangka Belitung	3.478.641	2.843.765	3.264.692	3.549.185	2.400.693	3.155.887	3.514.222	2.617.620	3.202.690
Kepulauan Riau	5.343.927	4.044.270	4.911.036	5.085.735	4.116.308	4.741.492	5.103.744	4.106.063	4.768.990
DKI Jakarta	6.178.654	5.180.457	5.806.940	4.786.751	5.032.314	4.878.942	6.053.768	5.663.006	5.903.603
Jawa Barat	3.995.333	3.297.625	3.774.498	3.480.171	2.796.490	3.258.613	4.013.211	3.263.406	3.768.080
Jawa Tengah	2.632.704	2.058.751	2.405.447	2.701.202	2.028.991	2.441.045	2.765.421	2.153.034	2.528.470
DI Yogyakarta	3.065.829	2.501.080	2.829.890	2.994.180	2.808.424	2.914.645	3.100.764	2.649.731	2.924.613
Jawa Timur	2.981.135	2.246.451	2.713.383	2.946.451	2.082.429	2.625.050	3.191.937	2.380.508	2.899.074
Banten	4.623.004	3.902.074	4.392.768	4.611.869	3.325.040	4.168.622	4.256.479	3.654.256	4.062.488
Bali	3.751.516	2.895.372	3.403.265	4.115.466	2.964.431	3.617.339	4.084.855	2.973.875	3.639.413
Nusa Tenggara Barat	2.671.849	1.857.237	2.365.102	2.676.817	1.871.905	2.377.411	2.831.927	2.119.129	2.569.181
Nusa Tenggara Timur	2.440.226	2.266.480	2.370.111	2.419.258	2.243.829	2.341.352	2.718.217	2.609.130	2.674.136
Kalimantan Barat	3.132.309	2.376.379	2.904.061	3.031.662	2.381.839	2.829.690	3.195.756	2.469.814	2.972.111
Kalimantan Tengah	3.619.914	2.840.292	3.384.610	3.514.338	2.692.310	3.265.545	3.702.880	2.876.780	3.451.676
Kalimantan Selatan	3.570.851	2.547.745	3.239.646	3.622.703	2.525.848	3.269.734	3.499.340	2.474.152	3.164.480
Kalimantan Timur	4.811.259	3.434.257	4.400.771	4.857.724	3.457.796	4.439.658	4.873.036	3.587.114	4.475.944
Kalimantan Utara	4.028.162	3.128.976	3.748.909	4.756.338	3.553.929	4.355.707	3.917.087	3.145.729	3.675.921
Sulawesi Utara	3.704.657	3.054.077	3.453.051	3.399.894	3.218.117	3.332.950	3.592.613	3.108.561	3.420.935
Sulawesi Tengah	3.100.536	2.462.692	2.863.721	3.383.832	2.619.194	3.077.492	3.313.280	2.647.038	3.056.120
Sulawesi Selatan	3.296.326	2.476.917	2.992.571	3.372.253	2.317.411	2.956.256	3.329.378	2.615.502	3.060.385
Sulawesi Tenggara	3.265.435	2.426.168	2.954.690	3.239.556	2.424.671	2.928.215	3.463.352	2.748.755	3.189.724
Gorontalo	2.722.148	2.438.096	2.605.876	2.813.230	2.110.199	2.506.904	3.115.666	2.633.079	2.911.813
Sulawesi Barat	2.688.892	2.091.027	2.443.110	2.930.437	2.114.287	2.608.578	2.935.036	2.347.160	2.698.528
Maluku	3.140.612	2.586.017	2.925.208	3.172.579	2.401.315	2.866.807	3.294.034	2.809.255	3.100.805
Maluku Utara	3.739.988	2.950.785	3.456.786	4.112.136	2.873.380	3.666.126	3.891.141	3.145.107	3.620.219
Papua Barat	3.511.193	3.127.266	3.392.758	3.664.911	3.027.424	3.459.119	3.897.644	3.501.220	3.765.973
Papua Barat Daya	3.948.845	3.254.630	3.739.328	3.894.183	2.971.364	3.644.386	4.082.049	3.368.008	3.837.947
Papua	4.340.525	3.753.226	4.151.674	4.031.020	3.891.052	3.984.589	4.565.318	4.136.804	4.426.645
Papua Selatan	3.781.521	3.324.293	3.639.485	4.266.965	2.985.829	3.865.415	4.330.586	4.128.303	4.264.963
Papua Tengah	5.526.979	3.857.798	5.071.157	5.344.993	2.743.640	4.747.826	5.294.693	3.601.666	4.808.336
Papua Pegunungan	4.038.643	4.269.348	4.089.877	4.264.277	3.757.582	4.133.474	4.104.199	3.404.784	3.941.546
Indonesia	3.541.231	2.766.149	3.267.618	3.367.566	2.612.012	3.094.818	3.590.945	2.863.168	3.331.012

**Lampiran 25 Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal (rupiah), 2024 dan 2025**

Provinsi	Agustus 2024			Februari 2025			Agustus 2025		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2.908.704	2.347.818	2.624.922	3.001.315	2.759.256	2.884.151	3.131.770	2.514.597	2.837.520
Sumatera Utara	2.899.172	2.418.710	2.760.361	2.788.483	2.275.424	2.647.529	2.928.690	2.511.293	2.815.066
Sumatera Barat	2.983.599	2.379.043	2.772.393	3.054.803	2.447.581	2.831.404	3.130.619	2.493.640	2.911.450
Riau	3.555.351	2.715.269	3.139.242	3.387.219	2.751.556	3.083.274	3.501.676	2.716.462	3.144.261
Jambi	3.319.165	2.417.161	2.831.081	3.225.855	2.405.590	2.789.581	3.324.124	2.659.907	2.975.646
Sumatera Selatan	3.317.890	2.395.037	2.886.117	2.929.721	2.491.833	2.727.684	3.392.755	2.548.297	3.015.055
Bengkulu	3.292.620	2.354.184	2.839.093	2.646.963	2.474.003	2.566.215	3.261.154	2.586.521	2.935.681
Lampung	2.746.659	2.274.054	2.517.788	2.546.163	2.098.497	2.320.932	2.856.780	2.167.197	2.520.619
Kep. Bangka Belitung	3.534.377	2.625.181	3.264.692	3.312.505	2.788.872	3.155.887	3.375.753	2.777.007	3.202.690
Kepulauan Riau	5.059.298	2.748.087	4.911.036	4.832.775	2.991.733	4.741.492	4.890.545	2.955.778	4.768.990
DKI Jakarta	5.806.940	—	5.806.940	4.878.942	—	4.878.942	5.903.603	—	5.903.603
Jawa Barat	3.934.345	2.549.794	3.774.498	3.370.123	2.377.165	3.258.613	3.919.211	2.637.431	3.768.080
Jawa Tengah	2.508.941	2.210.127	2.405.447	2.557.136	2.225.761	2.441.045	2.650.729	2.297.611	2.528.470
DI Yogyakarta	2.961.753	2.200.571	2.829.890	3.074.587	2.112.317	2.914.645	3.065.438	2.286.506	2.924.613
Jawa Timur	2.953.077	2.165.952	2.713.383	2.779.547	2.211.499	2.625.050	3.071.902	2.458.321	2.899.074
Banten	4.603.444	2.751.119	4.392.768	4.057.227	5.181.274	4.168.622	4.266.228	2.583.493	4.062.488
Bali	3.509.604	3.063.005	3.403.265	3.722.054	3.280.234	3.617.339	3.862.977	2.931.864	3.639.413
Nusa Tenggara Barat	2.485.150	2.127.890	2.365.102	2.474.632	2.189.094	2.377.411	2.591.180	2.523.974	2.569.181
Nusa Tenggara Timur	2.837.812	1.895.368	2.370.111	2.744.987	1.983.302	2.341.352	3.036.542	2.352.808	2.674.136
Kalimantan Barat	3.165.073	2.638.828	2.904.061	3.131.752	2.528.079	2.829.690	3.118.128	2.828.905	2.972.111
Kalimantan Tengah	3.566.337	3.204.577	3.384.610	3.430.089	3.082.600	3.265.545	3.615.201	3.270.414	3.451.676
Kalimantan Selatan	3.429.327	2.951.250	3.239.646	3.514.921	2.881.628	3.269.734	3.313.106	2.924.012	3.164.480
Kalimantan Timur	4.533.856	4.013.301	4.400.771	4.524.705	4.164.533	4.439.658	4.551.886	4.211.081	4.475.944
Kalimantan Utara	3.878.736	3.403.587	3.748.909	4.462.007	4.050.120	4.355.707	3.683.339	3.655.951	3.675.921
Sulawesi Utara	3.769.787	2.792.023	3.453.051	3.505.624	2.951.453	3.332.950	3.597.708	3.030.568	3.420.935
Sulawesi Tengah	3.031.753	2.688.689	2.863.721	3.594.576	2.542.905	3.077.492	3.316.385	2.763.255	3.056.120
Sulawesi Selatan	3.299.942	2.491.283	2.992.571	3.288.517	2.391.993	2.956.256	3.341.205	2.571.848	3.060.385
Sulawesi Tenggara	3.364.011	2.580.701	2.954.690	3.162.954	2.665.693	2.928.215	3.438.516	2.914.811	3.189.724
Gorontalo	2.914.487	2.208.169	2.605.876	2.601.439	2.325.321	2.506.904	3.125.913	2.594.559	2.911.813
Sulawesi Barat	2.802.755	2.223.491	2.443.110	2.930.119	2.424.540	2.608.578	3.167.983	2.408.602	2.698.528
Maluku	3.348.004	2.357.851	2.925.208	3.179.212	2.440.288	2.866.807	3.566.695	2.419.555	3.100.805
Maluku Utara	3.959.340	3.056.591	3.456.786	4.277.196	3.247.017	3.666.126	4.153.103	3.229.296	3.620.219
Papua Barat	3.668.559	3.137.167	3.392.758	3.558.174	3.362.759	3.459.119	3.932.240	3.615.592	3.765.973
Papua Barat Daya	3.897.726	3.429.895	3.739.328	3.926.787	3.288.848	3.644.386	3.877.749	3.771.769	3.837.947
Papua	4.299.872	3.391.067	4.151.674	4.181.614	3.215.237	3.984.589	4.645.958	3.558.138	4.426.645
Papua Selatan	3.820.547	3.319.446	3.639.485	4.072.129	3.321.631	3.865.415	4.597.088	3.747.812	4.264.963
Papua Tengah	5.553.068	3.737.910	5.071.157	4.737.779	4.770.819	4.747.826	5.333.686	3.868.321	4.808.336
Papua Pegunungan	4.145.494	4.026.964	4.089.877	4.900.630	3.457.864	4.133.474	4.924.714	3.153.308	3.941.546
Indonesia	3.587.984	2.451.139	3.267.618	3.315.199	2.506.508	3.094.818	3.616.734	2.582.957	3.331.012

**Lampiran 26 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Agustus 2025**

Provinsi	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	4.155.944	38.391	0,92	4.080.695	4.231.193	1,25	1,12
Sumatera Utara	11.653.360	110.684	0,95	11.436.415	11.870.305	3,85	1,96
Sumatera Barat	4.483.042	46.184	1,03	4.392.519	4.573.565	1,68	1,30
Riau	5.034.095	54.337	1,08	4.927.591	5.140.599	2,08	1,44
Jambi	2.829.000	27.411	0,97	2.775.273	2.882.727	0,93	0,97
Sumatera Selatan	6.675.759	63.142	0,95	6.551.998	6.799.520	2,13	1,46
Bengkulu	1.608.738	19.109	1,19	1.571.283	1.646.193	0,79	0,89
Lampung	7.192.537	62.197	0,86	7.070.629	7.314.445	1,93	1,39
Kep. Bangka Belitung	1.185.147	15.030	1,27	1.155.687	1.214.607	0,66	0,81
Kepulauan Riau	1.648.217	32.314	1,96	1.584.881	1.711.553	2,21	1,49
DKI Jakarta	8.430.623	121.073	1,44	8.193.315	8.667.931	6,27	2,50
Jawa Barat	39.237.385	235.904	0,60	38.775.003	39.699.767	5,99	2,45
Jawa Tengah	30.037.087	154.497	0,51	29.734.266	30.339.908	3,19	1,79
DI Yogyakarta	3.049.126	42.694	1,40	2.965.444	3.132.808	2,10	1,45
Jawa Timur	33.472.420	212.335	0,63	33.056.235	33.888.605	5,51	2,35
Banten	9.539.824	122.342	1,28	9.300.029	9.779.619	5,68	2,38
Bali	3.547.519	50.893	1,43	3.447.767	3.647.271	2,57	1,60
Nusa Tenggara Barat	4.210.582	46.512	1,10	4.119.417	4.301.747	1,82	1,35
Nusa Tenggara Timur	4.091.938	34.020	0,83	4.025.257	4.158.619	1,00	1,00
Kalimantan Barat	4.342.061	38.982	0,90	4.265.654	4.418.468	1,24	1,11
Kalimantan Tengah	2.158.251	26.898	1,25	2.105.529	2.210.973	1,17	1,08
Kalimantan Selatan	3.212.466	38.524	1,20	3.136.958	3.287.974	1,62	1,27
Kalimantan Timur	3.120.112	57.517	1,84	3.007.377	3.232.847	3,73	1,93
Kalimantan Utara	569.126	11.274	1,98	547.029	591.223	0,78	0,88
Sulawesi Utara	2.119.895	24.780	1,17	2.071.326	2.168.464	1,01	1,01
Sulawesi Tengah	2.351.470	23.919	1,02	2.304.587	2.398.353	0,85	0,92
Sulawesi Selatan	7.343.490	62.314	0,85	7.221.353	7.465.627	1,90	1,38
Sulawesi Tenggara	2.069.384	23.213	1,12	2.023.885	2.114.883	0,91	0,95
Gorontalo	946.299	13.524	1,43	919.792	972.806	0,67	0,82
Sulawesi Barat	1.109.763	17.235	1,55	1.075.982	1.143.544	0,93	0,97
Maluku	1.476.429	21.552	1,46	1.434.186	1.518.672	1,10	1,05
Maluku Utara	1.014.226	15.345	1,51	984.148	1.044.304	0,81	0,90
Papua Barat	434.339	8.751	2,01	417.186	451.492	0,61	0,78
Papua Barat Daya	475.885	11.580	2,43	453.188	498.582	0,98	0,99
Papua	729.072	14.374	1,97	700.898	757.246	0,99	0,99
Papua Selatan	336.718	8.277	2,46	320.494	352.942	0,71	0,84
Papua Tengah	1.109.718	23.653	2,13	1.063.358	1.156.078	1,76	1,33
Papua Pegunungan	1.166.767	26.261	2,25	1.115.295	1.218.239	2,06	1,43
Indonesia	218.167.814	454.646	0,21	217.276.687	219.058.941	14,62	3,82

**Lampiran 27 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, Agustus 2025**

	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15 Tahun ke Atas	218.167.814	454.646	0,21	217.276.687	219.058.941	14,62	3,82
15–64 tahun	196.487.524	437.862	0,22	195.629.294	197.345.754	34,02	5,83
15–24 tahun	44.259.960	197.017	0,45	43.873.798	44.646.122	3,81	1,95
25 Tahun ke Atas	173.907.854	373.702	0,21	173.175.382	174.640.326	13,71	3,70
25–54 tahun	124.479.666	314.487	0,25	123.863.258	125.096.074	6,41	2,53
25–34 tahun	44.692.203	223.716	0,50	44.253.711	45.130.695	4,88	2,21
35–54 tahun	79.787.463	241.405	0,30	79.314.298	80.260.628	3,99	2,00
55–64 tahun	27.747.898	158.129	0,57	27.437.958	28.057.838	3,58	1,89
65 Tahun ke Atas	21.680.290	167.778	0,77	21.351.438	22.009.142	5,00	2,23

**Lampiran 28 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi,
Agustus 2025**

Provinsi	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	2.714.518	29.970	1,10	2.655.776	2.773.260	1,17	1,08
Sumatera Utara	8.424.525	89.759	1,07	8.248.594	8.600.456	3,51	1,87
Sumatera Barat	3.198.216	38.417	1,20	3.122.917	3.273.515	1,64	1,28
Riau	3.350.137	41.748	1,25	3.268.310	3.431.964	1,85	1,36
Jambi	1.934.211	24.306	1,26	1.886.570	1.981.852	1,07	1,04
Sumatera Selatan	4.664.935	52.955	1,14	4.561.140	4.768.730	2,15	1,47
Bengkulu	1.154.698	15.328	1,33	1.124.654	1.184.742	0,71	0,84
Lampung	5.066.550	56.910	1,12	4.955.004	5.178.096	2,30	1,52
Kep, Bangka Belitung	822.311	12.552	1,53	797.708	846.914	0,67	0,82
Kepulauan Riau	1.124.534	26.376	2,35	1.072.836	1.176.232	2,16	1,47
DKI Jakarta	5.458.799	91.354	1,67	5.279.741	5.637.857	5,51	2,35
Jawa Barat	26.286.474	201.994	0,77	25.890.557	26.682.391	6,50	2,55
Jawa Tengah	22.336.198	146.087	0,65	22.049.861	22.622.535	3,88	1,97
DI Yogyakarta	2.278.814	39.389	1,73	2.201.609	2.356.019	2,40	1,55
Jawa Timur	24.761.734	170.749	0,69	24.427.059	25.096.409	4,87	2,21
Banten	6.168.282	100.387	1,63	5.971.519	6.365.045	5,91	2,43
Bali	2.742.720	45.065	1,64	2.654.390	2.831.050	2,62	1,62
Nusa Tenggara Barat	3.204.661	48.744	1,52	3.109.121	3.300.201	2,63	1,62
Nusa Tenggara Timur	3.091.518	28.692	0,93	3.035.280	3.147.756	0,94	0,97
Kalimantan Barat	3.078.685	32.702	1,06	3.014.587	3.142.783	1,23	1,11
Kalimantan Tengah	1.476.295	21.286	1,44	1.434.573	1.518.017	1,08	1,04
Kalimantan Selatan	2.246.548	29.601	1,32	2.188.529	2.304.567	1,37	1,17
Kalimantan Timur	2.077.413	40.859	1,97	1.997.328	2.157.498	2,83	1,68
Kalimantan Utara	395.803	8.390	2,12	379.357	412.249	0,62	0,79
Sulawesi Utara	1.424.701	18.343	1,29	1.388.748	1.460.654	0,83	0,91
Sulawesi Tengah	1.702.551	20.025	1,18	1.663.302	1.741.800	0,83	0,91
Sulawesi Selatan	4.968.027	50.399	1,01	4.869.243	5.066.811	1,84	1,35
Sulawesi Tenggara	1.483.197	18.957	1,28	1.446.040	1.520.354	0,85	0,92
Gorontalo	655.681	10.988	1,68	634.143	677.219	0,64	0,80
Sulawesi Barat	824.036	14.177	1,72	796.249	851.823	0,85	0,92
Maluku	984.241	15.900	1,62	953.077	1.015.405	0,90	0,95
Maluku Utara	705.578	12.417	1,76	681.239	729.917	0,76	0,87
Papua Barat	302.078	6.784	2,25	288.780	315.376	0,53	0,73
Papua Barat Daya	324.071	9.499	2,93	305.453	342.689	0,97	0,98
Papua	466.491	10.366	2,22	446.174	486.808	0,80	0,90
Papua Selatan	226.842	5.756	2,54	215.561	238.123	0,51	0,71
Papua Tengah	819.960	20.467	2,50	779.844	860.076	1,78	1,34
Papua Pegunungan	1.057.738	25.365	2,40	1.008.022	1.107.454	2,13	1,46
Indonesia	154.003.771	382.435	0,25	153.254.181	154.753.361	11,19	3,34

**Lampiran 29 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Agustus 2025**

Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15 Tahun ke Atas	146.542.264	370.537	0,25	145.815.994	147.268.534	395,72	19,89
Umur Muda (15–24 tahun)	18.913.205	128.505	0,68	18.661.329	19.165.081	3,52	1,88
Umur Dewasa (25 tahun ke Atas)	127.629.059	326.901	0,26	126.988.319	128.269.799	22,75	4,77

**Lampiran 30 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja
Menurut Kelompok Umur, Agustus 2025**

Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15 Tahun ke Atas	154.003.771	382.416	0,25	153.254.219	154.753.323	416,94	20,42
15–64 tahun	143.475.756	367.310	0,26	142.755.812	144.195.700	47,78	6,91
15–24 tahun	22.756.772	143.219	0,63	22.476.056	23.037.488	3,67	1,92
25–54 tahun	100.634.856	282.096	0,28	100.081.935	101.187.777	7,93	2,82
25–34 tahun	35.281.859	195.474	0,55	34.898.721	35.664.997	4,88	2,21
35–54 tahun	65.352.997	216.485	0,33	64.928.677	65.777.317	4,33	2,08
55–64 tahun	20.084.128	130.214	0,65	19.828.902	20.339.354	3,37	1,84
65 Tahun ke Atas	10.528.015	112.794	1,07	10.306.934	10.749.096	4,51	2,12

**Lampiran 31 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen),
Agustus 2025**

Kelompok Umur	TPAK	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15 Tahun ke Atas	70,59	0,10	0,15	70,38	70,79	3,97	1,99
15–64 tahun	73,02	0,10	0,14	72,82	73,22	3,60	1,90
15–24 tahun	51,42	0,23	0,44	50,97	51,86	3,26	1,81
25–54 tahun	80,84	0,10	0,13	80,64	81,05	3,01	1,74
25–34 tahun	78,94	0,18	0,23	78,59	79,30	2,52	1,59
35–54 tahun	81,91	0,12	0,15	81,67	82,15	3,18	1,78
55–64 tahun	72,38	0,26	0,36	71,87	72,90	3,41	1,85
65 Tahun ke Atas	48,56	0,37	0,76	47,84	49,28	3,35	1,83

Lampiran 32 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi (persen),
Agustus 2025

Provinsi	TPAK	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	65,32	0,45	0,69	64,44	66,19	1,28	1,13
Sumatera Utara	72,29	0,37	0,51	71,57	73,01	2,73	1,65
Sumatera Barat	71,34	0,41	0,58	70,53	72,15	1,30	1,14
Riau	66,55	0,43	0,65	65,70	67,40	1,48	1,22
Jambi	68,37	0,50	0,73	67,39	69,35	1,12	1,06
Sumatera Selatan	69,88	0,48	0,68	68,95	70,81	2,49	1,58
Bengkulu	71,78	0,45	0,63	70,89	72,66	0,56	0,75
Lampung	70,44	0,51	0,73	69,44	71,45	3,14	1,77
Kep. Bangka Belitung	69,38	0,56	0,81	68,29	70,48	0,61	0,78
Kepulauan Riau	68,23	0,77	1,14	66,71	69,75	1,58	1,26
DKI Jakarta	64,75	0,63	0,98	63,51	65,99	5,12	2,26
Jawa Barat	66,99	0,31	0,46	66,39	67,59	5,77	2,40
Jawa Tengah	74,36	0,30	0,41	73,76	74,96	5,07	2,25
DI Yogyakarta	74,74	0,68	0,90	73,41	76,06	2,56	1,60
Jawa Timur	73,98	0,32	0,43	73,35	74,60	6,16	2,48
Banten	64,66	0,67	1,04	63,34	65,98	6,53	2,56
Bali	77,31	0,52	0,67	76,30	78,33	1,89	1,37
Nusa Tenggara Barat	76,11	0,69	0,90	74,76	77,46	3,80	1,95
Nusa Tenggara Timur	75,55	0,40	0,52	74,77	76,33	1,20	1,10
Kalimantan Barat	70,90	0,41	0,58	70,10	71,71	1,22	1,11
Kalimantan Tengah	68,40	0,53	0,77	67,37	69,44	0,97	0,98
Kalimantan Selatan	69,93	0,44	0,63	69,07	70,79	1,03	1,01
Kalimantan Timur	66,58	0,53	0,80	65,54	67,62	1,37	1,17
Kalimantan Utara	69,55	0,76	1,09	68,06	71,03	0,53	0,73
Sulawesi Utara	67,21	0,44	0,66	66,34	68,07	0,65	0,81
Sulawesi Tengah	72,40	0,48	0,66	71,46	73,34	0,94	0,97
Sulawesi Selatan	67,65	0,45	0,66	66,78	68,53	2,32	1,52
Sulawesi Tenggara	71,67	0,47	0,65	70,76	72,59	0,77	0,88
Gorontalo	69,29	0,69	1,00	67,93	70,65	0,74	0,86
Sulawesi Barat	74,25	0,62	0,84	73,04	75,47	0,78	0,88
Maluku	66,66	0,61	0,92	65,46	67,86	0,86	0,93
Maluku Utara	69,57	0,64	0,92	68,32	70,82	0,68	0,82
Papua Barat	69,55	1,15	1,65	67,29	71,80	0,94	0,97
Papua Barat Daya	68,10	0,90	1,33	66,33	69,87	0,62	0,79
Papua	63,98	0,96	1,50	62,11	65,86	1,00	1,00
Papua Selatan	67,37	1,29	1,92	64,84	69,90	0,88	0,94
Papua Tengah	73,89	1,06	1,44	71,81	75,97	2,25	1,50
Papua Pegunungan	90,66	0,59	0,66	89,49	91,82	1,68	1,30
Indonesia	70,59	0,10	0,15	70,38	70,79	3,97	1,99

**Lampiran 33 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi,
Agustus 2025**

Provinsi	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	2.561.329	28.654	1,12	2.505.165	2.617.493	1,14	1,07
Sumatera Utara	7.976.273	84.131	1,05	7.811.373	8.141.173	3,29	1,81
Sumatera Barat	3.018.582	36.641	1,21	2.946.764	3.090.400	1,59	1,26
Riau	3.210.929	39.677	1,24	3.133.161	3.288.697	1,76	1,33
Jambi	1.851.864	23.841	1,29	1.805.135	1.898.593	1,09	1,04
Sumatera Selatan	4.492.574	52.856	1,18	4.388.973	4.596.175	2,25	1,50
Bengkulu	1.115.334	14.857	1,33	1.086.213	1.144.455	0,70	0,84
Lampung	4.853.377	57.850	1,19	4.739.989	4.966.765	2,50	1,58
Kep. Bangka Belitung	785.723	11.975	1,52	762.252	809.194	0,64	0,80
Kepulauan Riau	1.051.975	24.529	2,33	1.003.897	1.100.053	2,02	1,42
DKI Jakarta	5.128.464	87.046	1,70	4.957.851	5.299.077	5,37	2,32
Jawa Barat	24.506.852	195.278	0,80	24.124.099	24.889.605	6,55	2,56
Jawa Tengah	21.295.797	140.689	0,66	21.020.041	21.571.553	3,81	1,95
DI Yogyakarta	2.200.071	38.684	1,76	2.124.249	2.275.893	2,42	1,56
Jawa Timur	23.801.034	167.150	0,70	23.473.413	24.128.655	4,92	2,22
Banten	5.755.926	96.705	1,68	5.566.380	5.945.472	5,93	2,44
Bali	2.701.726	44.837	1,66	2.613.843	2.789.609	2,66	1,63
Nusa Tenggara Barat	3.106.729	48.155	1,55	3.012.343	3.201.115	2,67	1,64
Nusa Tenggara Timur	2.989.090	27.960	0,94	2.934.286	3.043.894	0,94	0,97
Kalimantan Barat	2.930.432	32.071	1,09	2.867.572	2.993.292	1,26	1,12
Kalimantan Tengah	1.417.683	20.723	1,46	1.377.065	1.458.301	1,07	1,04
Kalimantan Selatan	2.153.139	28.579	1,33	2.097.122	2.209.156	1,35	1,16
Kalimantan Timur	1.969.739	39.959	2,03	1.891.417	2.048.061	2,88	1,70
Kalimantan Utara	380.572	8.257	2,17	364.387	396.757	0,63	0,79
Sulawesi Utara	1.339.333	17.596	1,31	1.304.843	1.373.823	0,82	0,90
Sulawesi Tengah	1.652.846	20.071	1,21	1.613.506	1.692.186	0,86	0,93
Sulawesi Selatan	4.759.077	49.201	1,03	4.662.641	4.855.513	1,84	1,36
Sulawesi Tenggara	1.434.033	18.194	1,27	1.398.372	1.469.694	0,82	0,90
Gorontalo	633.263	10.702	1,69	612.287	654.239	0,64	0,80
Sulawesi Barat	800.433	14.346	1,79	772.314	828.552	0,91	0,95
Maluku	922.486	15.039	1,63	893.009	951.963	0,87	0,93
Maluku Utara	673.456	12.128	1,80	649.685	697.227	0,77	0,88
Papua Barat	288.323	7.091	2,46	274.425	302.221	0,61	0,78
Papua Barat Daya	301.862	9.228	3,06	283.775	319.949	0,99	1,00
Papua	434.016	10.070	2,32	414.278	453.754	0,82	0,91
Papua Selatan	217.682	5.966	2,74	205.989	229.375	0,57	0,76
Papua Tengah	790.239	20.216	2,56	750.616	829.862	1,82	1,35
Papua Pegunungan	1.040.001	25.034	2,41	990.933	1.089.069	2,13	1,46
Indonesia	146.542.264	370.564	0,25	145.815.943	147.268.585	9,89	3,14

Lampiran 34 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*) Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi, Agustus 2025

Provinsi	EPR	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	61,63	0,45	0,74	60,74	62,52	1,25	1,12
Sumatera Utara	68,45	0,39	0,56	67,69	69,20	2,79	1,67
Sumatera Barat	67,33	0,46	0,68	66,43	68,23	1,49	1,22
Riau	63,78	0,44	0,70	62,91	64,66	1,49	1,22
Jambi	65,46	0,51	0,79	64,45	66,47	1,15	1,07
Sumatera Selatan	67,30	0,51	0,75	66,30	68,29	2,69	1,64
Bengkulu	69,33	0,49	0,70	68,37	70,29	0,63	0,79
Lampung	67,48	0,55	0,81	66,40	68,55	3,43	1,85
Kep. Bangka Belitung	66,30	0,57	0,85	65,19	67,41	0,59	0,77
Kepulauan Riau	63,83	0,89	1,40	62,07	65,58	1,98	1,41
DKI Jakarta	60,83	0,66	1,08	59,54	62,12	5,33	2,31
Jawa Barat	62,46	0,33	0,52	61,82	63,10	6,17	2,48
Jawa Tengah	70,90	0,31	0,44	70,29	71,51	4,86	2,20
DI Yogyakarta	72,15	0,69	0,96	70,80	73,51	2,52	1,59
Jawa Timur	71,11	0,32	0,45	70,48	71,74	5,82	2,41
Banten	60,34	0,69	1,14	58,99	61,68	6,54	2,56
Bali	76,16	0,54	0,71	75,10	77,22	1,99	1,41
Nusa Tenggara Barat	73,78	0,72	0,98	72,37	75,20	3,91	1,98
Nusa Tenggara Timur	73,05	0,42	0,58	72,22	73,87	1,28	1,13
Kalimantan Barat	67,49	0,45	0,66	66,62	68,36	1,36	1,17
Kalimantan Tengah	65,69	0,53	0,81	64,64	66,73	0,94	0,97
Kalimantan Selatan	67,02	0,45	0,68	66,14	67,91	1,03	1,02
Kalimantan Timur	63,13	0,56	0,88	62,04	64,22	1,44	1,20
Kalimantan Utara	66,87	0,80	1,19	65,30	68,43	0,57	0,75
Sulawesi Utara	63,18	0,46	0,73	62,28	64,08	0,66	0,81
Sulawesi Tengah	70,29	0,50	0,72	69,30	71,28	0,99	0,99
Sulawesi Selatan	64,81	0,47	0,72	63,90	65,72	2,41	1,55
Sulawesi Tenggara	69,30	0,48	0,69	68,36	70,23	0,77	0,88
Gorontalo	66,92	0,70	1,05	65,55	68,29	0,73	0,85
Sulawesi Barat	72,13	0,68	0,94	70,80	73,46	0,88	0,94
Maluku	62,48	0,65	1,03	61,22	63,75	0,91	0,95
Maluku Utara	66,40	0,69	1,04	65,05	67,75	0,75	0,86
Papua Barat	66,38	1,26	1,89	63,92	68,85	1,07	1,03
Papua Barat Daya	63,43	0,88	1,39	61,70	65,16	0,55	0,74
Papua	59,53	1,03	1,73	57,51	61,55	1,12	1,06
Papua Selatan	64,65	1,31	2,03	62,07	67,22	0,88	0,94
Papua Tengah	71,21	1,09	1,53	69,08	73,34	2,22	1,49
Papua Pegunungan	89,14	0,70	0,78	87,77	90,51	2,04	1,43
Indonesia	67,17	0,11	0,16	66,96	67,38	4,03	2,01

Lampiran 35 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama,
Agustus 2025

Status Pekerjaan Utama	Persentase	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Berusaha Sendiri	21,40	0,12	0,56	21,17	21,63	4,32	2,08
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	13,86	0,10	0,71	13,67	14,05	4,15	2,04
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	3,46	0,05	1,34	3,36	3,55	3,31	1,82
Buruh/Karyawan/Pegawai	38,74	0,16	0,40	38,44	39,05	5,28	2,30
Pekerja Bebas	9,58	0,09	0,98	9,40	9,76	5,21	2,28
Pekerja Keluarga	12,96	0,09	0,70	12,79	13,14	3,74	1,93

Lampiran 36 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan,
Agustus 2025

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41.247.117	267.499	0,65	40.722.808	41.771.426	8,47	2,91
B. Pertambangan dan Penggalian	1.728.814	52.866	3,06	1.625.195	1.832.433	5,74	2,40
C. Industri Pengolahan	20.308.685	190.770	0,94	19.934.767	20.682.603	7,30	2,70
D. Pengadaan Listrik dan Gas	363.987	17.594	4,83	329.502	398.472	2,99	1,73
E. <i>Treatment</i> Air, <i>Treatment</i> Air Limbah, <i>Treatment</i> dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivasi Remediasi	596.565	26.774	4,49	544.087	649.043	4,23	2,06
F. Konstruksi	9.543.258	115.235	1,21	9.317.392	9.769.124	5,22	2,28
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	27.452.952	185.082	0,67	27.090.184	27.815.720	5,39	2,32
H. Pengangkutan dan Pergudangan	6.270.920	83.815	1,34	6.106.640	6.435.200	4,10	2,03
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11.692.579	123.472	1,06	11.450.568	11.934.590	4,97	2,23
J. Informasi dan Komunikasi	1.064.357	33.207	3,12	999.270	1.129.444	3,66	1,91
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.650.077	40.235	2,44	1.571.214	1.728.940	3,48	1,87
L. Real Estat	509.154	23.882	4,69	462.345	555.963	3,94	1,99
M. N, Aktivitas Profesional dan Perusahaan	2.581.616	51.761	2,00	2.480.162	2.683.070	3,71	1,92
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	5.130.470	65.916	1,28	5.001.272	5.259.668	3,08	1,75
P. Pendidikan	7.413.725	84.073	1,13	7.248.938	7.578.512	3,52	1,88
Q. Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.458.567	44.983	1,83	2.370.398	2.546.736	2,94	1,71
R S T U. Aktivitas Jasa Lainnya	6.529.421	84.891	1,30	6.363.030	6.695.812	4,05	2,01
Total	146.542.264	370.564	0,25	145.815.943	147.268.585	9,89	3,14

**Lampiran 37 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan,
Agustus 2025**

Jenis Pekerjaan Utama	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0/1. Tenaga Profesional, Teknisi, dan yang Sejenis	10.989.243	109.097	0,99	10.775.408	11.203.078	4,11	2,03
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	1.745.738	40.331	2,31	1.666.688	1.824.788	3,31	1,82
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	7.759.048	84.804	1,09	7.592.828	7.925.268	3,43	1,85
4. Tenaga Usaha Penjualan	30.227.852	193.956	0,64	29.847.689	30.608.015	5,50	2,35
5. Tenaga Usaha Jasa	9.434.860	112.279	1,19	9.214.788	9.654.932	5,01	2,24
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, & Perikanan	39.848.183	263.239	0,66	39.332.222	40.364.144	8,38	2,89
7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat–Alat Angkutan, & Pekerja Kasar	44.041.500	260.374	0,59	43.531.155	44.551.845	7,72	2,78
X/00. Lainnya	2.495.840	51.375	2,06	2.395.143	2.596.537	3,77	1,94
Total	146.542.264	370.564	0,25	145.815.943	147.268.585	9,89	3,14

**Lampiran 38 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*) Indikator
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu
Menurut Provinsi, Agustus 2025**

Provinsi	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	702.344	19.603	2,79	663.921	740.767	2,26	1,50
Sumatera Utara	1.919.059	41.564	2,17	1.837.592	2.000.526	3,85	1,96
Sumatera Barat	789.783	18.930	2,40	752.679	826.887	1,88	1,37
Riau	840.898	22.077	2,63	797.626	884.170	2,41	1,55
Jambi	500.657	14.302	2,86	472.625	528.689	1,68	1,30
Sumatera Selatan	1.310.564	31.212	2,38	1.249.388	1.371.740	3,13	1,77
Bengkulu	339.202	9.266	2,73	321.039	357.365	1,04	1,02
Lampung	1.471.348	37.704	2,56	1.397.447	1.545.249	4,08	2,02
Kep. Bangka Belitung	179.292	5.600	3,12	168.316	190.268	0,71	0,84
Kepulauan Riau	154.665	8.670	5,61	137.671	171.659	1,98	1,41
DKI Jakarta	684.377	28.470	4,16	628.573	740.181	4,89	2,21
Jawa Barat	4.796.143	87.976	1,83	4.623.706	4.968.580	7,54	2,75
Jawa Tengah	5.150.839	79.187	1,54	4.995.629	5.306.049	5,75	2,40
DI Yogyakarta	594.606	21.207	3,57	553.038	636.174	3,12	1,77
Jawa Timur	6.387.955	110.915	1,74	6.170.555	6.605.355	9,48	3,08
Banten	1.012.361	40.602	4,01	932.778	1.091.944	6,79	2,61
Bali	653.247	19.933	3,05	614.176	692.318	2,51	1,58
Nusa Tenggara Barat	827.261	31.036	3,75	766.430	888.092	4,83	2,20
Nusa Tenggara Timur	1.074.809	20.440	1,90	1.034.746	1.114.872	1,62	1,27
Kalimantan Barat	895.187	20.297	2,27	855.404	934.970	1,91	1,38
Kalimantan Tengah	361.600	10.235	2,83	341.538	381.662	1,19	1,09
Kalimantan Selatan	610.605	14.277	2,34	582.621	638.589	1,38	1,17
Kalimantan Timur	394.369	14.921	3,78	365.123	423.615	2,31	1,52
Kalimantan Utara	83.450	3.745	4,49	76.109	90.791	0,68	0,83
Sulawesi Utara	310.624	8.387	2,70	294.185	327.063	0,93	0,96
Sulawesi Tengah	475.628	13.421	2,82	449.323	501.933	1,56	1,25
Sulawesi Selatan	1.400.634	27.643	1,97	1.346.452	1.454.816	2,30	1,52
Sulawesi Tenggara	410.523	9.886	2,41	391.145	429.901	0,98	0,99
Gorontalo	146.276	5.932	4,06	134.649	157.903	0,98	0,99
Sulawesi Barat	279.143	9.602	3,44	260.322	297.964	1,35	1,16
Maluku	251.617	8.224	3,27	235.498	267.736	1,10	1,05
Maluku Utara	201.239	7.066	3,51	187.388	215.090	1,01	1,01
Papua Barat	93.258	5.721	6,13	82.045	104.471	1,43	1,19
Papua Barat Daya	63.937	3.356	5,25	57.359	70.515	0,72	0,85
Papua	107.987	5.833	5,40	96.554	119.420	1,28	1,13
Papua Selatan	58.103	3.624	6,24	51.000	65.206	0,92	0,96
Papua Tengah	292.098	14.467	4,95	263.741	320.455	2,93	1,71
Papua Pegunungan	470.279	17.183	3,65	436.599	503.959	2,58	1,61
Indonesia	36.295.967	212.314	0,58	35.879.823	36.712.111	20,41	4,52

**Lampiran 39 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*) Indikator
Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025**

Provinsi	Tingkat Pekerja Paruh Waktu	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	27,42	0,75	2,74	25,95	28,89	2,55	1,60
Sumatera Utara	24,06	0,50	2,08	23,08	25,04	3,85	1,96
Sumatera Barat	26,16	0,55	2,11	25,08	27,25	1,67	1,29
Riau	26,19	0,66	2,53	24,89	27,48	2,55	1,60
Jambi	27,04	0,73	2,70	25,60	28,47	1,76	1,33
Sumatera Selatan	29,17	0,68	2,32	27,84	30,50	3,51	1,87
Bengkulu	30,41	0,77	2,55	28,89	31,93	1,11	1,05
Lampung	30,32	0,71	2,34	28,93	31,70	4,05	2,01
Kep. Bangka Belitung	22,82	0,67	2,94	21,50	24,13	0,70	0,84
Kepulauan Riau	14,70	0,80	5,42	13,14	16,26	1,87	1,37
DKI Jakarta	13,34	0,61	4,61	12,14	14,55	5,88	2,42
Jawa Barat	19,57	0,37	1,87	18,85	20,29	7,31	2,70
Jawa Tengah	24,19	0,34	1,42	23,51	24,86	4,81	2,19
DI Yogyakarta	27,03	0,92	3,42	25,21	28,84	3,35	1,83
Jawa Timur	26,84	0,42	1,57	26,01	27,66	7,55	2,75
Banten	17,59	0,72	4,07	16,18	18,99	7,14	2,67
Bali	24,18	0,68	2,81	22,85	25,51	2,39	1,55
Nusa Tenggara Barat	26,63	0,89	3,32	24,89	28,36	4,37	2,09
Nusa Tenggara Timur	35,96	0,60	1,67	34,78	37,13	1,64	1,28
Kalimantan Barat	30,55	0,69	2,25	29,20	31,89	2,29	1,51
Kalimantan Tengah	25,51	0,69	2,69	24,16	26,85	1,23	1,11
Kalimantan Selatan	28,36	0,65	2,29	27,09	29,63	1,57	1,25
Kalimantan Timur	20,02	0,72	3,60	18,61	21,43	2,24	1,50
Kalimantan Utara	21,93	0,91	4,17	20,14	23,72	0,65	0,81
Sulawesi Utara	23,19	0,62	2,67	21,98	24,40	1,01	1,00
Sulawesi Tengah	28,78	0,71	2,48	27,38	30,18	1,44	1,20
Sulawesi Selatan	29,43	0,52	1,78	28,40	30,46	2,21	1,49
Sulawesi Tenggara	28,63	0,62	2,16	27,41	29,84	0,94	0,97
Gorontalo	23,10	0,89	3,85	21,36	24,84	0,99	0,99
Sulawesi Barat	34,87	1,08	3,09	32,76	36,99	1,43	1,20
Maluku	27,28	0,83	3,05	25,65	28,91	1,13	1,06
Maluku Utara	29,88	0,88	2,94	28,16	31,60	0,87	0,93
Papua Barat	32,34	1,97	6,09	28,48	36,21	1,79	1,34
Papua Barat Daya	21,18	1,15	5,42	18,93	23,43	0,84	0,91
Papua	24,88	1,37	5,50	22,20	27,56	1,52	1,23
Papua Selatan	26,69	1,67	6,24	23,43	29,96	1,08	1,04
Papua Tengah	36,96	1,56	4,21	33,91	40,01	2,88	1,70
Papua Pegunungan	45,22	1,35	2,98	42,58	47,86	2,67	1,63
Indonesia	24,77	0,13	0,52	24,51	25,02	4,63	2,15

**Lampiran 40 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*) Indikator
Kontribusi (*Share*) Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi
(persen), Agustus 2025**

Provinsi	Kontribusi Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	52,02	1,05	2,02	49,96	54,08	1,26	1,12
Sumatera Utara	54,81	0,77	1,41	53,30	56,33	1,88	1,37
Sumatera Barat	53,59	0,91	1,70	51,80	55,37	1,07	1,03
Riau	43,18	1,01	2,33	41,20	45,16	1,41	1,19
Jambi	48,18	1,23	2,55	45,77	50,60	1,23	1,11
Sumatera Selatan	51,19	0,89	1,73	49,45	52,93	1,67	1,29
Bengkulu	48,20	1,01	2,10	46,22	50,19	0,56	0,75
Lampung	51,47	1,00	1,95	49,51	53,44	2,40	1,55
Kep. Bangka Belitung	55,41	1,34	2,42	52,78	58,04	0,53	0,73
Kepulauan Riau	59,29	2,74	4,62	53,93	64,66	1,95	1,40
DKI Jakarta	71,42	2,02	2,83	67,45	75,38	5,55	2,36
Jawa Barat	55,12	0,80	1,46	53,55	56,69	5,07	2,25
Jawa Tengah	58,98	0,69	1,18	57,62	60,34	4,16	2,04
DI Yogyakarta	60,47	1,32	2,18	57,88	63,05	1,75	1,32
Jawa Timur	60,26	0,60	1,00	59,09	61,44	3,92	1,98
Banten	55,66	1,62	2,90	52,49	58,83	4,34	2,08
Bali	55,98	1,07	1,91	53,88	58,07	1,23	1,11
Nusa Tenggara Barat	59,20	1,36	2,30	56,54	61,87	2,57	1,60
Nusa Tenggara Timur	56,02	0,59	1,06	54,86	57,18	0,62	0,79
Kalimantan Barat	53,30	0,80	1,50	51,73	54,86	0,93	0,97
Kalimantan Tengah	48,08	1,01	2,10	46,11	50,06	0,60	0,77
Kalimantan Selatan	55,45	0,93	1,67	53,63	57,27	0,86	0,93
Kalimantan Timur	49,46	1,30	2,62	46,92	52,00	1,07	1,04
Kalimantan Utara	45,55	1,81	3,97	42,00	49,10	0,45	0,67
Sulawesi Utara	50,88	1,14	2,23	48,65	53,10	0,65	0,81
Sulawesi Tengah	55,66	0,95	1,71	53,80	57,52	0,71	0,84
Sulawesi Selatan	51,28	0,74	1,45	49,82	52,74	1,26	1,12
Sulawesi Tenggara	55,78	0,90	1,61	54,02	57,53	0,54	0,74
Gorontalo	50,32	1,55	3,08	47,28	53,36	0,57	0,75
Sulawesi Barat	50,68	1,22	2,40	48,30	53,07	0,67	0,82
Maluku	52,92	1,16	2,20	50,64	55,21	0,55	0,74
Maluku Utara	50,43	1,17	2,33	48,13	52,73	0,45	0,67
Papua Barat	49,89	1,62	3,25	46,71	53,06	0,40	0,63
Papua Barat Daya	52,95	2,04	3,85	48,96	56,94	0,43	0,66
Papua	48,16	1,62	3,35	44,99	51,33	0,46	0,68
Papua Selatan	53,43	1,97	3,68	49,57	57,29	0,37	0,61
Papua Tengah	49,98	1,07	2,14	47,89	52,08	0,54	0,74
Papua Pegunungan	49,00	0,97	1,99	47,09	50,91	0,72	0,85
Indonesia	55,68	0,22	0,39	55,26	56,11	2,78	1,67

**Lampiran 41 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Jumlah Jam Kerja, Agustus 2025**

Kategori Jam Kerja	Persentase	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0 Jam ¹⁾	1,42	0,03	2,16	1,36	1,48	3,45	1,86
1–34 Jam	32,68	0,15	0,45	32,39	32,97	5,12	2,26
35–48 Jam	40,43	0,15	0,37	40,13	40,72	4,88	2,21
49 Jam ke Atas	25,47	0,14	0,57	25,19	25,75	5,62	2,37

Catatan:

¹⁾ Termasuk sementara tidak bekerja

**Lampiran 42 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*) Persentase
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Kegiatan
Formal, Agustus 2025**

Provinsi	Persentase Penduduk Bekerja di Kegiatan Formal	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	36,09	0,68	1,87	34,76	37,41	1,78	1,33
Sumatera Utara	42,74	0,59	1,38	41,59	43,90	3,97	1,99
Sumatera Barat	35,67	0,61	1,70	34,48	36,86	1,70	1,30
Riau	48,00	0,76	1,58	46,51	49,49	2,60	1,61
Jambi	42,73	0,77	1,80	41,22	44,23	1,57	1,25
Sumatera Selatan	36,87	0,75	2,02	35,40	38,33	3,76	1,94
Bengkulu	34,83	0,86	2,48	33,13	36,52	1,29	1,13
Lampung	35,28	0,77	2,17	33,78	36,79	4,39	2,10
Kep. Bangka Belitung	48,71	0,94	1,93	46,88	50,55	0,97	0,98
Kepulauan Riau	65,75	1,22	1,85	63,37	68,13	2,42	1,56
DKI Jakarta	63,37	0,94	1,48	61,53	65,21	6,81	2,61
Jawa Barat	45,05	0,50	1,10	44,08	46,02	8,51	2,92
Jawa Tengah	41,21	0,50	1,22	40,23	42,20	7,82	2,80
DI Yogyakarta	46,03	1,01	2,19	44,06	48,00	3,15	1,77
Jawa Timur	38,27	0,42	1,10	37,44	39,10	6,31	2,51
Banten	54,88	0,89	1,62	53,14	56,62	6,44	2,54
Bali	49,53	0,69	1,39	48,18	50,87	1,80	1,34
Nusa Tenggara Barat	31,58	0,93	2,96	29,74	33,41	4,40	2,10
Nusa Tenggara Timur	31,56	0,56	1,76	30,47	32,65	1,50	1,22
Kalimantan Barat	43,61	0,71	1,63	42,21	45,00	2,11	1,45
Kalimantan Tengah	49,85	0,92	1,84	48,06	51,65	1,67	1,29
Kalimantan Selatan	46,52	0,75	1,61	45,05	48,00	1,71	1,31
Kalimantan Timur	56,78	0,92	1,62	54,98	58,59	2,39	1,55
Kalimantan Utara	51,56	1,31	2,53	49,00	54,12	0,91	0,95
Sulawesi Utara	45,44	0,74	1,64	43,98	46,90	1,05	1,03
Sulawesi Tengah	35,43	0,76	2,15	33,93	36,93	1,48	1,22
Sulawesi Selatan	39,55	0,63	1,60	38,31	40,79	2,79	1,67
Sulawesi Tenggara	38,87	0,71	1,83	37,48	40,27	1,07	1,04
Gorontalo	38,86	1,08	2,78	36,75	40,98	1,09	1,04
Sulawesi Barat	29,37	1,05	3,58	27,30	31,43	1,50	1,22
Maluku	33,94	0,96	2,83	32,05	35,82	1,33	1,15
Maluku Utara	35,49	0,92	2,59	33,68	37,29	0,87	0,94
Papua Barat	36,81	1,37	3,72	34,12	39,49	0,82	0,90
Papua Barat Daya	44,34	1,47	3,32	41,45	47,22	0,93	0,96
Papua	47,12	1,76	3,74	43,67	50,57	1,89	1,38
Papua Selatan	34,12	2,53	7,43	29,16	39,09	2,18	1,48
Papua Tengah	15,28	0,92	6,04	13,47	17,08	1,82	1,35
Papua Pegunungan	4,70	0,95	20,29	2,83	6,57	7,40	2,72
Indonesia	42,20	0,16	0,37	41,89	42,51	5,27	2,29

**Lampiran 43 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*) Persentase
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan
Kegiatan Informal, Agustus 2025**

Provinsi	Persentase Penduduk Bekerja di Kegiatan Informal	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	63,91	0,68	1,06	62,59	65,24	1,78	1,33
Sumatera Utara	57,26	0,59	1,03	56,10	58,41	3,97	1,99
Sumatera Barat	64,33	0,61	0,94	63,14	65,52	1,70	1,30
Riau	52,00	0,76	1,46	50,51	53,49	2,60	1,61
Jambi	57,27	0,77	1,34	55,77	58,78	1,57	1,25
Sumatera Selatan	63,13	0,75	1,18	61,67	64,60	3,76	1,94
Bengkulu	65,17	0,86	1,33	63,48	66,87	1,29	1,13
Lampung	64,72	0,77	1,19	63,21	66,22	4,39	2,10
Kep. Bangka Belitung	51,29	0,94	1,83	49,45	53,12	0,97	0,98
Kepulauan Riau	34,25	1,22	3,55	31,87	36,63	2,42	1,56
DKI Jakarta	36,63	0,94	2,56	34,79	38,47	6,81	2,61
Jawa Barat	54,95	0,50	0,90	53,98	55,92	8,51	2,92
Jawa Tengah	58,79	0,50	0,86	57,80	59,77	7,82	2,80
DI Yogyakarta	53,97	1,01	1,87	52,00	55,94	3,15	1,77
Jawa Timur	61,73	0,42	0,68	60,90	62,56	6,31	2,51
Banten	45,12	0,89	1,97	43,38	46,86	6,44	2,54
Bali	50,47	0,69	1,36	49,13	51,82	1,80	1,34
Nusa Tenggara Barat	68,42	0,93	1,36	66,59	70,26	4,40	2,10
Nusa Tenggara Timur	68,44	0,56	0,81	67,35	69,53	1,50	1,22
Kalimantan Barat	56,39	0,71	1,26	55,00	57,79	2,11	1,45
Kalimantan Tengah	50,15	0,92	1,83	48,35	51,94	1,67	1,29
Kalimantan Selatan	53,48	0,75	1,40	52,00	54,95	1,71	1,31
Kalimantan Timur	43,22	0,92	2,13	41,41	45,02	2,39	1,55
Kalimantan Utara	48,44	1,31	2,70	45,88	51,00	0,91	0,95
Sulawesi Utara	54,56	0,74	1,36	53,10	56,02	1,05	1,03
Sulawesi Tengah	64,57	0,76	1,18	63,07	66,07	1,48	1,22
Sulawesi Selatan	60,45	0,63	1,05	59,21	61,69	2,79	1,67
Sulawesi Tenggara	61,13	0,71	1,16	59,73	62,52	1,07	1,04
Gorontalo	61,14	1,08	1,77	59,02	63,25	1,09	1,04
Sulawesi Barat	70,63	1,05	1,49	68,57	72,70	1,50	1,22
Maluku	66,06	0,96	1,45	64,18	67,95	1,33	1,15
Maluku Utara	64,51	0,92	1,43	62,71	66,32	0,87	0,94
Papua Barat	63,19	1,37	2,17	60,51	65,88	0,82	0,90
Papua Barat Daya	55,66	1,47	2,64	52,78	58,55	0,93	0,96
Papua	52,88	1,76	3,33	49,43	56,33	1,89	1,38
Papua Selatan	65,88	2,53	3,85	60,91	70,84	2,18	1,48
Papua Tengah	84,72	0,92	1,09	82,92	86,53	1,82	1,35
Papua Pegunungan	95,30	0,95	1,00	93,43	97,17	7,40	2,72
Indonesia	57,80	0,16	0,27	57,49	58,11	5,27	2,29

**Lampiran 44 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025**

Provinsi	TPT	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	5,64	0,27	4,72	5,12	6,17	1,26	1,12
Sumatera Utara	5,32	0,23	4,27	4,88	5,77	2,99	1,73
Sumatera Barat	5,62	0,27	4,88	5,08	6,15	1,57	1,25
Riau	4,16	0,31	7,43	3,55	4,76	2,78	1,67
Jambi	4,26	0,27	6,37	3,73	4,79	1,21	1,10
Sumatera Selatan	3,69	0,22	5,96	3,26	4,13	2,21	1,49
Bengkulu	3,41	0,26	7,69	2,89	3,92	0,84	0,92
Lampung	4,21	0,25	5,86	3,72	4,69	2,65	1,63
Kep. Bangka Belitung	4,45	0,30	6,72	3,86	5,04	0,60	0,77
Kepulauan Riau	6,45	0,65	10,12	5,17	7,73	2,76	1,66
DKI Jakarta	6,05	0,42	6,93	5,23	6,87	5,86	2,42
Jawa Barat	6,77	0,22	3,29	6,33	7,21	7,19	2,68
Jawa Tengah	4,66	0,18	3,79	4,31	5,00	5,45	2,33
DI Yogyakarta	3,46	0,29	8,53	2,88	4,03	2,06	1,44
Jawa Timur	3,88	0,13	3,48	3,62	4,14	4,19	2,05
Banten	6,69	0,37	5,60	5,95	7,42	4,82	2,19
Bali	1,49	0,16	10,91	1,18	1,81	1,72	1,31
Nusa Tenggara Barat	3,06	0,27	8,83	2,53	3,59	2,74	1,65
Nusa Tenggara Timur	3,31	0,18	5,45	2,96	3,67	1,09	1,05
Kalimantan Barat	4,82	0,26	5,30	4,32	5,32	1,52	1,23
Kalimantan Tengah	3,97	0,26	6,58	3,46	4,48	0,92	0,96
Kalimantan Selatan	4,16	0,21	5,08	3,74	4,57	0,87	0,94
Kalimantan Timur	5,18	0,30	5,84	4,59	5,78	1,34	1,16
Kalimantan Utara	3,85	0,41	10,58	3,05	4,65	0,62	0,78
Sulawesi Utara	5,99	0,31	5,20	5,38	6,60	0,85	0,92
Sulawesi Tengah	2,92	0,19	6,41	2,55	3,29	0,73	0,85
Sulawesi Selatan	4,21	0,21	5,04	3,79	4,62	1,93	1,39
Sulawesi Tenggara	3,31	0,22	6,72	2,88	3,75	0,80	0,89
Gorontalo	3,42	0,34	9,94	2,75	4,09	0,80	0,89
Sulawesi Barat	2,86	0,27	9,39	2,34	3,39	0,74	0,86
Maluku	6,27	0,51	8,07	5,28	7,27	1,49	1,22
Maluku Utara	4,55	0,37	8,16	3,82	5,28	0,78	0,88
Papua Barat	4,55	0,56	12,27	3,46	5,65	0,75	0,87
Papua Barat Daya	6,85	0,73	10,64	5,42	8,28	0,94	0,97
Papua	6,96	0,77	11,05	5,45	8,47	1,48	1,22
Papua Selatan	4,04	0,77	19,15	2,52	5,55	1,22	1,10
Papua Tengah	3,62	0,49	13,66	2,65	4,59	2,00	1,41
Papua Pegunungan	1,68	0,38	22,87	0,93	2,43	3,28	1,81
Indonesia	4,85	0,06	1,25	4,73	4,96	4,27	2,07

**Lampiran 45 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen),
Agustus 2025**

Kategori Tingkat Pendidikan	TPT	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan Dasar Ke Bawah	2,81	0,06	2,25	2,68	2,93	4,07	2,02
Pendidikan Menengah	7,58	0,12	1,59	7,35	7,82	3,72	1,93
Pendidikan Tinggi	5,21	0,14	2,59	4,94	5,47	2,80	1,67
Total	4,85	0,06	1,25	4,73	4,96	4,27	2,07

**Lampiran 46 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2025**

Kategori Tingkat Pendidikan	Persentase Pengangguran	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan Dasar Ke Bawah	29,40	0,54	1,85	28,33	30,46	2,99	1,73
Pendidikan Menengah	56,52	0,57	1,01	55,40	57,64	2,79	1,67
Pendidikan Tinggi	14,08	0,37	2,62	13,36	14,81	2,37	1,54

**Lampiran 47 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan,
Agustus 2025**

Kategori Tingkat Pendidikan	Persentase Setengah Penganggur	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan Dasar Ke Bawah	57,21	0,42	0,74	56,38	58,04	3,16	1,78
Pendidikan Menengah	34,27	0,39	1,13	33,51	35,03	2,89	1,70
Pendidikan Tinggi	8,52	0,25	2,90	8,04	9,01	3,41	1,85

**Lampiran 48 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang
Termasuk BukanAngkatan Kerja Menurut Provinsi, Agustus 2025**

Provinsi	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	1.441.426	23.720	1,65	1.394.934	1.487.918	1,37	1,17
Sumatera Utara	3.228.835	53.059	1,64	3.124.836	3.332.834	3,16	1,78
Sumatera Barat	1.284.826	22.164	1,73	1.241.383	1.328.269	1,34	1,16
Riau	1.683.958	28.831	1,71	1.627.448	1.740.468	1,75	1,32
Jambi	894.789	15.960	1,78	863.508	926.070	0,99	1,00
Sumatera Selatan	2.010.824	37.844	1,88	1.936.647	2.085.001	2,53	1,59
Bengkulu	454.040	9.166	2,02	436.075	472.005	0,64	0,80
Lampung	2.125.987	40.468	1,90	2.046.667	2.205.307	2,74	1,66
Kep, Bangka Belitung	362.836	7.942	2,19	347.269	378.403	0,60	0,78
Kepulauan Riau	523.683	15.707	3,00	492.896	554.470	1,64	1,28
DKI Jakarta	2.971.824	70.849	2,38	2.832.957	3.110.691	6,10	2,47
Jawa Barat	12.950.911	139.815	1,08	12.676.867	13.224.955	6,51	2,55
Jawa Tengah	7.700.889	99.647	1,29	7.505.577	7.896.201	5,05	2,25
DI Yogyakarta	770.312	21.840	2,84	727.505	813.119	2,16	1,47
Jawa Timur	8.710.686	127.701	1,47	8.460.386	8.960.986	7,46	2,73
Banten	3.371.542	77.794	2,31	3.219.062	3.524.022	6,52	2,55
Bali	804.799	20.239	2,51	765.130	844.468	1,77	1,33
Nusa Tenggara Barat	1.005.921	28.301	2,81	950.450	1.061.392	2,79	1,67
Nusa Tenggara Timur	1.000.420	18.505	1,85	964.150	1.036.690	1,20	1,09
Kalimantan Barat	1.263.376	21.012	1,66	1.222.191	1.304.561	1,23	1,11
Kalimantan Tengah	681.956	14.449	2,12	653.635	710.277	1,07	1,03
Kalimantan Selatan	965.918	18.728	1,94	929.210	1.002.626	1,27	1,13
Kalimantan Timur	1.042.699	26.008	2,49	991.722	1.093.676	2,27	1,51
Kalimantan Utara	173.323	5.857	3,38	161.844	184.802	0,68	0,83
Sulawesi Utara	695.194	12.972	1,87	669.769	720.619	0,84	0,92
Sulawesi Tengah	648.919	13.124	2,02	623.196	674.642	0,92	0,96
Sulawesi Selatan	2.375.463	39.296	1,65	2.298.441	2.452.485	2,32	1,52
Sulawesi Tenggara	586.187	11.794	2,01	563.071	609.303	0,82	0,91
Gorontalo	290.618	8.023	2,76	274.893	306.343	0,77	0,88
Sulawesi Barat	285.727	8.152	2,85	269.748	301.706	0,80	0,90
Maluku	492.188	12.243	2,49	468.192	516.184	1,06	1,03
Maluku Utara	308.648	7.887	2,56	293.189	324.107	0,70	0,84
Papua Barat	132.261	5.941	4,49	120.617	143.905	0,92	0,96
Papua Barat Daya	151.814	5.245	3,46	141.533	162.095	0,63	0,79
Papua	262.581	9.470	3,61	244.019	281.143	1,18	1,09
Papua Selatan	109.876	5.389	4,90	99.313	120.439	0,91	0,95
Papua Tengah	289.758	12.389	4,28	265.474	314.042	1,83	1,35
Papua Pegunungan	109.029	6.710	6,15	95.876	122.182	1,42	1,19
Indonesia	64.164.043	270.818	0,42	63.633.229	64.694.857	5,61	2,37

**Lampiran 49 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Tingkat Ketidakaktifan Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025**

Provinsi	Tingkat Ketidakaktifan	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	34,68	0,45	1,29	33,81	35,56	1,28	1,13
Sumatera Utara	27,71	0,37	1,33	26,99	28,43	2,73	1,65
Sumatera Barat	28,66	0,41	1,44	27,85	29,47	1,30	1,14
Riau	33,45	0,43	1,30	32,60	34,30	1,48	1,22
Jambi	31,63	0,50	1,57	30,65	32,61	1,12	1,06
Sumatera Selatan	30,12	0,48	1,58	29,19	31,05	2,49	1,58
Bengkulu	28,22	0,45	1,60	27,34	29,11	0,56	0,75
Lampung	29,56	0,51	1,73	28,55	30,56	3,14	1,77
Kep. Bangka Belitung	30,62	0,56	1,83	29,52	31,71	0,61	0,78
Kepulauan Riau	31,77	0,77	2,44	30,25	33,29	1,58	1,26
DKI Jakarta	35,25	0,63	1,80	34,01	36,49	5,12	2,26
Jawa Barat	33,01	0,31	0,93	32,41	33,61	5,77	2,40
Jawa Tengah	25,64	0,30	1,19	25,04	26,24	5,07	2,25
DI Yogyakarta	25,26	0,68	2,68	23,94	26,59	2,56	1,60
Jawa Timur	26,02	0,32	1,23	25,40	26,65	6,16	2,48
Banten	35,34	0,67	1,90	34,02	36,66	6,53	2,56
Bali	22,69	0,52	2,29	21,67	23,70	1,89	1,37
Nusa Tenggara Barat	23,89	0,69	2,88	22,54	25,24	3,80	1,95
Nusa Tenggara Timur	24,45	0,40	1,62	23,67	25,23	1,20	1,10
Kalimantan Barat	29,10	0,41	1,41	28,29	29,90	1,22	1,11
Kalimantan Tengah	31,60	0,53	1,67	30,56	32,63	0,97	0,98
Kalimantan Selatan	30,07	0,44	1,46	29,21	30,93	1,03	1,01
Kalimantan Timur	33,42	0,53	1,59	32,38	34,46	1,37	1,17
Kalimantan Utara	30,45	0,76	2,48	28,97	31,94	0,53	0,73
Sulawesi Utara	32,79	0,44	1,35	31,93	33,66	0,65	0,81
Sulawesi Tengah	27,60	0,48	1,74	26,66	28,54	0,94	0,97
Sulawesi Selatan	32,35	0,45	1,38	31,47	33,22	2,32	1,52
Sulawesi Tenggara	28,33	0,47	1,65	27,41	29,24	0,77	0,88
Gorontalo	30,71	0,69	2,26	29,35	32,07	0,74	0,86
Sulawesi Barat	25,75	0,62	2,41	24,53	26,96	0,78	0,88
Maluku	33,34	0,61	1,84	32,14	34,54	0,86	0,93
Maluku Utara	30,43	0,64	2,10	29,18	31,68	0,68	0,82
Papua Barat	30,45	1,15	3,78	28,20	32,71	0,94	0,97
Papua Barat Daya	31,90	0,90	2,83	30,13	33,67	0,62	0,79
Papua	36,02	0,96	2,66	34,14	37,89	1,00	1,00
Papua Selatan	32,63	1,29	3,96	30,10	35,16	0,88	0,94
Papua Tengah	26,11	1,06	4,07	24,03	28,19	2,25	1,50
Papua Pegunungan	9,34	0,59	6,36	8,18	10,51	1,68	1,30
Indonesia	29,41	0,10	0,35	29,21	29,62	3,97	1,99

**Lampiran 50 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2025**

Kategori Tingkat Pendidikan	Persentase	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan Dasar Ke Bawah	50,78	0,17	0,34	50,43	51,12	6,46	2,54
Pendidikan Menengah	36,12	0,14	0,40	35,84	36,40	4,76	2,18
Pendidikan Tinggi	13,11	0,12	0,89	12,88	13,33	6,42	2,53

**Lampiran 51 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*) Rata-Rata
Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Lapangan Usaha (rupiah), Agustus 2025**

Lapangan Pekerjaan Utama	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A, Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	2.540.278	30.671	1,21	2.480.160	2.600.395	3,10	1,76
B, Pertambangan dan Penggalian	4.983.713	154.242	3,09	4.681.392	5.286.034	3,72	1,93
C, Industri Pengolahan	3.269.849	34.201	1,05	3.202.813	3.336.886	5,53	2,35
D, Pengadaan Listrik dan Gas	5.073.204	285.113	5,62	4.514.369	5.632.040	3,46	1,86
E, <i>Treatment</i> Air. <i>Treatment</i> Air Limbah. <i>Treatment</i> dan Pemulihan Material Sampah. dan Aktivitas Remediasi	2.835.286	110.821	3,91	2.618.071	3.052.500	2,31	1,52
F, Konstruksi	3.234.953	39.111	1,21	3.158.293	3.311.613	3,61	1,90
G, Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2.839.730	28.782	1,01	2.783.316	2.896.145	3,51	1,87
H, Pengangkutan dan Pergudangan	4.094.527	91.317	2,23	3.915.540	4.273.513	3,22	1,79
I, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.546.968	38.429	1,51	2.471.645	2.622.290	3,15	1,77
J, Informasi dan Komunikasi	5.278.706	206.097	3,90	4.874.746	5.682.666	3,75	1,94
K, Aktivitas Keuangan dan Asuransi	5.116.552	144.395	2,82	4.833.530	5.399.574	4,59	2,14
L, Real Estat	4.399.016	190.897	4,34	4.024.848	4.773.183	3,26	1,81
M. N, Aktivitas Profesional dan Perusahaan	4.261.425	95.870	2,25	4.073.515	4.449.334	3,45	1,86
O, Administrasi Pemerintahan. Pertahanan. dan Jaminan Sosial	4.427.234	54.495	1,23	4.320.421	4.534.046	3,38	1,84
P, Pendidikan	3.057.490	33.173	1,08	2.992.469	3.122.511	2,93	1,71
Q, Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.750.376	68.577	1,83	3.615.962	3.884.789	2,69	1,64
R. S. T. U, Aktivitas Jasa Lainnya	1.964.115	35.578	1,81	1.894.381	2.033.850	3,55	1,89
Total	3.331.012	18.209	0,55	3.295.321	3.366.703	6,10	2,47

**Lampiran 52 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*) Rata-
Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi (rupiah),
Agustus 2025**

Provinsi	Rata-rata Upah/ Gaji Bersih Sebulan	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	2.837.520	48.483	1,71	2.742.491	2.932.548	1,04	1,02
Sumatera Utara	2.815.066	47.083	1,67	2.722.781	2.907.351	3,72	1,93
Sumatera Barat	2.911.450	51.864	1,78	2.809.794	3.013.106	1,55	1,25
Riau	3.144.261	49.158	1,56	3.047.908	3.240.614	2,02	1,42
Jambi	2.975.646	61.106	2,05	2.855.876	3.095.417	1,04	1,02
Sumatera Selatan	3.015.055	83.891	2,78	2.850.625	3.179.484	3,99	2,00
Bengkulu	2.935.681	60.606	2,06	2.816.891	3.054.471	0,66	0,81
Lampung	2.520.619	49.461	1,96	2.423.674	2.617.565	2,39	1,54
Kep. Bangka Belitung	3.202.690	65.029	2,03	3.075.230	3.330.150	0,99	1,00
Kepulauan Riau	4.768.990	131.554	2,76	4.511.138	5.026.842	2,42	1,56
DKI Jakarta	5.903.603	115.715	1,96	5.676.795	6.130.411	7,43	2,73
Jawa Barat	3.768.080	70.558	1,87	3.629.782	3.906.378	10,87	3,30
Jawa Tengah	2.528.470	26.044	1,03	2.477.421	2.579.518	3,89	1,97
DI Yogyakarta	2.924.613	79.170	2,71	2.769.436	3.079.789	2,45	1,57
Jawa Timur	2.899.074	37.880	1,31	2.824.827	2.973.321	5,32	2,31
Banten	4.062.488	100.411	2,47	3.865.677	4.259.299	6,40	2,53
Bali	3.639.413	62.297	1,71	3.517.307	3.761.518	1,39	1,18
Nusa Tenggara Barat	2.569.181	58.142	2,26	2.455.220	2.683.142	1,97	1,40
Nusa Tenggara Timur	2.674.136	45.654	1,71	2.584.652	2.763.620	1,09	1,04
Kalimantan Barat	2.972.111	36.073	1,21	2.901.405	3.042.817	1,39	1,18
Kalimantan Tengah	3.451.676	55.283	1,60	3.343.319	3.560.034	1,38	1,17
Kalimantan Selatan	3.164.480	50.117	1,58	3.066.247	3.262.712	1,21	1,10
Kalimantan Timur	4.475.944	97.064	2,17	4.285.693	4.666.196	2,15	1,46
Kalimantan Utara	3.675.921	92.959	2,53	3.493.717	3.858.124	0,63	0,79
Sulawesi Utara	3.420.935	49.700	1,45	3.323.521	3.518.350	0,82	0,90
Sulawesi Tengah	3.056.120	64.896	2,12	2.928.921	3.183.319	1,07	1,03
Sulawesi Selatan	3.060.385	56.667	1,85	2.949.315	3.171.454	1,99	1,41
Sulawesi Tenggara	3.189.724	61.139	1,92	3.069.887	3.309.560	1,01	1,00
Gorontalo	2.911.813	76.238	2,62	2.762.383	3.061.242	0,70	0,84
Sulawesi Barat	2.698.528	83.227	3,08	2.535.399	2.861.657	0,58	0,76
Maluku	3.100.805	77.934	2,51	2.948.051	3.253.560	0,82	0,91
Maluku Utara	3.620.219	78.801	2,18	3.465.765	3.774.673	0,62	0,79
Papua Barat	3.765.973	81.691	2,17	3.605.855	3.926.091	0,30	0,55
Papua Barat Daya	3.837.947	99.824	2,60	3.642.287	4.033.608	0,64	0,80
Papua	4.426.645	117.203	2,65	4.196.920	4.656.370	1,00	1,00
Papua Selatan	4.264.963	177.640	4,17	3.916.781	4.613.146	0,88	0,94
Papua Tengah	4.808.336	209.961	4,37	4.396.802	5.219.870	1,32	1,15
Papua Pegunungan	3.941.546	248.316	6,30	3.454.833	4.428.258	1,01	1,00
Indonesia	3.331.012	18.209	0,55	3.295.321	3.366.703	6,10	2,47

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

